

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH

SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 - 2024)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Bagas Mahardika Putra

NIM : 21441846

Program Studi : Akuntansi (S-1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH

SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 - 2024)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Bagas Mahardika Putra

NIM : 21441846

Program Studi : Akuntansi (S-1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : "Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah
Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus
Pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 -2024)"

Nama : Bagas Mahardika Putra

NIM : 21441846

TTL : Ponorogo, 13 Agustus 2001

Program Studi : Akuntansi (S-1)

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 6 Agustus 2025

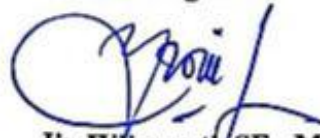
Pembimbing I



Dra.Khusnatul Z. W, MM., Ak., CA

NUPTK. 8154745646230083

Pembimbing II

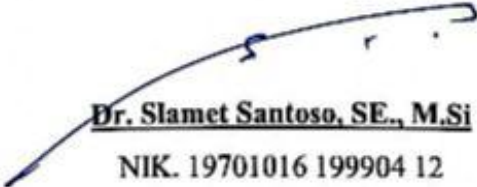


Iin W/jayanti, SE., M.Ak

NUPTK. 8655765666230360

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

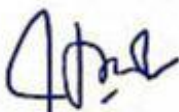


Dr. Slamet Santoso, SE., M.Si

NIK. 19701016 199904 12

Dosen Penguji

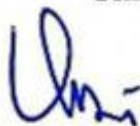
Ketua



Dra. Khusnatul Z.W, MM., Ak., CA

NUPTK. 8154745646230083

Sekretaris



Nurul Hidayah, SE., M.Ak

NUPTK. 8857760661231132

Anggota



Titin Eka Ardiana, SE., M.Si

NUPTK. 1540760661210152

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis berupa analisis efisiensi, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi.

Hasil dari analisis efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 4,24%. Hasil analisis efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan presentase 2,95%. Hasil dari analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 113,20%. Hasil dari analisis efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata tergolong efektif dengan presentase 99,91%. Hasil dari analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 32,28%. Hasil dari analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria kurang dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 15,80%.



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020-2024)”**. Skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

Penulisan skripsi ini tidak akan mampu selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan saudara tercinta yang memberikan dukungan utama dalam menempuh pendidikan, senantiasa memberikan semangat, motivasi, perhatian, petuah, nasihat dan doa yang tiada henti.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dr. Rido Kurnianto, M.Ag yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dr. Slamet Santoso, SE., M.Si. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Naning Kristiyana, S.E., M.M yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang memadai selama menempuh pendidikan.

5. Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Nur Sayidatul Muntiah, S.E., M.Ak yang telah memberikan arahan selama perkuliahan dan fasilitas yang baik.
6. Sekretaris Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Titin Eka Ardiana, S.E., M.Ak yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, arahan dan saran selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
7. Dosen Pembimbing 1 Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W, MM, Ak., CA yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan ketlatenan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dosen Pembimbing 2 Iin Wiayanti SE., M.Ak yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukannya agar skripsi ini selesai dengan baik.
9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan semua ilmunya tanpa terkecuali sehingga peneliti memiliki bekal ilmu yang cukup untuk penulisan skripsi ini.
10. Pihak – pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas bantuan dan semangatnya telah bersedia untuk memberikan bantuan, masukan dan inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.

Ponorogo, 6 Agustus 2025



Peneliti

MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya..”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Anfaal : 46)



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu instansi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 6 Agustus 2025



(Bagas Mahardika Putra)

NIM. 21441846

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Laporan Keuangan Daerah	13
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Daerah	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.3 Pajak Daerah.....	20
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	20
2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	21

2.4	Retribusi Daerah	26
2.4.1	Pengertian Retribusi Daerah.....	26
2.4.2	Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	27
2.5	Analisis Efisiensi	29
2.5.1	Pengertian Analisis Efisiensi.....	29
2.5.2	Metode Pengukuran Efisiensi.....	29
2.5.3	Indikator Kriteria Efisiensi.....	30
2.6	Analisis Efektivitas.....	30
2.6.1	Pengertian Efektivitas	30
2.6.2	Metode Pengukuran Efektivitas	31
2.6.3	Indikator Kriteria Efektivitas	32
2.7	Analisis Kontribusi	32
2.7.1	Pengertian Kontribusi.....	32
2.7.2	Metode Pengukuran Kontribusi	33
2.7.3	Indikator Kriteria Kontribusi.....	34
2.8	Penelitian Terdahulu	34
2.9	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2	Jenis Dan Metode Pengambilan Data	39
3.2.1	Jenis Data	39
3.2.2	Metode Pengambilan Data.....	39
3.3	Definisi Operasional Variabel	39
3.3.1	Pajak Daerah	39
3.3.2	Retribusi Daerah	39
3.3.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
3.3.4	Efisiensi.....	40
3.3.5	Efektivitas	40
3.3.6	Kontribusi	40
3.4	Metode Analisis Data	41
3.4.1	Analisis Data Penelitian Deskriptif Kualitatif	41
3.4.2	Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Ponorogo	45
4.1.1.2 Kondisi Geografis Dan Topografis Kabupaten Ponorogo.....	46
4.1.1.3 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Ponorogo	47
4.1.1.4 Tujuan Dan Sasaran Bppkad Kabupaten Ponorogo.....	48
4.1.1.5 Struktur Organisasi Bppkad Kabupaten Ponorogo.....	48
4.1.2 Hasil Pengumpulan Data.....	51
4.1.2.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	52
4.1.2.2 Target Dan Realisasi Pajak Daerah	56
4.1.2.3 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah.....	59
4.2 Pembahasan	63
4.2.1 Analisis Efisiensi	63
4.2.1.1 Analisis Efisiensi Pajak Daerah.....	63
4.2.1.2 Analisis Efisiensi Retribusi Daerah	68
4.2.2 Analisis Efektivitas	72
4.2.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah	72
4.2.2.2 Analisis Efektivitas Retribusi Daerah	78
4.2.3 Analisis Kontribusi	82
4.2.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah	82
4.2.3.2 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah.....	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Keterbatasan	95
5.3 Saran	96
5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo	96
5.2.2 Bagi Peneliti yang Akan Datang.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo	7
Tabel 2.1 Indikator Kriteria Efisiensi	30
Tabel 2.2 Indikator Kriteria Efektivitas	32
Tabel 2.3 Indikator Kriteria Kontribusi	34
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Indikator Kriteria Efisiensi	42
Tabel 3.2 Indikator Kriteria Efektivitas	43
Tabel 3.3 Indikator Kriteria Kontribusi	44
Tabel 4.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	52
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	57
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	60
Tabel 4.4 Indikator Kriteria Efisiensi	64
Tabel 4.5 Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	64
Tabel 4.6 Indikator Kriteria Efisiensi	68
Tabel 4.7 Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 4.8 Indikator Kriteria Efektivitas	73
Tabel 4.9 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	74
Tabel 4.10 Indikator Kriteria Efektivitas	78
Tabel 4.11 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	79
Tabel 4.12 Indikator Kriteria Kontribusi	83

Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	84
Tabel 4.14 Indikator Kriteria Kontribusi	88
Tabel 4.15 Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 4.16 Hasil Penelitian	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Ponorogo.....	48
Gambar 4.2 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	52
Gambar 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	57
Gambar 4.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	60
Gambar 4.5 Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	65
Gambar 4.6 Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 4.7 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024	74
Gambar 4.8 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024....	79
Gambar 4.9 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.....	84
Gambar 4.10 Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024..	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Lampiran 3 Perhitungan Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur negara. Pembangunan ini dilakukan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung, menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang sumber daya alamnya sedikit dan kurang berpotensi merasa khawatir karena pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerahnya (Puspitasari, 2014). Sehingga jika sumbangan dari pemerintah pusat berkurang akan menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk bisa lebih mandiri dalam mengurus pemerintahannya maupun mengurus kebutuhan keuangannya, sehingga daerah mampu melakukan pembangunan daerah dan menjalankan program pemerintahan dengan baik (Ul'hasanah, 2021). Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya dapat memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta

mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat. Sejak diterapkannya otonomi daerah kesejahteraan masyarakat lebih bergantung pada daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Puspitasari, 2014).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerapkan otonomi daerah di daerahnya. Sebaliknya jika jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin menurun maka penerapan otonomi daerah di daerah tersebut belum maksimal (Mentari dan Rahayu, 2015). Semakin besar penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula dana yang tersedia untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat akan berkurang (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada setiap daerah dalam mengelolah umber daya daerah dengan sumber pendanaan antara lain : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan sumber pendapatan asli daerah yang sah (hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro). Hal ini dilakukan dengan penuh

tanggungjawab dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah dan mengurangi sumbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten kota terdiri atas: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (laba, deviden, penjualan saham milik daerah) dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah (Moridu dan Haruni, 2018).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi pribadi atau badan yang bersifat wajib kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga harus ditingkatkan karena sebagai pembiayaan otonomi daerah (Adisasmita, 2014).

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten yang telah menjalankan kebijakan otonomi daerah. Sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri rumah tangga pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong serta peran masyarakat dalam pembangunan, serta

meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan pengembangan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo (Ul'hasanah, 2021).

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo memiliki peran yang penting dalam penerapan otonomi daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertugas membantu pemerintahan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan. Kinerja pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat akan berjalan dengan baik dan lancar jika keuangan dan asset daerah dikelola dengan transparan, baik dan professional oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), sehingga keberhasilan penerapan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang optimalisasi pengelolaan keuangan yang merupakan indikator penting dalam otonomi daerah (Yakub, dkk, 2022).

Optimalisasi penerimaan daerah salah satunya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Menurut Amalia (2018), pajak daerah dan retribusi daerah perlu dianalisis dengan cara melakukan penilaian potensi objek pajak dan retribusi daerah tersebut termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Objek pajak dan retribusi daerah berada pada kategori prima jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial. Objek pajak dan retribusi daerah dalam kategori potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Objek pajak dan retribusi daerah dikatakan berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Objek pajak dan retribusi daerah berada dalam kategori terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial (Adi dan Sulistyowati, 2013). Penilaian

dan analisis tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan dengan baik. Selain itu pajak dan retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ul'hasanah, 2021).

Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui bahwa selama tahun 2019 sampai 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo selalu melebihi target yang ditetapkan (Syada, 2024). Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah. Penyelenggara pemerintahan yang efektif dalam mengelola pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Joko Irianto Pjs Bupati Ponorogo dalam Gema Surya Fm yang menyatakan, bahwa dukungan surplus Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dimana dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo beliau mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp450,3 Miliar. Angka ratusan miliaran tersebut dari pajak daerah yang diproyeksikan berkontribusi menyumbang PAD sekitar Rp202 Miliar, retribusi daerah diproyeksikan sekitar Rp243,9 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp1,6 Miliar, dan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp2,7 Miliar (Gema Surya Fm, 2024).

Kondisi tersebut sama dengan Kabupaten Madiun dimana pada Tahun 2025 juga diproyeksikan mengalami surplus Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Madiun tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 372,55 Miliar. Angka ratusan miliaran tersebut dari pajak daerah yang diproyeksikan berkontribusi menyumbang PAD sekitar Rp 175 Miliar, retribusi daerah diproyeksikan sekitar Rp173,93 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp8,61 Miliar, dan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp15,02 Miliar (TribunBatam.id, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut membutuhkan analisis untuk dilihat kinerja keuangan daerah agar tetap terkendali. Pemerintah harus memantau efisiensi, efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Fajar (2023), analisis efisiensi adalah analisis perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang dipergunakan. Pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni gambaran tentang tingkat biaya tertentu yang dapat mengungkapkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan sejumlah output (keluaran) tertentu (Romdani, dkk, 2019). Semakin tinggi nilai rasio ini manandakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak maupun retribusi daerah (Fajar, 2023).

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dalam Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dalam Rupiah)	Presentase Capaian PAD (%)
1	2019	287.705.087.351,98	291.227.369.256,84	101,22%
2	2020	266.465.788.651,52	303.331.015.448,27	113,83%
3	2021	274.040.857.868,00	376.702.757.475,31	137,46%
4	2022	305.359.655.300,00	321.603.082.547,58	105,49%
5	2023	333.122.055.648,00	363.451.938.328,36	107,79%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo selalu melebihi target yang ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp 3.522.281.904,86 atau naik sebesar 1.22 %. Tahun 2020 selisih antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 36.865.226.796,75atau naik sebesar 13,83 %. Tahun 2021 selisih antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 102.661.899.607,31 atau naik sebesar 37,46%. Tahun 2022 selisih antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 16.243.427.247,58 atau naik sebesar 5,32%. Sedangkan tahun 2023 selisih antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 30.329.882.680,36 atau naik sebesar 9,10%.

Analisis efektivitas menggambarkan ukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009). Analisis efektivitas merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2018). Menurut Yuliasuti dan Putri (2017), analisis efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan target yang ingin dicapai. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Halim dan Kusufi, 2018).

Menurut Rahayu (2020) analisis kontribusi adalah analisis mengenai iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kontribusi menunjukkan seberapa besar bagian, tingkat atau proporsi jenis pajak tertentu terhadap total pajak yang diterima. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli daerah (Moridu dan Haruni, 2018). Pengukuran kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya (Moridu dan Haruni, 2018).

Penelitian mengenai efisiensi pernah dilakukan oleh Fajar (2023) yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun. Hasil penelitian tersebut yaitu efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sangat efektif. Efisiensi pajak daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori cukup efisien dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori tidak efisien. Kontribusi pajak daerah Kabupaten/Kota Se-

Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sedang dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sangat kurang.

Berdasarkan penelitian dahulu mengenai efektivitas yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2021) yang berjudul Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 sangat efektif. Trend pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dalam kategori sedang dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dalam kategori kurang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kontribusi pajak yang dilakukan oleh Puspitasari (2014) yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan pada Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 -2013 dalam kategori efektif. Efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 dalam kategori yang efisien. Pajak daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 kurang berkontribusi terhadap PAD. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 masuk kategori berkontribusi sedang, tetapi rasio kontribusinya cenderung turun.

Penelitian ini merupakan kompilasi variabel dari beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2023), mengambil variabel efektivitas, efisiensi dan kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2021), mengambil variabel efektivitas, dan kontribusi retribusi dan pajak daerah. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2014), dengan mengambil variabel efisiensi, efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang digunakan dan tahun penelitiannya terupdate. Selain itu pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diambil dari objek penelitian dapat didukung dengan hasil wawancara sehingga menghasilkan penelitian yang lebih valid.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 - 2024)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tingkat Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024?

4. Bagaimana Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024?
5. Bagaimana Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo Tahun 2020-2024?
6. Bagaimana Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo Tahun 2020-2024?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui Tingkat Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.
2. Mengetahui Tingkat Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.
3. Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.
4. Mengetahui Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024.
5. Mengetahui Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo Tahun 2020-2024.
6. Mengetahui Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo Tahun 2020-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama Prodi Akuntansi.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi, efektivitas serta kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pengimplementasian berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan daya pikir ilmiah.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LAPORAN KEUANGAN DAERAH

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan kinerja keuangan selama satu periode tertentu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah media pertanggungjawaban kepala daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran (Halim dan Kusufi, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial serta menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola pemerintah daerah.

2.1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) laporan keuangan daerah diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRABD)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRABD) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode

pelaporan, serta perbandingannya dengan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan pendapatan yang diperoleh dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, serta perbandingannya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD (Halim dan Kusufi, 2018). Fungsi utama dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRABD) yaitu menilai kinerja pelaksanaan APBD dan menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (Mahmudi, 2019).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menggambarkan perubahan Saldo Anggaran Lebih dari awal hingga akhir periode, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggambarkan posisi Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun, perubahan-perubahannya selama tahun berjalan, dan Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun (Halim dan Kusufi, 2018). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) berfungsi untuk menunjukkan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan pada periode mendatang (Mahmudi, 2019).

3. Neraca

Menurut Mahmudi (2019), neraca menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, yaitu akhir periode akuntansi. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pemerintah pada suatu tanggal tertentu, yang terdiri atas

informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas (Halim dan Kusufi, 2018). Neraca berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aset yang dimiliki, kewajiban, dan ekuitas dana (Mahmudi, 2019).

4. Laporan Operasional (LO)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Operasional (LO) menggambarkan kinerja operasional pemerintah dalam suatu periode berdasarkan basis akrual, yang mencakup seluruh pendapatan dan beban. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan seluruh aktivitas operasional pemerintah daerah yang menggambarkan pendapatan dan beban berbasis akrual selama periode pelaporan (Halim dan Kusufi, 2018). Laporan Operasional (LO) memiliki fungsi utama yaitu menilai efektivitas dan efisiensi operasional keuangan pemerintah (Mahmudi, 2019).

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2018). Fungsi dari Laporan Arus Kas (LAK) yaitu menilai kemampuan entitas menghasilkan dan menggunakan kas (Mahmudi, 2019).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan, termasuk surplus/defisit LO dan koreksi-koreksi lainnya. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas selama satu periode pelaporan, sebagai akibat dari surplus/defisit operasional, koreksi-koreksi atas kesalahan periode sebelumnya, dan perubahan kebijakan akuntansi (Halim dan Kusufi, 2018). Laporan Perubahan Ekuitas memiliki fungsi untuk menunjukkan sumber-sumber perubahan dalam ekuitas pemerintah (Mahmudi, 2019).

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut Mahmudi (2019), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisi penjelasan rinci dan naratif atas pos-pos laporan utama dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama, serta informasi lain yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan (Halim dan Kusufi, 2018). Fungsi utama Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yaitu menyediakan informasi tambahan agar laporan keuangan lebih dapat dipahami dan transparan (Mahmudi, 2019).

2.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jenis penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Puspitasari, 2014).

Dari berbagai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang digunakan oleh daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai wujud desentralisasi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah,

Menurut Adisasmita (2014), pajak daerah yaitu iuran pajak oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa menerima imbalan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Halim dan Kusufi, 2018).

2. Retribusi Daerah,

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum yang diberikan untuk tujuan kepentingan umum, retribusi jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial, dan retribusi perizinan tertentu untuk kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan (Halim dan Kusufi, 2018).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

Menurut Ubaidah (2018), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan hasil dari perusahaan milik daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup semua bentuk penerimaan daerah dari penyertaan modal dalam BUMD dan entitas lainnya, seperti dividen, bunga investasi, laba ditahan, dan hasil penjualan saham, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim dan Kusufi, 2018).

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Rahayu (2020), lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah yang merupakan sumber dari pendanaan daerah yang tidak dapat di klasifikasikan dalam retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah kategori PAD yang legal namun tidak masuk kategori utama

(pajak, retribusi, atau hasil kekayaan yang dipisahkan), dan terdiri atas berbagai penerimaan sah seperti jasa giro, denda, penjualan aset, dan kerja sama dengan pihak ketiga (Halim dan Kusufi, 2018).

2.3 PAJAK DAERAH

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah guna melaksanakan desentralisasi fiskal. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pusitasari, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan pada daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dananya digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan yang dimaksud yaitu kendaraan bermotor beroda dengan gandengannya, yang dioperasikan di jalan darat dan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Kendaraan bermotor yang dikecualikan yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan negara asing, dan objek lain yang ditetapkan Peraturan Daerah.

b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat adanya perjanjian oleh 2 pihak atau perbuatan sepihak atau terjadi keadaan jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan ataupun pemanfaatan dari air permukaan. Pengecualian dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok yaitu pajak yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah. Rokok yang dimaksud yaitu cerutu, sigaret, dan rokok daun.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas hiburan dan olahraga.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran baik makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli yang berada di tempat pelayanan ataupun di tempat lain.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, acrobat, sulap, permainan bilyar, golf, boling, pacuan kuda, permainan ketangkasan, panti pijak refleksi, mandi uap/spa, dan panti olahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame seperti reklame papan, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film, dan reklame peragaan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain, kecuali yang digunakan oleh

instansi pemerintah dan pemerintah daerah, tempat-tempat yang digunakan oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin, dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di luar permukaan bumi atau di dalam bumi yang dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, kecuali tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri, tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan tempat parkir lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, perikanan rakyat, pengairan pertanian, serta peribadatan, dan pemanfaatan atau pengambilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan pengusahaan atau pengambilan sarang burung walet, kecuali pengambilan yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengambilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, kecuali yang diperoleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan untuk

kepentingan umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya dengan tidak ada perubahan nama, orang pribadi ataupun badan karena waqaf, dan yang digunakan untuk ibadah.

2.4 RETRIBUSI DAERAH

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2018) Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu sebagai balas jasa atas pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya pelayanan yang diberikan oleh Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Anggoro, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah kepada masyarakat sebagai timbal balik atas penggunaan fasilitas pemerintah oleh masyarakat yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwasannya retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar;
- e. Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang berupa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Jenis penyediaan atau pelayanan barang atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- j. Pemanfaatan aset Daerah Retribusi Perizinan Tertentu

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi mengenai kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan atas penggunaan ruang, pengendalian, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk menjaga kelestarian umum dan melindungi kepentingan umum. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.5 ANALISIS EFISIENSI

2.5.1 Pengertian Analisis Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Yakub, dkk (2022) mendeskripsikan efisiensi sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Efisiensi adalah yang menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Masitoh, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak ataupun retribusi daerah dengan realisasi penerimaan yang didapat.

2.5.2 Metode Pengukuran Efisiensi

Metode pengukuran efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi. Metode pengukuran efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$Efisiensi\ Retribusi\ Daerah = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

$$Efisiensi\ Pajak\ Daerah = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Pengukuran efisiensi retribusi daerah diperoleh dari perbandingan biaya pemungutan retribusi daerah dan realisasi penerimaan

retribusi daerah pada tahun penelitian. Pengukuran efisiensi pajak daerah diperoleh dari perbandingan biaya perolehan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilai rasio ini manandakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak maupun retribusi daerah (Masitoh, 2018).

2.5.3 Indikator Kriteria Efisiensi

Indikator untuk mengukur tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5-10 %	Efisien
11-20 %	Cukup Efisien
21-30 %	Kurang Efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

2.6 ANALISIS EFEKTIVITAS

2.6.1 Pengertian Analisis Efektivitas

Wenur,dkk (2018), mendeskripsikan efektivitas sebagai hubungan output terhadap pencapaian sasaran dan atau tujuannya. Semakin efektif proses kerja organisasi, maka capaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan atas output yang dihasilkan juga semakin besar. Menurut Asih (2019), efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas

maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas adalah rasio yang mengukur atau menggambarkan keberhasilan atau output suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Ul'hasanah, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.6.2 Metode Pengukuran Efektivitas

Metode pengukuran efektivitas menggunakan rasio efektivitas. Metode pengukuran efektifitas pajak dan retribusi daerah menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Mahmudi (2019)

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Mahmudi (2019)

Efektivitas pajak daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut. Efektivitas retribusi daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah pada tahun tersebut.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Halim dan Kusufi, 2018).

2.6.3 Indikator Kriteria Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019), indikator efektivitas seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

2.7 ANALISIS KONTRIBUSI

2.7.1 Pengertian Analisis Kontribusi

Menurut Rahayu (2020) kontribusi adalah iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kontribusi menunjukkan seberapa besar bagian, tingkat atau proporsi jenis pajak tertentu terhadap total pajak yang diterima. Ul'hanah (2021) menjelaskan bahwa kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan oleh suatu kegiatan sehingga mendapat dampak yang bisa dirasakan atau dari aspek kecil kepada aspek yang lebih besar. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapat Asli daerah (Moridu dan Haruni, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan seberapa besar dampak yang dapat diberikan oleh kegiatan kecil terhadap kegiatan besar. Dalam penelitian ini menunjukkan seberapa besar dampak pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut.

2.7.2 Metode Pengukuran Kontribusi

Metode pengukuran kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Metode pengukuran yang digunakan dalam menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Pengukuran kontribusi pajak daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun penelitian. Pengukuran kontribusi retribusi daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun penelitian. Semakin tinggi nilai rasio kontribusi maka semakin besar pula peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.

Begitu sebaliknya, semakin kecil nilainya maka peranan penerimaan pajak dan retribusi daerah juga kecil terhadap PAD (Fajar, 2023).

2.7.3 Indikator Kriteria Kontribusi

Indikator kontribusi menurut Mahmudi (2019), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2019)

2.8 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu, berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari pembuatan skripsi ini :

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ul'hasanah, Anisa (2021)	Analisis Efektivitas, <i>Trend</i> , dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 sangat efektif. Trend pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dalam kategori sedang dan retribusi daerah

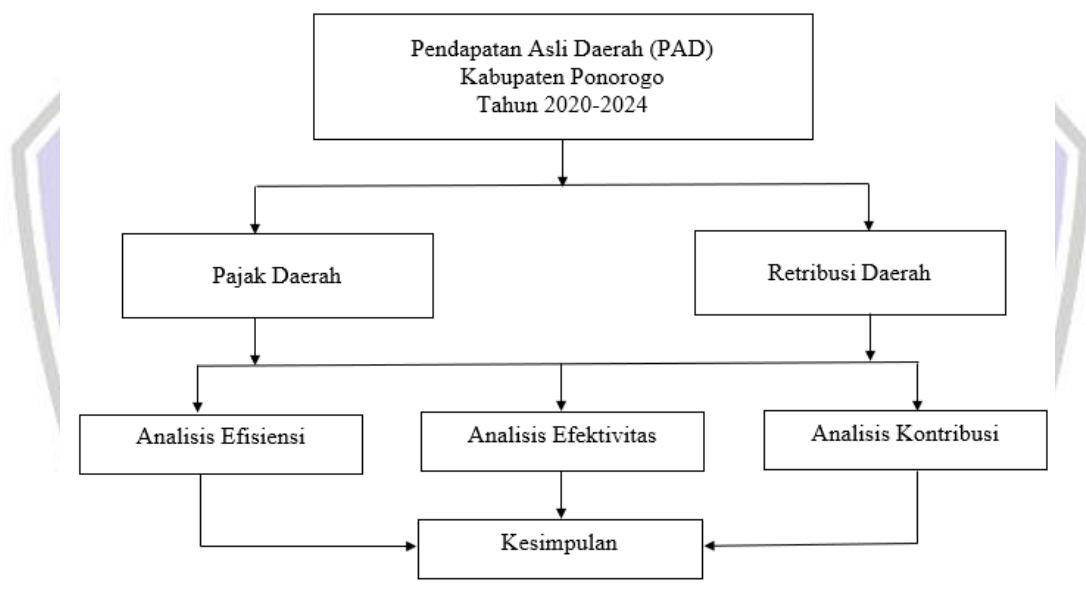
				Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dalam kategori kurang.
2	Yakub, dkk (2022)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien, retribusi daerah juga sangat efektif terhadap target yang ditentukan, namun kurang efisien. terhadap PAD, rasio kontribusi pajak daerah sangat baik namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat kurang.
3	Natalia, Irene dan Khoirunnisa Kusumaningtyas (2022)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (2022)	Kualitatif	Tingkat efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan sangat efektif. Tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame Kabupaten Wonogiri masih dibawah rasio 10% yang dapat dikategorikan sangat kurang.
4	Fajar, Ika Amalia (2023)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun	Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sangat efektif. Efisiensi pajak daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori cukup efisien dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori tidak efisien. Kontribusi pajak daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sedang dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sangat kurang.
5	Panawan, dkk (2023)	Analisis Efektivitas,	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah

		Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar		kota Makassar cukup efektif. Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah kota Makassar cukup efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik.
--	--	---	--	---

Sumber : Berbagai penelitian terdahulu (data diolah pada tanggal 14 April 2025)

2.9 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di

Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis Efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi yang didapat. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis tingkat perolehan realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target anggarannya apakah sudah efektif atau belum. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis tingkat realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dengan pengambilan data dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Alun Alun Utara No. 03 Gedung Sasana Praja Lt. 2, Ponorogo, Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD). Data sekunder yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat efisiensi digunakan untuk mengetahui perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang didapat. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan, sehingga bisa dijadikan evaluasi untuk pengelolaan yang akan datang. Tingkat kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memperoleh gambaran untuk melakukan tindakan/ kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

3.2 JENIS DAN METODE PENELITIAN

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder.

Data sekunder yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diambil menggunakan metode dokumentasi. Pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dilakukan dengan mengambil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024. Sumber data diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo.

3.3 DEVINISI OPERASIONAL VARIABEL

3.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

3.3.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan

daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

3.3.4 Efisiensi

Yakub, dkk (2022) mendeskripsikan efisiensi sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan).

3.3.5 Efektivitas

Menurut Asih (2019), efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

3.3.6 Kontribusi

Menurut Rahayu (2020) kontribusi adalah iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kontribusi menunjukkan seberapa besar bagian, tingkat atau proporsi jenis pajak tertentu terhadap total pajak yang diterima.

3.4 METODE ANALISIS DATA

3.4.1 Analisis Data Penelitian Kuantitatif Deskriptif

Metode analisis data dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sesuai dengan keadaannya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis data yang menggambarkan atau memaparkan data yang sudah dikumpulkan secara apa adanya, tanpa bermaksud untuk membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2018). Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data yang berbentuk angka atau dapat dikonversi menjadi angka.

Tahapan analisis deskriptif kuantitatif penelitian ini dimulai dari pengumpulan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis efisiensi, efektivitas dan kontribusi untuk mendapatkan hasil penelitian. Kemudian pembahasan dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian secara lebih detail dan terperinci. Tahapan terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari pembahasan.

3.4.2 Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi

Metode analisis data dalam penelitian ini berupa analisis efisiensi, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi. Penjelasan metode analisis data tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019) metode pengukuran efisiensi sebagai berikut:

$$Efisiensi Pajak Daerah = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

$$Efisiensi Retribusi Daerah = \frac{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa tingkat efisiensi dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

2. Analisis Efektivitas

Metode pengukuran efektifitas pajak dan retribusi daerah menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas Pajak Daerah = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

$$Efektivitas Retribusi Daerah = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa tingkat efektivitas dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

3. Analisis Kontribusi

Metode pengukuran digunakan dalam menghitung rasio kontribusi Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Indikator kontribusi menurut Mahmudi (2019), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo didirikan pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Kemudian pada tanggal ini ditetapkan hari jadi kota Ponorogo. Pendiri Kabupaten Ponorogo adalah Raden Bathoro Katong. Awal mula berdirinya Kabupaten Ponorogo yaitu ketika Raden Bathoro Katong tiba di Wengker, yang pada saat itu dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Kemudian Raden Bathoro Katong mendirikan pemukiman yang memenuhi syarat yaitu Dusun Plampitan, Setono, Jenangan. Raden Bathoro Katong dan para pengikutnya tetap berusaha mendirikan pemukiman meskipun banyak hambatan dan tantangan. Tetapi untuk mencapai tujuannya, pada tahun 1482- 1486 menyusun kekuatan, sehingga hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi. Akhirnya Raden Bathoro Katong berhasil mendirikan Kadipaten yang didukung oleh semua pihak. Awal berdirinya Kadipaten ini bernama Pramana Raga. Pramana yang berarti daya kekuatan, permono, wadi rahasia hidup, sedangkan Raga artinya badan jasmani. Tetapi lama kelamaan nama tersebut berubah menjadi Ponorogo (<http://ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025).

4.1.1.2 Kondisi Geografis dan Topografis Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di koordinat 111o17'-111o52' BT dan 7o49'-8o20' LS yang memiliki ketinggian antara 92-2.563 meter di atas permukaan laut dan luas wilayahnya yaitu 1.371,78 km². Wilayah Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 subarea, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi meliputi kecamatan Sooko, Pulung, Ngebel, dan Ngrayun, sedangkan sisanya yaitu area dataran rendah. Jarak Kabupaten Ponorogo dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke arah ibu kota negara Indonesia (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan beberapa wilayah. Sebelah utara Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (<http://ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025).

4.1.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas dari BPPKAD yaitu membantu bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Fungsi BPPKAD adalah sebagai berikut (<http://bppkad.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025):

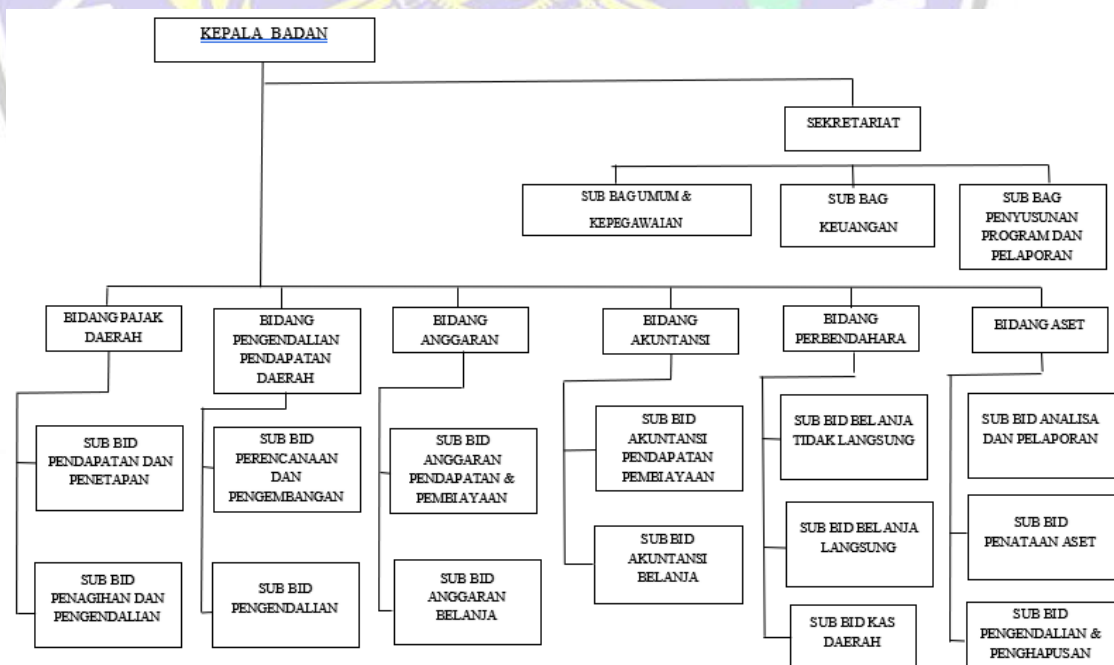
- a. Menyusun kebijakan reknis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- c. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- d. Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

4.1.1.4 Tujuan dan Sasaran BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, sedangkan sasarannya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo (<http://bppkad.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025).

4.1.1.5 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Bagian struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah sebagai berikut (<http://bppkad.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025):



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Ponorogo

a. Kepala Badan

Kepala badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan. Sekretariat terdiri dari Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, Sub Bidang Keuangan, dan Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pajak Daerah

Bidang pajak daerah bertugas membantu kepala badan dalam melakukan pengelolaan pajak daerah. Bidang pajak daerah terdiri dari Sub Bidang Pendataan dan Penetapan dan Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian.

d. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Bidang pengendalian pendapatan daerah bertugas membantu kepala badan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan pendapatan, penatausahaan, dan pengendalian pendapatan daerah. Bidang pengendalian pendapatan daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Sub Bidang Pengendalian.

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran bertugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), nota keuangan, jabatan eksekutif dalam pengajuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) menyiapkan data petunjuk teknis berkaitan dengan pinjaman dan investasi atas nama pemerintah daerah. Bidang anggaran terdiri dari Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dan Sub Bidang Anggaran Belanja.

f. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi bertugas melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. bidang akuntansi terdiri dari Sub Bidang akuntansi

pendapatan dan pembiayaan dan Sub Bidang Akuntansi Belanja.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan bertugas menunpulkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perbendaharaan belanja pegawai, perbendaharaan belanja non pegawai dan kas daerah. bidang perbendaharaan terdiri dari Sub Bidang Belanja Tak Langsung, Sub Bidang belanja langsung, dan Sub Bidang kas daerah.

h. Bidang Asset

Bidang asset bertugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan Barang Milik Daerah/ aset milik daerah.

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah untuk mengetahui efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 20120-2024. Data yang diperoleh yaitu mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

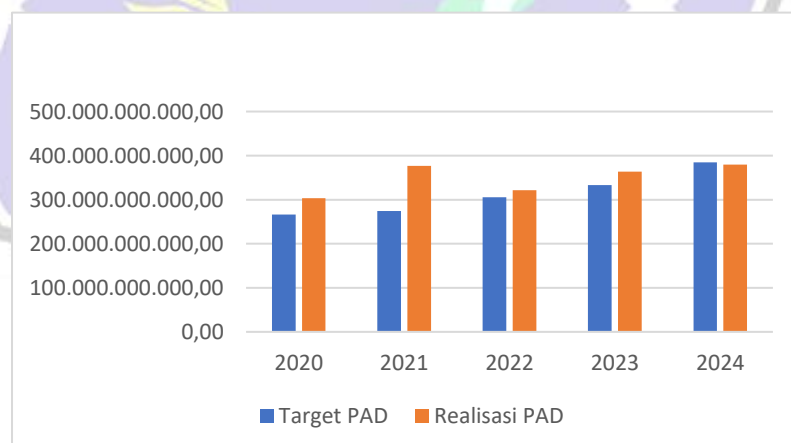
4.1.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jenis penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Deviasi (%)
2020	266.465.788.651,52	303.331.015.448,27	12,15%
2021	274.040.857.868,00	376.702.757.475,31	27,25%
2022	305.359.655.300,00	321.603.082.547,58	5,05%
2023	333.122.055.648,00	363.451.938.328,36	8,34%
2024	384.411.812.918,76	379.425.932.137,27	-1,31%
Rata-Rata Deviasi			10,30%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.2
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo secara rata-rata sudah melebihi target PAD yaitu sebesar 10,30%. Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 12,15% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2020 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh semua sumber penerimaan PAD melebihi target anggaran yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan realisasi PAD. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 78.644.045.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 90.424.462.672,61. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 12.221.209.035,50 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 13.718.556.188,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.041.966.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.131.262.727,20. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 175.211.968.616,02 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 198.050.733.860,46.

Tahun 2021 terdapat selisih sebesar 27,25% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2021 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar sumber penerimaan PAD melebihi target anggaran yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan realisasi PAD. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp

85.525.000.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 96.386.623.239,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 12.026.668.933,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 11.395.502.881,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.150.690.865,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.152.503.864,60. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 175.338.498.070,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 267.768.127.490,71.

Tahun 2022 terdapat selisih sebesar 5,05% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh sumber penerimaan PAD yang berasal dari pendapatan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target anggaran yang telah ditentukan.. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 97.530.000.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 115.414.988.961,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 15.055.540.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 14.829.580.201,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.152.503.800,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.229.530.107,56. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara

target anggaran sebesar Rp 191.621.611.500,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 190.128.983.278,00.

Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 8,34% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan selisih antara target dan realisasi PAD tahun 2023 tidak terlalu besar dibandingkan selisih antara target dan realisasi PAD pada seluruh tahun penelitian. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 114.390.583.995,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 127.792.238.016,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 19.200.010.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 14.829.580.201,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 3.513.121.791,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 3.513.121.790,64. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 196.018.339.862,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 212.863.000.679,72.

Tahun 2024 terdapat selisih sebesar -1,31% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2024 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh sumber penerimaan PAD yang berasal dari pendapatan pendapatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target anggaran yang telah ditentukan.. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah

sebesar Rp 122.488.518.684,76 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 132.624.031.337,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp. 249.261.832.255,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 233.562.254.492,48. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.883.367.866,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.283.367.866,44. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 10.478.094.113,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 11.956.278.441,35.

4.1.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Deviasi (%)
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	13,03%
2021	85.525.000.000,00	96.386.623.239,00	11,27%
2022	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	15,50%
2023	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	10,49%
2024	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	7,64%
Rata-Rata Deviasi			11,58%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo secara rata-rata sudah melebihi target pajak daerah yaitu sebesar 11,58%. Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 13,03% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2020 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Namun

pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak parkir realisasinya tidak melebihi target yang ditentukan, dimana nilai target pajak parkir sebesar Rp. 182.100.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 175.440.600.

Tahun 2021 terdapat selisih sebesar 11,27% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2021 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Namun pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak reklame realisasinya tidak melebihi target yang ditentukan, dimana nilai target pajak reklame sebesar Rp. 1.334.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.253.946.562.

Tahun 2022 terdapat selisih sebesar 15,50% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2022 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 10,49% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 selisih antara target dan realisasi

pajak daerah tidak terlalu besar dibandingkan dengan rata-rata selisih antara target dan realisasi pajak daerah selama tahun penelitian. Meskipun demikian secara riil pada tahun 2023 seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

Tahun 2024 terdapat selisih sebesar 7,64% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2024 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 selisih antara target dan realisasi pajak daerah tidak terlalu besar dibandingkan dengan rata-rata selisih antara target dan realisasi pajak daerah selama tahun penelitian. Meskipun demikian secara riil pada tahun 2024 seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

4.1.2.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu sebagai balas jasa atas pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Deviasi (%)
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	10,91%
2021	12.026.668.933,00	11.395.502.881,00	-5,54%
2022	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	-1,52%
2023	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	0,43%
2024	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	-6,85%
Rata-Rata Deviasi			-0,51%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo secara rata-rata tidak mencapai target retribusi daerah yaitu sebesar -0,49%. Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 10,91% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2020 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat selisih yang cukup signifikan antara

target dan realisasi anggaran pada beberapa sumber pendapatan dari retribusi daerah. Sumber pendapatan dari retribusi daerah yang tidak memenuhi target yaitu retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan target anggaran sebesar Rp. 290.000.000,00, realisasinya Rp. 270.496.000,00, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum target anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00, realisasinya Rp. 596.898.000,00, retribusi pengendalian menara telekomunikasi target anggaran sebesar Rp. 759.000.000,00, realisasinya Rp. 701.430.640,00, retribusi terminal target anggaran sebesar Rp. 64.400.000,00, realisasinya Rp. 29.155.000,00, retribusi tempat khusus parkir target anggaran sebesar Rp. 221.252.000,00, realisasinya Rp. 203.090.500,00, retribusi rumah potong hewan target anggaran sebesar Rp. 7.955.000,00, realisasinya Rp. 0,00, retribusi izin mendirikan bangunan target anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00, realisasinya Rp. 508.869.750,00, dan retribusi izin trayek target anggaran sebesar Rp. 13.809.600,00, realisasinya Rp. 8.586.000,00. Meskipun beberapa sumber pendapatan retribusi daerah ada yang tidak memenuhi target namun dapat tercover oleh pendapatan lain yang melebihi target.

Tahun 2021 terdapat selisih sebesar -5,54% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2021 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 potensi retribusi jasa usaha secara

target anggaran diprediksi sebesar Rp 5.716.026.333,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 4.841.535.469,00.

Tahun 2022 terdapat selisih sebesar -1,52% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 potensi retribusi jasa umum secara target anggaran diprediksi sebesar Rp 6.590.340.000,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 6.197.947.718,00 dan retribusi perizinan tertentu secara target anggaran diprediksi sebesar Rp 590.500.000,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 345.742.418,00.

Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 0,43% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2023 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 potensi retribusi jasa usaha secara target anggaran diprediksi sebesar 9.886.515.500,00 dan secara riil realisasinya melebihi target yaitu sebesar Rp 10.750.958.660,00.

Tahun 2024 terdapat selisih sebesar -6,85% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2024 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 potensi retribusi jasa umum secara

target anggaran diprediksi sebesar Rp 234.558.063.255,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 219.703.685.363,48 dan retribusi jasa usaha secara target anggaran diprediksi sebesar Rp 13.203.769.000,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 11.728.245.780,00.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Analisis Efisiensi

4.2.1.1 Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Yakub, dkk (2022) mendeskripsikan efisiensi sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Metode pengukuran efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi. Metode pengukuran efisiensi pajak daerah menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5-10 %	Efisien
11-20 %	Cukup Efisien
21-30 %	Kurang efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

Indikator efisiensi digambarkan dengan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan masukan sumber daya lain dengan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang perubahan masukan yang dipakai menjadi keluaran yang dihasilkan (Fajar, 2023). Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Perhitungan efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (A:B) \times 100\%$	
2020	2.327.572.502,00	90.424.462.672,61	2,57%	Sangat Efisien
2021	7.497.462.808,00	96.386.623.239,00	7,78%	Efisien
2022	7.756.817.961,00	115.414.988.961,00	6,72%	Efisien
2023	4.430.955.035,00	127.792.238.016,00	3,47%	Sangat Efisien
2024	863.897.002,00	132.624.031.337,00	0,65%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			4,24%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.5
Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.5 di atas menunjukkan efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 2,57%. Tingkat efisiensi pajak daerah tersebut kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 78.644.045.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 90.424.462.672,61 atau naik sebesar 14,98%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 7,78%. Presentase efisiensi dalam rentang 5% sampai dengan 10% termasuk dalam kriteria efisien. Artinya pemerintah daerah mampu mengelola biaya pemungutan dengan baik sehingga mampu menghasilkan penerimaan pajak daerah sesuai target yang ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 85.525.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 96.386.623.239,00 atau naik sebesar 12,70%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 6,72%. Presentase efisiensi dalam rentang 5% sampai dengan 10% termasuk dalam kriteria efisien. Artinya pemerintah daerah mampu mengelola biaya pemungutan dengan baik sehingga mampu menghasilkan penerimaan pajak daerah sesuai target yang ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 97.530.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 115.414.988.961,00 atau naik sebesar 18,34%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2023 sebesar 3,47%. Presentase efisiensi kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus

meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 114.390.583.995,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 127.792.238.016,00 atau naik sebesar 11,72%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2024 sebesar 0,65%. Presentase efisiensi kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 122.488.518.684,76 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 132.624.031.337,00 atau naik sebesar 8,27%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tergolong sangat efisien. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah tergolong dalam kriteria cukup efisien. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan usaha yang cukup optimal dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah,

sehingga realisasi pajak daerah melebihi target yang telah ditentukan.

4.2.1.2 Analisis Efisiensi Retribusi Daerah

Metode pengukuran efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi. Metode pengukuran efisiensi pajak daerah menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5-10 %	Efisien
11-20 %	Cukup Efisien
21-30 %	Kurang Efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

Perhitungan efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.7
Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (A:B) \times 100\%$	
2020	615.079.307,00	13.718.556.188,00	4,48%	Sangat Efisien
2021	505.498.478,00	11.395.502.881,00	4,44%	Sangat Efisien
2022	419.899.189,00	14.829.580.201,00	2,83%	Sangat Efisien
2023	579.062.380,00	19.283.577.842,00	3,00%	Sangat Efisien
2024	18.077.350,00	233.562.254.492,48	0,01%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			2,95%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.6
Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.7 di atas menunjukkan efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 4,48 %. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut

diakarenakan biaya pemungutan retribusi yang kecil dan penerimaan retribusi daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 12.221.209.035,50 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 13.718.556.188,00 atau naik sebesar 12,25%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar 4,44%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi pajak daerah. Meskipun tergolong dalam kriteria sangat efisien, namun biaya pemungutan belum bisa terserap secara optimal yang mengakibatkan nilai realisasi penerimaan retribusi daerah belum memenuhi target yang telah ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 12.026.668.933,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 11.395.502.881,00 atau turun sebesar 5,25%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 2,83%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi pajak daerah. Meskipun tergolong dalam kriteria sangat efisien, namun biaya pemungutan belum bisa terserap secara optimal yang mengakibatkan nilai realisasi penerimaan retribusi daerah belum memenuhi target yang telah ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 15.055.540.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 14.829.580.201,00 atau turun sebesar 1,50%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2023 sebesar 3,00%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi pajak daerah. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 19.200.010.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 19.283.577.842,00 atau naik sebesar 0,44%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2024 sebesar 0,01%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah. Meskipun tergolong dalam kriteria sangat efisien, namun biaya pemungutan belum bisa terserap secara optimal yang mengakibatkan nilai realisasi penerimaan retribusi daerah belum memenuhi target yang telah ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 249.261.832.255,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 233.562.254.492,48 atau turun sebesar 6,3%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong sangat efisien. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi retribusi daerah tergolong dalam kriteria tidak efisien.

4.2.2 Analisis Efektivitas

4.2.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Asih (2019), efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Metode pengukuran

efektivitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efektivitas. Metode pengukuran efektifitas pajak dan retribusi daerah menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Panawan, dkk, 2023). Menurut Yulastuti (2017), jika keluaran yang dihasilkan terhadap target yang ditetapkan semakin meningkat, maka proses suatu program kerja akan semakin efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila rasio efektivitas semakin meningkat maka kemampuan daerah atau program kerja yang telah ditetapkan akan semakin baik atau efektif. Perhitungan

efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	114,98%	Sangat Efektif
2021	85.525.000.000,00	96.386.623.239,00	112,70%	Sangat Efektif
2022	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	118,34%	Sangat Efektif
2023	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	111,72%	Sangat Efektif
2024	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	108,27%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			113,20%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.7
Efektifitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.9 di atas menunjukkan efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 114,98%. Presentase

efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 potensi Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran pajak restoran yaitu sebesar Rp 2.906.800.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 4.919.502.719,61 atau naik sebesar 69,24%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 11.072.750.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 19.590.640.095,00 atau naik sebesar 76,93%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 112,7%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 potensi Pajak restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran pajak restoran yaitu sebesar Rp 3.075.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 5.781.197.521,00 atau naik sebesar 69,24%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 16.500.000.000,00 tetapi secara riil

realisasinya sebesar Rp 21.292.088.924,00 atau naik sebesar 88,01%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 118,34%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 potensi Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran Pajak Restoran yaitu sebesar Rp. 5.290.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 8.578.293.831,00 atau naik sebesar 62,16%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 19.700.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 26.566.073.560,00 atau naik sebesar 34,85%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2023 sebesar 111,72%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 potensi Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran Pajak Restoran yaitu sebesar Rp.

6.660.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 9.342.850.311,00 atau naik sebesar 40,28%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 24.350.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 30.891.829.762,00 atau naik sebesar 26,87%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2024 sebesar 108,27%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yaitu sebesar Rp. 47.500.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 51.023.531.443,00 atau naik sebesar 7,42%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 23.120.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 26.150.320.822,00 atau naik sebesar 13,11%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo tergolong sangat efektif. Penelitian ini konsisten

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak dan adanya penggalan potensi sehingga menambah potensi-potensi baru. Sehingga target penerimaan pajak daerah dapat dicapai secara optimal.

4.2.2.2 Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Metode pengukuran yang digunakan dalam menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.10
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

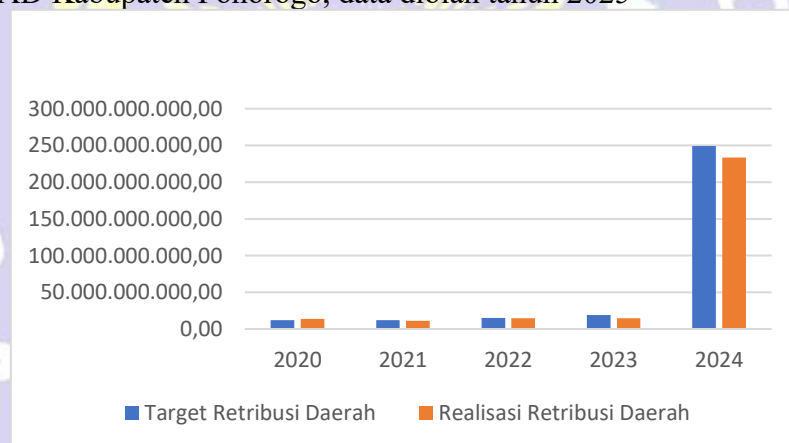
Sumber : Mahmudi (2019)

Perhitungan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	112,25%	Sangat Efektif
2021	12.026.668.933,00	11.395.502.881,00	94,75%	Efektif
2022	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	98,50%	Efektif
2023	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	100,44%	Sangat Efektif
2024	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	93,59%	Efektif
Rata-Rata Efektivitas			99,91%	Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.8
Efektifitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.11 di atas menunjukkan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 112,25%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria

sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 potensi Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp 1.872.190.800,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 2.668.990.250,00 atau naik sebesar 42,56%, sedangkan secara target anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu sebesar Rp 1.893.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 2.459.804.956,00 atau naik sebesar 29,94%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar 94,75%. Presentase efektivitas dalam rentang 90% sampai 100% termasuk dalam kriteria efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 potensi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp 5.730.498.300,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 5.962.590.490,00 atau naik sebesar 4,05%, sedangkan secara target anggaran Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar Rp 580.144.300,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar 591.376.922,00 atau naik sebesar 1,94%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 98,50%. Presentase efektifitas dalam rentang 90% sampai 100% termasuk dalam kriteria efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 potensi Retribusi Jasa Usaha banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp 7.874.700.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 8.285.890.065,00 atau naik sebesar 5,22%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2023 sebesar 100,44%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 potensi Retribusi Jasa Usaha mempengaruhi naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp 9.886.515.500,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 10.750.958.660,00 atau naik sebesar 8,74%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2024 sebesar 93,59%. Presentase efektifitas dalam rentang 90% sampai 100% termasuk dalam kriteria efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah

ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 potensi Retribusi Perizinan Tertentu banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 2.130.323.349,00 atau naik sebesar 18,35%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong efektif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Namun pada penelitian ini tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah mampu mencapai target yang telah ditentukan.

4.2.3 Analisis Kontribusi

4.2.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Rahayu (2020) kontribusi adalah iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Metode pengukuran kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Metode pengukuran yang digunakan dalam

menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4.12
Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

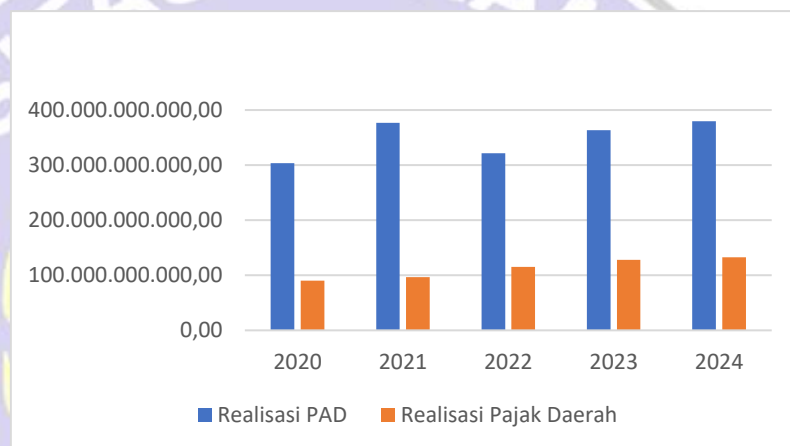
Sumber : Mahmudi (2019)

Rasio kontribusi akan menunjukkan angka sesuai dengan hasil perhitungannya. Jika angka yang ditunjukkan semakin meningkat, maka semakin besar pula kontribusi yang diperoleh. Kontribusi dapat dikatakan sangat baik jika rasionya menunjukka angka >50% (Panawan, dkk, 2023). Perhitungan kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	303.331.015.448,27	90.424.462.672,61	29,81%	Sedang
2021	376.702.757.475,31	96.386.623.239,00	25,59%	Sedang
2022	321.603.082.547,58	115.414.988.961,00	35,89%	Cukup Baik
2023	363.451.938.328,36	127.792.238.016,00	35,16%	Cukup Baik
2024	379.425.932.137,27	132.624.031.337,00	34,95%	Cukup Baik
Rata-Rata Kontribusi			32,28%	Cukup Baik

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.9
Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.13 di atas menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tahun 2020 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 29,81% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 20,10% sampai 30% termasuk dalam kriteria sedang. Artinya pajak daerah cukup berkontribusi pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 198.050.733.860,46 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 65,29%.

Tahun 2021 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 25,59% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 20,10% sampai 30% termasuk dalam kriteria sedang. Artinya pajak daerah cukup berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 267.768.127.490,71 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 71,08%.

Tahun 2022 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 35,89% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 30,10% sampai 40% termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 190.128.983.278,02 atau

mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 59,12%.

Tahun 2023 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 35,16% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 30,10% sampai 40% termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 212.863.000.679,72 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 58,57%.

Tahun 2024 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 34,95% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 30,10% sampai 40% termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain retribusi daerah yaitu sebesar Rp 233.562.254.492,48 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 61,56%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tergolong cukup baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panawan dkk (2023), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup baik. Hal tersebut dikarenakan besarnya realisasi pajak daerah cukup menyumbangkan nilai dalam jumlah yang tinggi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah namun belum optimal.

4.2.3.2 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Metode pengukuran kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Metode pengukuran yang digunakan dalam menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4.14
Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

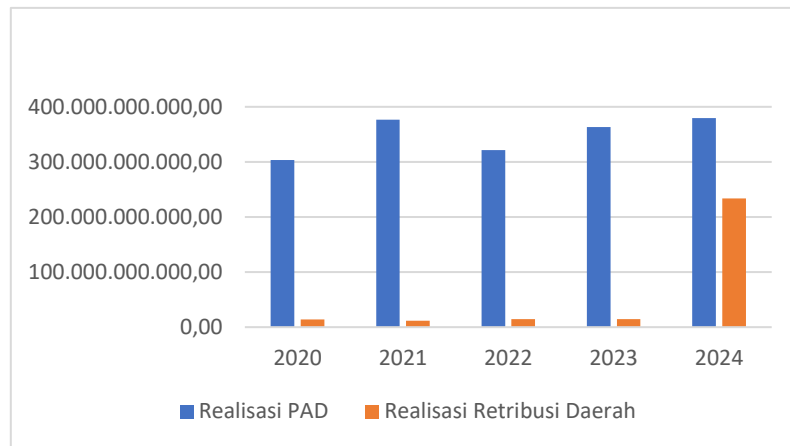
Sumber : Mahmudi (2019)

Perhitungan kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	303.331.015.448,27	13.718.556.188,00	4,52%	Sangat Kurang
2021	376.702.757.475,31	11.395.502.881,00	3,03%	Sangat Kurang
2022	321.603.082.547,58	14.829.580.201,00	4,61%	Sangat Kurang
2023	363.451.938.328,36	19.283.577.842,00	5,31%	Sangat Kurang
2024	379.425.932.137,27	233.562.254.492,48	61,56%	Sangat Baik
Rata-Rata Kontribusi			15,80%	Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.10
Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.15 di atas menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024. Tahun 2020 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 4,52% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 90.424.462.672,61 atau 29,81% dan lain-lain PAD yang sah Rp 166.391.079.217,53 atau 69,30% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2021 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 3,03% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang

00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 96.386.623.239,00 atau 25,59% dan lain-lain PAD yang sah Rp 267.768.127.490,71 atau 71,08% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2022 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 4,61% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 115.414.988.961,00 atau 35,89% dan lain-lain PAD yang sah Rp 190.128.983.278,02 atau 59,12% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2023 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 5,31% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah yaitu

sebesar Rp 127.792.238.016,00 atau 35,16% dan lain-lain PAD yang sah Rp 212.863.000.679,72 atau 58,57% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2024 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 61,56% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat baik. Artinya retribusi daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 132.624.031.337,00 atau 34,95% dan retribusi daerah yang sah Rp 233.562.254.492,48 atau 61,56% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo. Penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, sehingga kontribusinya masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD yang lain tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tergolong kurang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2021), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kurang. Hal tersebut dikarenakan

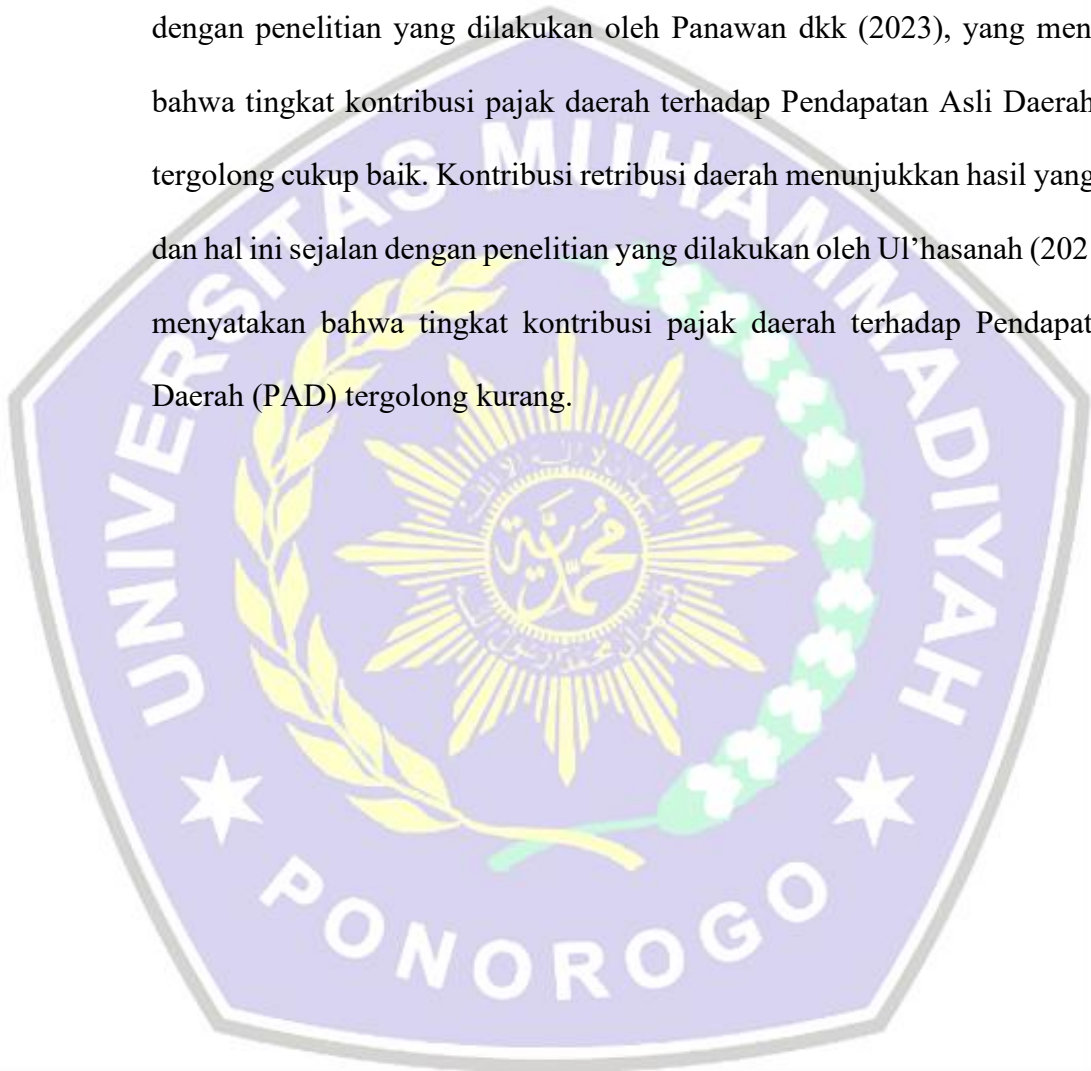
besarnya realisasi pajak daerah belum mampu menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan baik.

Tabel 4.16
Hasil Penelitian

Tahun	Efisiensi	Efektivitas	Kontribusi
Pajak Daerah			
2020	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Sedang
2021	Efisien	Sangat Efektif	Sedang
2022	Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
2023	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
2024	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
Rata-Rata	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
Retribusi Daerah			
2020	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Sangat Kurang
2021	Sangat Efisien	Efektif	Sangat Kurang
2022	Sangat Efisien	Efektif	Sangat Kurang
2023	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Sangat Kurang
2024	Sangat Efisien	Efektif	Sangat Baik
Rata-Rata	Sangat Efisien	Efektif	Kurang

Tabel diatas menunjukkan hasil penelitian yaitu efisiensi pajak daerah menunjukkan hasil yang sangat efisien, hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah tergolong dalam kriteria cukup efisien. Efisiensi retribusi daerah menunjukkan hasil sangat efektif, dimana penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi retribusi daerah tergolong dalam kriteria tidak efisien. Efektivitas pajak daerah sangat efektif, dimana hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo

tergolong dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas retribusi daerah menunjukkan hasil efektif, dimana penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak daerah menunjukkan hasil yang cukup baik dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panawan dkk (2023), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup baik. Kontribusi retribusi daerah menunjukkan hasil yang kurang dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2021), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kurang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai analisis efisiensi, efektivitas, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 4,24%. Hal ini dikarenakan pajak daerah pada tahun 2020, 2023 dan 2024 tergolong sangat efisien , sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 tergolong dalam kriteria efisien.
2. Tingkat efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efisien dengan presentase 2,95%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 tergolong sangat efisien.
3. Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 113,20%. Hal ini dikarenakan pajak daerah selama tahun penelitian tergolong sangat efektif.
4. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata tergolong efektif dengan presentase 99,91%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong dalam kriteri sangat efektif. Tahun 2021, 2022, dan 2024 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong efektif,

sedangkan pada tahun 2023 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong kurang efektif.

5. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 32,28%. Hal ini dikarenakan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dan 2021 tergolong dalam kriteria sedang. Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 sampai 2024 tergolong dalam kriteria cukup baik.
6. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria kurang dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 15,80%. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sampai 2023 tergolong dalam kriteria kurang. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tergolong dalam kriteria sangat baik.

5.2 KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Estimasi periode waktu penelitian hanya terbatas dalam 5 tahun. Sehingga kurangnya kepastian untuk melakukan estimasi periode waktu analisis pajak daerah dan retribusi daerah untuk jangka panjang.
2. Dukungan hasil analisis dalam penelitian ini hanya berdasarkan data sekunder yang diukur dengan standarisasi angka saja dan belum disesuaikan dengan realitas pemanfaatan pendapatan yang sesungguhnya. Sehingga hasil penelitian ini belum menjelaskan daya guna pemanfaatan penerimaan pendapatan daerah khususnya komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis efisiensi, efektivitas, dan analisis kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD secara global (menyeluruh). Penelitian ini belum membandingkan hasil analisisnya antar waktu. Sehingga hasil analisis dalam penelitian ini hanya menjelaskan tingkat efisiensi, efektivitas, dan tingkat kontribusi pajak dan retribusi secara global.

5.3 SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai bahan masukan dari penelitian ini yaitu:

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk berkomitmen dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi pajak daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Guna untuk meningkatkan realisasi pajak daerah agar setiap tahunnya bisa naik, sehingga tingkat

efisiensi pajak daerah bisa termasuk dalam kategori sangat efisien. Selain itu jika realisasi pajak daerah meningkat, maka tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga meningkat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi retribusi daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah jika telah menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, dan dapat mencegah kebocoran dalam pemungutan retribusi daerah. Guna untuk meningkatkan realisasi retribusi daerah agar setiap tahunnya bisa naik, sehingga tingkat efisiensi retribusi daerah bisa termasuk dalam kategori sangat efisien dan tingkat efektivitas retribusi daerah tergolong sangat efektif. Selain itu jika realisasi retribusi daerah meningkat, maka tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD juga meningkat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan fasilitas serta SDM dengan baik untuk menggali dan mendata potensi- potensi pajak daerah. Guna untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk periode yang akan datang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan perencanaan retribusi daerah yang baik. Guna untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah untuk periode yang akan datang.

5.2.2 Bagi Peneliti yang Akan Datang

1. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan melakukan analisis yang disesuaikan dengan realitas pemanfaatan pendapatan yang

sesungguhnya. Sehingga dapat diketahui daya guna pemanfaatan penerimaan pendapatan daerah khususnya komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah.

2. Bagi peneliti yang akan datang, jika melakukan penelitian yang serupa, hendaknya membandingkan temuan hasil analisis antar tahun untuk melihat pertumbuhan masing-masing variabel analisisnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A.S dan Firma Sulistyowati. (2013). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. 8 (2). Hlm. 56-64. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/10859/0> (diakses 14 April 2025).
- Adisasmita, R. (2014). Pembiayaan Pembangunan Daerah (Edisi 2). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amalia, Siti, (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. JIEP.1 (1). Hlm. 119-132. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/1121> (diakses 14 April 2025).
- Anggita, D. (2018). Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Mengotimalkan Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan. 7(6). Hlm. 677-687. <https://repository.stas.ac.id/repository/120221091355.docx> (diakses 14 April 2014)
- Anggoro, D.D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Malang. Universitas Brawijaya Press.
- Asih, P.(2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri”, Unpublished Manuscript. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/11187/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 14 April 2014)
- Fajar. I. A (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/11187/> (diakses 14 April 2014)
- Gema Surya Fm. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo Tahun 2025 Diproyeksikan Mencapai Rp450,3 Miliar. Gema Surya FM. <https://gemasuryafm.com/2024/11/02/pendapatan-asli-daerah-pad-ponorogo-tahun-2025-diproyeksikan-mencapai-rp4503-miliar/> (diakses tanggal 14 April 2025)
- Halim, A, dan Kusufi M.S. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi kedua). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta, CV Andi Offset
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Masitoh. (2018). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas). Skripsi. IAIN Purwokerto.
https://repository.uinsaiwu.ac.id/4184/2/SITI%20MASITOH_ANALISIS%20EFEISIENSI%2C%20EFEKTIVITAS%20DAN%20KONTRIBUSI%20.pdf
 (diakses 14 April 2025)
- Mentari, D., dan Rahayu, S. (2015). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. eProceedings of Management. 2(2).
<https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/101891/efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-pajak-hotel-dan-pajak-restoran-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kota-bandung-tahun-2009-2013.html> (diakses 14 April 2025)
- Moridu dan Haruni. (2018). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Jurnal EMOR. 2(2). Hlm. 167-183.
<https://lonsuit.unismuhluwu.ac.id/emor/article/download/278/229> (diakses 14 April 2025)
- Natalia, I dan Khoirunisa, K. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. JAK: Jurnal Akuntansi. 17(2). Hlm. 120-126. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/6745> (diakses 14 April 2025)
- Panawan, dkk (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Ezenza Journal. 2(2). Hlm. 141-153. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/ej/article/view/3679> (diakses 14 April 2025)
- Pangkey, I dan Pinatik, S.(2016). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. 3(4).
<https://ejournal.unsirat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581> (diakses 14 April 2025)
- Prasetyo, P. P. dan Rimawan. (2014), Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha. 22(1).
https://www.researchgate.net/publication/327885743_Analisis_Kontribusi_Pajak_Daerah_Terhadap_Pendapatan_Asli_Daerah_Kabupaten_Gunung_Kidul (diakses 14 April 2025)

- Puspitasari, E. R.,(2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(4). Hlm. 1-15 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/10198/9903> (diakses 14 April 2025)
- Rahayu, Puji, (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/12877/10/HALAMAN%20DEPAN.pdf> (diakses 14 April 2025)
- Romdani, F., dkk. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan PAD Kota Madiun. *Substansi*. 3(1), Hlm. 22-36. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/s0040> (diakses 14 April 2025)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syada, Meigista Candra Putri. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Tugas Akhir (D3) thesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/14301/> (diakses 14 April 2025)
- TribunBatam.id. (2025). APBD 2025 Juli, Madiun Surplus Rp 44,79 Miliar, PAD Rp 204,86 Miliar. <https://batam.tribunnews.com/2025/07/28/apbd-2025-juli-madiun-surplus-rp-4479-miliar-pad-rp-20486-miliar>. (diakses 7 Agustus 2025).
- Ubaidah, Fatimah Nur. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/3973/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf> (diakses 14 April 2025)
- Ul'hasanah, A. (2021). Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/6994/> (diakses 14 April 2025)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Wenur. dkk. (2018). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(4). Hlm. 474-481.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21285> (diakses 14 April 2025)

Yakub. dkk. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. 19(1). Hlm. 15-28.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website: www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 391/IV.4/PN/2025
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 06 Mei 2025

Kepada :

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo
Jl. Alun Alun Utara No. 03 Gedung Sasana Praja Lt 2, Ponorogo, Jawa Timur.

Assalaamuallaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANING KRISTIYANA, SE, MM
NIK : 19750921 201503 13
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Bagas Mahardika Putra
NIM : 21441846
Semester : VIII
Jurusan : S1 Akuntansi
No. HP : 081770253234
Lokasi/Objek : BPPKAD PONOROGO
Lama Penelitian : 3 BULAN
Bidang : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus
Pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024)

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalaamuallaikum wr. wb.



NANING KRISTIYANA, SE, MM
NIK. 19750921 201503 13

LAMPIRAN 2

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Daerah Tahun 2020-2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	2.219.528.721.164,52	0,00	2.251.782.234.203,27	2.251.782.234.203,27	32.253.513.038,75
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	266.465.788.651,52	0,00	303.331.015.448,27	303.331.015.448,27	36.865.226.796,75
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	78.644.045.000,00	0,00	90.424.462.672,61	90.424.462.672,61	11.780.417.672,61
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA	449.125.000,00	0,00	762.134.260,00	762.134.260,00	313.009.260,00
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LRA	415.625.000,00	0,00	718.061.760,00	718.061.760,00	302.436.760,00
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LRA	33.500.000,00	0,00	44.072.500,00	44.072.500,00	10.572.500,00
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA	2.906.800.000,00	0,00	4.919.502.719,61	4.919.502.719,61	2.012.702.719,61
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LRA	525.000.000,00	0,00	771.465.770,00	771.465.770,00	246.465.770,00
4 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LRA	25.000.000,00	0,00	39.692.600,00	39.692.600,00	14.692.600,00
4 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LRA	2.356.800.000,00	0,00	4.108.344.349,61	4.108.344.349,61	1.751.544.349,61
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA	485.000.000,00	0,00	517.578.080,00	517.578.080,00	32.578.080,00
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LRA	295.000.000,00	0,00	295.420.002,00	295.420.002,00	420.002,00
4 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA	110.000.000,00	0,00	117.142.909,00	117.142.909,00	7.142.909,00
4 . 1 . 1 . 08 . 14	Insidentil - LRA	80.000.000,00	0,00	105.015.169,00	105.015.169,00	25.015.169,00
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LRA	1.194.300.000,00	0,00	1.237.755.753,00	1.237.755.753,00	43.455.753,00
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.042.800.000,00	0,00	1.052.186.904,00	1.052.186.904,00	9.386.904,00
4 . 1 . 1 . 09 . 02	Reklame Kain - LRA	151.500.000,00	0,00	185.568.849,00	185.568.849,00	34.068.849,00
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	25.802.000.000,00	0,00	26.357.004.635,00	26.357.004.635,00	555.004.635,00
4 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	25.802.000.000,00	0,00	26.357.004.635,00	26.357.004.635,00	555.004.635,00
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA	182.800.000,00	0,00	175.440.600,00	175.440.600,00	-7.359.400,00
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LRA	182.800.000,00	0,00	175.440.600,00	175.440.600,00	-7.359.400,00
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA	149.270.000,00	0,00	172.394.403,00	172.394.403,00	23.124.403,00
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LRA	149.270.000,00	0,00	172.394.403,00	172.394.403,00	23.124.403,00
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	382.000.000,00	0,00	550.195.360,00	550.195.360,00	168.195.360,00
4 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LRA	382.000.000,00	0,00	550.195.360,00	550.195.360,00	168.195.360,00
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	36.020.000.000,00	0,00	36.141.816.767,00	36.141.816.767,00	121.816.767,00
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	36.020.000.000,00	0,00	36.141.816.767,00	36.141.816.767,00	121.816.767,00
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	11.072.750.000,00	0,00	19.590.640.095,00	19.590.640.095,00	8.517.890.095,00
4 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	11.072.750.000,00	0,00	19.590.640.095,00	19.590.640.095,00	8.517.890.095,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	12.221.209.035,50	0,00	13.718.556.188,00	13.718.556.188,00	1.497.347.152,50
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	85.000.000,00	0,00	146.208.500,00	146.208.500,00	61.208.500,00
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang	85.000.000,00	0,00	146.208.500,00	146.208.500,00	61.208.500,00

	Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA					
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	290.000.000,00	0,00	270.496.000,00	270.496.000,00	-19.504.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	290.000.000,00	0,00	270.496.000,00	270.496.000,00	-19.504.000,00
4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	3.031.875,00	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	2.953.125,00
4 . 1 . 2 . 04 . 02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA	3.031.875,00	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	2.953.125,00
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	725.000.000,00	0,00	596.898.000,00	596.898.000,00	-128.102.000,00
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	725.000.000,00	0,00	596.898.000,00	596.898.000,00	-128.102.000,00
4 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.872.190.800,00	0,00	2.668.990.250,00	2.668.990.250,00	796.799.450,00
4 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	521.301.000,00	0,00	818.348.100,00	818.348.100,00	297.047.100,00
4 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	823.300.000,00	0,00	1.203.389.075,00	1.203.389.075,00	380.089.075,00
4 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	527.589.800,00	0,00	647.253.075,00	647.253.075,00	119.663.275,00
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.534.588.050,00	0,00	1.890.001.800,00	1.890.001.800,00	355.413.750,00
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	4.196.550,00	0,00	6.044.000,00	6.044.000,00	1.847.450,00
4 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	37.038.170,00	0,00	73.545.700,00	73.545.700,00	36.507.530,00
4 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	10.168.830,00	0,00	32.259.800,00	32.259.800,00	22.090.970,00
4 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	903.197.500,00	0,00	1.262.313.800,00	1.262.313.800,00	359.116.300,00
4 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	572.450.000,00	0,00	502.489.600,00	502.489.600,00	-69.960.400,00
4 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	7.537.000,00	0,00	13.348.900,00	13.348.900,00	5.811.900,00
4 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	4.400.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100.000,00
4 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	4.400.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100.000,00
4 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	54.100.000,00	0,00	54.612.000,00	54.612.000,00	512.000,00
4 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	54.100.000,00	0,00	54.612.000,00	54.612.000,00	512.000,00
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	750.000.000,00	0,00	701.430.640,00	701.430.640,00	-48.569.360,00
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	750.000.000,00	0,00	701.430.640,00	701.430.640,00	-48.569.360,00
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	3.812.469.486,00	0,00	4.033.874.792,00	4.033.874.792,00	221.405.306,00
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	3.765.969.486,00	0,00	3.988.837.292,00	3.988.837.292,00	222.867.806,00
4 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LRA	32.000.000,00	0,00	32.327.500,00	32.327.500,00	327.500,00
4 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
4 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LRA	12.500.000,00	0,00	12.710.000,00	12.710.000,00	210.000,00
4 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	7.500.000,00	0,00	11.123.000,00	11.123.000,00	3.623.000,00
4 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang -	7.500.000,00	0,00	11.123.000,00	11.123.000,00	3.623.000,00
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	64.400.000,00	0,00	29.155.000,00	29.155.000,00	-35.245.000,00
4 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	64.400.000,00	0,00	29.155.000,00	29.155.000,00	-35.245.000,00
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	221.252.000,00	0,00	203.090.500,00	203.090.500,00	-18.161.500,00
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	221.252.000,00	0,00	203.090.500,00	203.090.500,00	-18.161.500,00
4 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	7.955.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.955.000,00
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	7.955.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.955.000,00
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	1.893.000.000,00	0,00	2.459.804.956,00	2.459.804.956,00	566.804.956,00

4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	42.500.000,00	0,00	33.667.000,00	33.667.000,00	-8.833.000,00
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA	1.800.000.000,00	0,00	2.369.440.456,00	2.369.440.456,00	569.440.456,00
4 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA	50.500.000,00	0,00	56.697.500,00	56.697.500,00	6.197.500,00
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	82.512.224,50	0,00	123.280.000,00	123.280.000,00	40.767.775,50
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA	82.512.224,50	0,00	123.280.000,00	123.280.000,00	40.767.775,50
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	800.000.000,00	0,00	508.869.750,00	508.869.750,00	-291.130.250,00
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	800.000.000,00	0,00	508.869.750,00	508.869.750,00	-291.130.250,00
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	13.809.600,00	0,00	8.586.000,00	8.586.000,00	-5.223.600,00
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	13.809.600,00	0,00	8.586.000,00	8.586.000,00	-5.223.600,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.041.966.000,00	0,00	1.137.262.727,20	1.137.262.727,20	95.296.727,20
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	1.041.966.000,00	0,00	1.137.262.727,20	1.137.262.727,20	95.296.727,20
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD BPR Jatim - LRA	3.164.000,00	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00	-1.281.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim - LRA	1.038.802.000,00	0,00	1.135.379.727,20	1.135.379.727,20	96.577.727,20
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	174.558.568.616,02	0,00	198.050.733.860,46	198.050.733.860,46	23.492.165.244,44
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	160.000.000,00	0,00	245.489.300,00	245.489.300,00	85.489.300,00
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	75.000.000,00	0,00	163.176.000,00	163.176.000,00	88.176.000,00
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	85.000.000,00	0,00	82.313.300,00	82.313.300,00	-2.686.700,00
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.500.000.000,00	0,00	1.509.418.699,95	1.509.418.699,95	9.418.699,95
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	1.500.000.000,00	0,00	1.509.418.699,95	1.509.418.699,95	9.418.699,95
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	3.500.000.000,00	0,00	4.529.886.940,36	4.529.886.940,36	1.029.886.940,36
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Jatim - LRA	2.300.000.000,00	0,00	3.224.280.821,60	3.224.280.821,60	924.280.821,60
4 . 1 . 4 . 04 . 03	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BNI - LRA	350.000.000,00	0,00	358.700.116,00	358.700.116,00	8.700.116,00
4 . 1 . 4 . 04 . 04	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BRI - LRA	600.000.000,00	0,00	666.835.460,00	666.835.460,00	66.835.460,00
4 . 1 . 4 . 04 . 05	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Mandiri - LRA	250.000.000,00	0,00	280.070.542,76	280.070.542,76	30.070.542,76
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
4 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian Dana Bergulir - LRA	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
4 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LRA	119.830.010.000,00	0,00	145.686.831.648,18	145.686.831.648,18	25.856.821.648,18
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	117.343.075.000,00	0,00	142.918.311.212,00	142.918.311.212,00	25.575.236.212,00
4 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA	168.085.000,00	0,00	567.646.000,00	567.646.000,00	399.561.000,00
4 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	2.318.850.000,00	0,00	2.200.874.436,18	2.200.874.436,18	-117.975.563,82
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	3.500.000.000,00	0,00	1.167.352.359,61	1.167.352.359,61	-2.332.647.640,39
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	3.500.000.000,00	0,00	1.167.352.359,61	1.167.352.359,61	-2.332.647.640,39
4 . 1 . 4 . 25	Pendapatan BLUD pada Puskesmas - LRA	46.068.558.616,02	0,00	44.892.254.912,36	44.892.254.912,36	-1.176.303.703,66
4 . 1 . 4 . 25 . 01	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ponorogo Utara - LRA	1.400.983.374,72	0,00	1.540.445.865,26	1.540.445.865,26	139.462.490,54
4 . 1 . 4 . 25 . 02	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ponorogo Selatan - LRA	1.224.311.520,50	0,00	1.297.225.913,83	1.297.225.913,83	72.914.393,33
4 . 1 . 4 . 25 . 03	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Siman - LRA	818.813.236,25	0,00	803.933.403,04	803.933.403,04	-14.879.833,21
4 . 1 . 4 . 25 . 04	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ronowijayan - LRA	604.822.030,15	0,00	753.936.687,71	753.936.687,71	149.114.657,56
4 . 1 . 4 . 25 . 05	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Jenangan - LRA	2.318.158.364,07	0,00	1.996.279.880,83	1.996.279.880,83	-321.878.483,24
4 . 1 . 4 . 25 . 06	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Setono - LRA	657.796.850,00	0,00	697.797.875,94	697.797.875,94	40.001.025,94
4 . 1 . 4 . 25 . 07	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Babadan - LRA	1.225.949.278,94	0,00	1.250.751.869,04	1.250.751.869,04	24.802.590,10
4 . 1 . 4 . 25 . 08	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sukosari - LRA	655.523.887,68	0,00	676.986.489,62	676.986.489,62	21.462.601,94
4 . 1 . 4 . 25 . 09	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sukorejo - LRA	1.666.892.666,54	0,00	1.853.200.864,16	1.853.200.864,16	186.308.197,62

4 . 1 . 4 . 25 . 10	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Kauman - LRA	2.423.982.362,00	0,00	2.222.115.695,21	2.222.115.695,21	-201.866.666,79
4 . 1 . 4 . 25 . 11	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ngrandu - LRA	981.738.489,00	0,00	828.732.846,36	828.732.846,36	-153.005.642,64
4 . 1 . 4 . 25 . 12	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Badegan - LRA	2.112.692.979,00	0,00	2.123.831.117,47	2.123.831.117,47	11.138.138,47
4 . 1 . 4 . 25 . 13	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Jambon - LRA	2.350.548.877,73	0,00	2.283.818.193,48	2.283.818.193,48	-66.730.684,25
4 . 1 . 4 . 25 . 14	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sampung - LRA	883.932.422,54	0,00	902.182.792,69	902.182.792,69	18.250.370,15
4 . 1 . 4 . 25 . 15	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Kunti - LRA	455.778.510,91	0,00	472.098.306,98	472.098.306,98	16.319.796,07
4 . 1 . 4 . 25 . 16	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Balong - LRA	2.928.574.501,28	0,00	2.704.201.801,63	2.704.201.801,63	-224.372.699,65
4 . 1 . 4 . 25 . 17	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Slahung - LRA	1.839.554.105,70	0,00	1.792.138.460,07	1.792.138.460,07	-47.415.645,63
4 . 1 . 4 . 25 . 18	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Nailan - LRA	1.275.047.035,00	0,00	1.160.074.464,09	1.160.074.464,09	-114.972.570,91
4 . 1 . 4 . 25 . 19	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bungkal - LRA	1.878.639.182,98	0,00	1.838.957.927,02	1.838.957.927,02	-39.681.255,96
4 . 1 . 4 . 25 . 20	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ngrayun - LRA	4.176.384.268,42	0,00	3.894.235.003,76	3.894.235.003,76	-282.149.264,66
4 . 1 . 4 . 25 . 21	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sambit - LRA	1.382.990.363,00	0,00	1.295.771.681,53	1.295.771.681,53	-87.218.681,47
4 . 1 . 4 . 25 . 22	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Wringinanom - LRA	818.126.632,28	0,00	878.982.990,68	878.982.990,68	60.856.358,40
4 . 1 . 4 . 25 . 23	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sawoo - LRA	3.043.681.796,00	0,00	2.908.863.520,56	2.908.863.520,56	-134.818.275,44
4 . 1 . 4 . 25 . 24	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bondrang - LRA	328.665.613,08	0,00	338.398.858,60	338.398.858,60	9.733.245,52
4 . 1 . 4 . 25 . 25	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Mlarak - LRA	1.440.427.174,40	0,00	1.439.374.582,95	1.439.374.582,95	-1.052.591,45
4 . 1 . 4 . 25 . 26	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Jetis - LRA	1.874.661.585,84	0,00	1.838.282.937,75	1.838.282.937,75	-36.378.648,09
4 . 1 . 4 . 25 . 27	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pulung - LRA	2.005.864.626,36	0,00	1.866.719.818,99	1.866.719.818,99	-139.144.807,37
4 . 1 . 4 . 25 . 28	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Kesugihan - LRA	554.759.189,00	0,00	565.722.596,82	565.722.596,82	10.963.407,82
4 . 1 . 4 . 25 . 29	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sooko - LRA	964.011.621,15	0,00	946.508.076,06	946.508.076,06	-17.503.545,09
4 . 1 . 4 . 25 . 30	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ngebel - LRA	1.236.839.201,50	0,00	1.180.651.972,04	1.180.651.972,04	-56.187.229,46
4 . 1 . 4 . 25 . 31	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pudak - LRA	538.406.870,00	0,00	540.032.418,19	540.032.418,19	1.625.548,19
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.881.604.532.513,00	0,00	1.869.970.058.755,00	1.869.970.058.755,00	-11.634.473.758,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.405.997.276.125,00	0,00	1.404.938.766.056,00	1.404.938.766.056,00	-1.058.510.069,00
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	51.129.231.176,00	0,00	48.486.593.689,00	48.486.593.689,00	-2.642.637.487,00
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	10.193.839.239,00	0,00	8.686.235.851,00	8.686.235.851,00	-1.507.603.388,00
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	21.600.621.937,00	0,00	21.546.079.247,00	21.546.079.247,00	-54.542.690,00
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	19.334.770.000,00	0,00	18.254.278.591,00	18.254.278.591,00	-1.080.491.409,00
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	33.476.326.949,00	0,00	45.515.788.591,00	45.515.788.591,00	12.039.461.642,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	755.258.950,00	0,00	436.171.177,00	436.171.177,00	-319.087.773,00
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	724.209.045,00	0,00	857.085.532,00	857.085.532,00	132.876.487,00
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.588.988.903,00	0,00	788.276.289,00	788.276.289,00	-800.712.614,00
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	28.155.904.397,00	0,00	37.803.687.552,00	37.803.687.552,00	9.647.783.155,00
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	1.908.901.980,00	0,00	5.382.490.341,00	5.382.490.341,00	3.473.588.361,00
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	343.063.674,00	0,00	248.077.700,00	248.077.700,00	-94.985.974,00
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.001.863.677.000,00	0,00	992.269.673.000,00	992.269.673.000,00	-9.594.004.000,00
4 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LRA	983.169.673.000,00	0,00	983.169.673.000,00	983.169.673.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 03 . 02	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	18.694.004.000,00	0,00	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00	-9.594.004.000,00
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler - LRA	51.576.844.000,00	0,00	47.080.589.438,00	47.080.589.438,00	-4.496.254.562,00
4 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	413.647.000,00	0,00	317.047.000,00	317.047.000,00	-96.600.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	1.767.000.000,00	0,00	1.767.000.000,00	1.767.000.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana - LRA	25.668.424.000,00	0,00	21.869.810.788,00	21.869.810.788,00	-3.798.613.212,00
4 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LRA	23.727.773.000,00	0,00	23.126.731.650,00	23.126.731.650,00	-601.041.350,00
4 . 2 . 1 . 05	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Penugasan - LRA	20.259.582.000,00	0,00	17.294.097.755,00	17.294.097.755,00	-2.965.484.245,00

4 . 2 . 1 . 05 . 01	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum - LRA	862.147.000,00	0,00	671.702.000,00	671.702.000,00	-190.445.000,00
4 . 2 . 1 . 05 . 02	DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 1 . 05 . 03	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah) - LRA	9.720.629.000,00	0,00	7.565.936.000,00	7.565.936.000,00	-2.154.693.000,00
4 . 2 . 1 . 05 . 05	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana-	7.819.520.000,00	0,00	7.345.599.255,00	7.345.599.255,00	-473.920.745,00
4 . 2 . 1 . 05 . 06	DAK Penugasan Bidang Sanitasi-LRA	387.500.000,00	0,00	317.000.000,00	317.000.000,00	-70.500.000,00
4 . 2 . 1 . 05 . 09	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	43.835.000,00	0,00	41.435.500,00	41.435.500,00	-2.399.500,00
4 . 2 . 1 . 05 . 10	DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian - LO	1.425.951.000,00	0,00	1.352.425.000,00	1.352.425.000,00	-73.526.000,00
4 . 2 . 1 . 06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	247.691.615.000,00	0,00	254.292.023.583,00	254.292.023.583,00	6.600.408.583,00
4 . 2 . 1 . 06 . 01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	13.135.800.000,00	0,00	13.091.864.953,00	13.091.864.953,00	-43.935.047,00
4 . 2 . 1 . 06 . 02	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru - LRA	191.061.665.000,00	0,00	191.061.665.000,00	191.061.665.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 06 . 03	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru - LRA	0,00	0,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00
4 . 2 . 1 . 06 . 04	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	32.817.668.000,00	0,00	40.095.873.174,00	40.095.873.174,00	7.278.205.174,00
4 . 2 . 1 . 06 . 06	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	3.055.080.000,00	0,00	2.993.857.749,00	2.993.857.749,00	-61.222.251,00
4 . 2 . 1 . 06 . 07	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB - LRA	6.195.292.000,00	0,00	5.680.601.007,00	5.680.601.007,00	-514.690.993,00
4 . 2 . 1 . 06 . 08	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	935.100.000,00	0,00	860.961.200,00	860.961.200,00	-74.138.800,00
4 . 2 . 1 . 06 . 09	DAK Non Fisik Bantuan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	491.010.000,00	0,00	489.550.500,00	489.550.500,00	-1.459.500,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	316.566.360.000,00	0,00	316.566.360.000,00	316.566.360.000,00	0,00
4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA	316.566.360.000,00	0,00	316.566.360.000,00	316.566.360.000,00	0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LRA	62.247.092.000,00	0,00	62.247.092.000,00	62.247.092.000,00	0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Alokasi Dana Desa - LRA	254.319.268.000,00	0,00	254.319.268.000,00	254.319.268.000,00	0,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	128.908.380.888,00	0,00	118.332.417.199,00	118.332.417.199,00	-10.575.963.689,00
4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	128.908.380.888,00	0,00	118.332.417.199,00	118.332.417.199,00	-10.575.963.689,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	128.908.380.888,00	0,00	118.332.417.199,00	118.332.417.199,00	-10.575.963.689,00
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	30.132.515.500,00	0,00	30.132.515.500,00	30.132.515.500,00	0,00
4 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya -	30.132.515.500,00	0,00	30.132.515.500,00	30.132.515.500,00	0,00
4 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi -	30.132.515.500,00	0,00	30.132.515.500,00	30.132.515.500,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	71.458.400.000,00	0,00	78.481.160.000,00	78.481.160.000,00	7.022.760.000,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	71.458.400.000,00	0,00	78.331.160.000,00	78.331.160.000,00	6.872.760.000,00
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4 . 3 . 1 . 06	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	68.458.400.000,00	0,00	75.331.160.000,00	75.331.160.000,00	6.872.760.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SMP Negeri - LRA	22.051.700.000,00	0,00	22.471.310.000,00	22.471.310.000,00	419.610.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 02	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Babadan - LRA	2.302.200.000,00	0,00	2.271.150.000,00	2.271.150.000,00	-31.050.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 03	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Badegan - LRA	1.836.900.000,00	0,00	1.882.050.000,00	1.882.050.000,00	45.150.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 04	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Balong - LRA	2.259.000.000,00	0,00	2.481.720.000,00	2.481.720.000,00	222.720.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 05	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Bungkal - LRA	1.779.300.000,00	0,00	1.942.830.000,00	1.942.830.000,00	163.530.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 06	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Jambon - LRA	2.056.500.000,00	0,00	2.135.190.000,00	2.135.190.000,00	78.690.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 07	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. -	2.439.000.000,00	0,00	2.646.330.000,00	2.646.330.000,00	207.330.000,00

4 . 3 . 1 . 06 . 08	Jenangan - LRA Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Jetis - LRA	1.466.100.000,00	0,00	1.489.650.000,00	1.489.650.000,00	23.550.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 09	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Kauman - LRA	2.503.800.000,00	0,00	2.478.690.000,00	2.478.690.000,00	-25.110.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 10	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Mlarak - LRA	1.546.200.000,00	0,00	1.948.110.000,00	1.948.110.000,00	401.910.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 11	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Ngebel - LRA	1.458.000.000,00	0,00	2.169.090.000,00	2.169.090.000,00	711.090.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 12	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Ngrayun - LRA	3.896.100.000,00	0,00	5.667.420.000,00	5.667.420.000,00	1.771.320.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 13	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Ponorogo - LRA	4.097.700.000,00	0,00	4.068.270.000,00	4.068.270.000,00	-29.430.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 14	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Puduk - LRA	540.000.000,00	0,00	596.490.000,00	596.490.000,00	56.490.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 15	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Pulung - LRA	2.698.200.000,00	0,00	3.357.120.000,00	3.357.120.000,00	658.920.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 16	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Sambit - LRA	1.800.900.000,00	0,00	1.962.540.000,00	1.962.540.000,00	161.640.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 17	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Sampung - LRA	2.219.400.000,00	0,00	2.450.760.000,00	2.450.760.000,00	231.360.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 18	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Sawoo - LRA	3.544.200.000,00	0,00	4.067.460.000,00	4.067.460.000,00	523.260.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 19	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Siman - LRA	1.513.800.000,00	0,00	1.489.230.000,00	1.489.230.000,00	-24.570.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 20	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Slahung - LRA	2.471.400.000,00	0,00	3.277.380.000,00	3.277.380.000,00	805.980.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 21	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Sooko - LRA	1.323.000.000,00	0,00	1.855.170.000,00	1.855.170.000,00	532.170.000,00
4 . 3 . 1 . 06 . 22	Hibah Dana Bos Satuan Pendidikan SD Negeri se Kec. Sukorejo - LRA	2.655.000.000,00	0,00	2.623.200.000,00	2.623.200.000,00	-31.800.000,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5	BELANJA	2.033.209.954.207,98	0,00	1.805.943.959.684,01	1.805.943.959.684,01	-227.265.994.523,97
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.542.915.230.337,55	0,00	1.497.696.263.426,42	1.497.696.263.426,42	-45.218.966.911,13
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	905.915.436.266,80	0,00	892.778.401.222,50	892.778.401.222,50	-13.137.035.044,30
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	827.719.351.613,80	0,00	814.817.123.619,00	814.817.123.619,00	-12.902.227.994,80
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	486.514.411.570,84	0,00	473.655.145.366,00	473.655.145.366,00	-12.859.266.204,84
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	42.770.302.000,00	0,00	42.455.924.289,00	42.455.924.289,00	-314.377.711,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	9.038.540.000,00	0,00	8.955.236.000,00	8.955.236.000,00	-83.304.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	32.333.685.000,00	0,00	32.132.868.000,00	32.132.868.000,00	-200.817.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	6.068.198.000,00	0,00	6.011.591.000,00	6.011.591.000,00	-56.607.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	20.674.994.000,00	0,00	20.530.128.540,00	20.530.128.540,00	-144.865.460,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.338.869.000,00	0,00	2.326.761.625,00	2.326.761.625,00	-12.107.375,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	6.300.900,00	0,00	6.096.318,00	6.096.318,00	-204.582,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	24.804.452.142,96	0,00	24.153.826.498,00	24.153.826.498,00	-650.625.644,96
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Belanja Uang Paket	78.886.500,00	0,00	86.058.000,00	86.058.000,00	7.171.500,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	17.695.500,00	0,00	3.654.000,00	3.654.000,00	-14.041.500,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Belanja Tunjangan Komisi	33.984.000,00	0,00	33.982.200,00	33.982.200,00	-1.800,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	16.798.000,00	0,00	14.433.300,00	14.433.300,00	-2.364.700,00

5 . 1 . 1 . 01 . 14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	11.437.000,00	0,00	6.759.903,00	6.759.903,00	-4.677.097,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	14.163.000,00	0,00	10.048.500,00	10.048.500,00	-4.114.500,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Belanja Tunjangan Perumahan	4.148.900.000,00	0,00	4.011.300.000,00	4.011.300.000,00	-137.600.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.400.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	0,00	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	762.850.000,00	0,00	780.500.000,00	780.500.000,00	17.650.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Profesi Guru PNSD	191.061.665.000,00	0,00	193.428.490.080,00	193.428.490.080,00	2.366.825.080,00
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Transportasi	4.600.200.000,00	0,00	3.895.500.000,00	3.895.500.000,00	-704.700.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Reses	1.984.500.000,00	0,00	1.925.700.000,00	1.925.700.000,00	-58.800.000,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	60.250.000.000,00	0,00	60.201.643.865,00	60.201.643.865,00	-48.356.135,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.250.000.000,00	0,00	60.201.643.865,00	60.201.643.865,00	-48.356.135,00
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.538.000.000,00	0,00	8.508.000.000,00	8.508.000.000,00	-30.000.000,00
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	0,00	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	-30.000.000,00
5 . 1 . 1 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	5.795.462.816,31	0,00	5.741.648.929,50	5.741.648.929,50	-53.813.886,81
5 . 1 . 1 . 04 . 05	Belanja Biaya Pemungutan PBB	5.795.462.816,31	0,00	5.741.648.929,50	5.741.648.929,50	-53.813.886,81
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.369.184.183,69	0,00	2.327.572.502,00	2.327.572.502,00	-41.611.681,69
5 . 1 . 1 . 05 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel -	48.266.938,01	0,00	44.839.229,50	44.839.229,50	-3.427.708,51
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	192.343.630,87	0,00	177.440.157,50	177.440.157,50	-14.903.473,37
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	63.836.978,56	0,00	52.768.250,00	52.768.250,00	-11.068.728,56
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	65.914.062,50	0,00	61.914.025,00	61.914.025,00	-4.000.037,50
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	1.360.134.887,50	0,00	1.358.419.194,00	1.358.419.194,00	-1.715.693,50
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir -	12.623.037,50	0,00	12.622.125,00	12.622.125,00	-912,50
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	7.016.820,30	0,00	7.016.520,00	7.016.520,00	-300,30
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	32.587.912,50	0,00	26.785.000,00	26.785.000,00	-5.802.912,50
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	586.459.915,95	0,00	585.768.001,00	585.768.001,00	-691.914,95
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	665.000.000,00	0,00	615.079.307,00	615.079.307,00	-49.920.693,00
5 . 1 . 1 . 06 . 33	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Lainnya	665.000.000,00	0,00	615.079.307,00	615.079.307,00	-49.920.693,00
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	578.437.653,00	0,00	567.333.000,00	567.333.000,00	-11.104.653,00
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	469.256.000,00	0,00	462.556.000,00	462.556.000,00	-6.700.000,00
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS	109.181.653,00	0,00	104.777.000,00	104.777.000,00	-4.404.653,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	497.318.944.070,79	0,00	478.886.412.473,16	478.886.412.473,16	-18.432.531.597,63
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.340.570.664,81	0,00	22.005.365.188,00	22.005.365.188,00	-1.335.205.476,81
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.965.368.418,30	0,00	6.679.024.430,00	6.679.024.430,00	-286.343.988,30
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery	794.550.880,00	0,00	746.742.615,00	746.742.615,00	-47.808.265,00
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	482.473.687,20	0,00	434.848.022,00	434.848.022,00	-47.625.665,20
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.607.930.326,74	0,00	1.563.436.370,00	1.563.436.370,00	-44.493.956,74
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.765.649.022,54	0,00	1.463.338.267,00	1.463.338.267,00	-302.310.755,54

5 . 1 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.061.900,00	0,00	9.645.100,00	9.645.100,00	-2.416.800,00
5 . 1 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.411.600,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	-1.921.600,00
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Belanja perlengkapan pertukangan	159.365.300,00	0,00	133.917.000,00	133.917.000,00	-25.448.300,00
5 . 1 . 2 . 01 . 10	Belanja pakai habis kedokteran/perwatan kesehatan/laboratorium	10.209.939.139,03	0,00	9.814.394.735,00	9.814.394.735,00	-395.544.404,03
5 . 1 . 2 . 01 . 11	Belanja pakai habis bahan makanan	446.946.500,00	0,00	423.829.900,00	423.829.900,00	-23.116.600,00
5 . 1 . 2 . 01 . 12	Belanja perlengkapan kantor (papan nama, penunjuk arah/jalan, papan data, dll)	235.801.275,00	0,00	156.851.749,00	156.851.749,00	-78.949.526,00
5 . 1 . 2 . 01 . 13	Belanja pakai habis alat peraga	656.072.616,00	0,00	576.847.000,00	576.847.000,00	-79.225.616,00
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.858.872.002,25	0,00	43.168.356.127,00	43.168.356.127,00	-690.515.875,25
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.506.979.917,50	0,00	6.453.625.515,00	6.453.625.515,00	-53.354.402,50
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	618.388.650,00	0,00	609.368.500,00	609.368.500,00	-9.020.150,00
5 . 1 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	161.200.000,00	0,00	159.800.000,00	159.800.000,00	-1.400.000,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan obat-obatan	5.031.779.484,75	0,00	4.674.782.931,00	4.674.782.931,00	-356.996.553,75
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	208.213.470,00	0,00	200.193.800,00	200.193.800,00	-8.019.670,00
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	15.322.000,00	0,00	15.202.250,00	15.202.250,00	-119.750,00
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan laboratorium sekolah/kedokteran/kesehatan	425.384.000,00	0,00	401.613.851,00	401.613.851,00	-23.770.149,00
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja bahan percontohan/peraga/praktek sekolah/Diklat/Bintek	296.202.900,00	0,00	287.604.200,00	287.604.200,00	-8.598.700,00
5 . 1 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk Organik	29.754.542.180,00	0,00	29.548.853.200,00	29.548.853.200,00	-205.688.980,00
5 . 1 . 2 . 02 . 10	Belanja Pupuk An Organik	9.297.800,00	0,00	9.297.800,00	9.297.800,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 11	Belanja Hewan/Ternak	640.974.200,00	0,00	620.600.000,00	620.600.000,00	-20.374.200,00
5 . 1 . 2 . 02 . 12	Belanja perlengkapan kantor (papan nama, penunjuk arah/jalan, papan data, dll)	190.587.400,00	0,00	187.414.080,00	187.414.080,00	-3.173.320,00
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.478.562.053,46	0,00	55.520.390.317,00	55.520.390.317,00	-6.958.171.736,46
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.175.557.427,53	0,00	1.051.220.436,00	1.051.220.436,00	-124.336.991,53
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	116.442.286,62	0,00	92.909.001,00	92.909.001,00	-23.533.285,62
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.802.555.722,00	0,00	14.282.993.541,00	14.282.993.541,00	-519.562.181,00
5 . 1 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	18.000.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-9.200.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	334.286.620,00	0,00	310.117.130,00	310.117.130,00	-24.169.490,00
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.636.418.323,00	0,00	1.613.363.699,00	1.613.363.699,00	-23.054.624,00
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	21.076.100,00	0,00	13.023.800,00	13.023.800,00	-8.052.300,00
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	112.199.215,00	0,00	97.202.580,00	97.202.580,00	-14.996.635,00
5 . 1 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	-169.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi/dokumentasi dan dekorasi	3.608.369.959,00	0,00	3.403.780.650,00	3.403.780.650,00	-204.589.309,00
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga	1.200.132.882,57	0,00	1.131.985.452,00	1.131.985.452,00	-68.147.430,57
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa pengujian laboratorium/kesehatan	411.454.766,46	0,00	260.895.000,00	260.895.000,00	-150.559.766,46
5 . 1 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa medik dan anastesi	230.000.000,00	0,00	229.712.047,00	229.712.047,00	-287.953,00
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeriksaan alat kesehatan dan makanan	20.690.000,00	0,00	11.921.000,00	11.921.000,00	-8.769.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan penjamah makanan	331.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	-38.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 18	Belanja jasa service alat kedokteran dan alat kesehatan	123.400.000,00	0,00	30.676.000,00	30.676.000,00	-92.724.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Cleaning Service	1.476.877.392,00	0,00	1.454.571.026,00	1.454.571.026,00	-22.306.366,00
5 . 1 . 2 . 03 . 23	Belanja jasa pelayanan kesehatan	36.738.062.681,37	0,00	31.148.228.617,00	31.148.228.617,00	-5.589.834.064,37
5 . 1 . 2 . 03 . 25	Belanja jasa insentif peserta KB Medis Operasi Pria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Laundry dan sejenisnya	210.117.677,91	0,00	166.562.338,00	166.562.338,00	-43.555.339,91
5 . 1 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pengawasan/Penilai/Korektor Ujian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa pemeliharaan insfrastruktur jaringan sistem informasi keuangan daerah	123.640.000,00	0,00	123.540.000,00	123.540.000,00	-100.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 31	Belanja jasa Pengujian laboratorium/non kesehatan	117.600.000,00	0,00	87.464.000,00	87.464.000,00	-30.136.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Konveksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 . 1 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Tenaga Sensus/Pendataan/Verifikasi Validasi dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Lainnya (langganan frekuensi radio dan sejenisnya)	1.050.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-50.000,00
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	184.413.229,10	0,00	130.583.382,00	130.583.382,00	-53.829.847,10
5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	184.413.229,10	0,00	130.583.382,00	130.583.382,00	-53.829.847,10
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.127.895.277,68	0,00	6.432.384.854,00	6.432.384.854,00	-695.510.423,68
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	957.662.779,25	0,00	815.694.760,00	815.694.760,00	-141.968.019,25
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.822.683.091,53	0,00	1.691.659.698,00	1.691.659.698,00	-131.023.393,53
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.848.114.688,40	0,00	3.514.522.995,00	3.514.522.995,00	-333.591.693,40
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	5.350.000,00	0,00	467.700,00	467.700,00	-4.882.300,00
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	403.223.918,50	0,00	333.582.601,00	333.582.601,00	-69.641.317,50
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	90.860.800,00	0,00	76.457.100,00	76.457.100,00	-14.403.700,00
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.960.395.926,75	0,00	7.406.958.136,00	7.406.958.136,00	-553.437.790,75
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.095.857.911,65	0,00	4.851.471.270,00	4.851.471.270,00	-244.386.641,65
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	573.240.145,02	0,00	464.654.900,00	464.654.900,00	-108.585.245,02
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Foto copy	1.597.816.084,00	0,00	1.454.000.586,00	1.454.000.586,00	-143.815.498,00
5 . 1 . 2 . 06 . 04	Belanja penjilidan	230.325.900,00	0,00	197.642.950,00	197.642.950,00	-32.682.950,00
5 . 1 . 2 . 06 . 07	Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya	463.155.886,08	0,00	439.188.430,00	439.188.430,00	-23.967.456,08
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	698.623.060,00	0,00	623.326.332,00	623.326.332,00	-75.296.728,00
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	177.240.000,00	0,00	171.620.000,00	171.620.000,00	-5.620.000,00
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	311.168.500,00	0,00	266.071.800,00	266.071.800,00	-45.096.700,00
5 . 1 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-750.000,00
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tempat penginapan	208.214.560,00	0,00	184.384.532,00	184.384.532,00	-23.830.028,00
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	562.500.000,00	0,00	500.210.000,00	500.210.000,00	-62.290.000,00
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	562.500.000,00	0,00	500.210.000,00	500.210.000,00	-62.290.000,00
5 . 1 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	254.335.000,00	0,00	252.713.000,00	252.713.000,00	-1.622.000,00
5 . 1 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	254.335.000,00	0,00	252.713.000,00	252.713.000,00	-1.622.000,00
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.155.127.460,00	0,00	1.907.788.180,00	1.907.788.180,00	-247.339.280,00
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	314.124.960,00	0,00	265.011.400,00	265.011.400,00	-49.113.560,00
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	331.581.400,00	0,00	318.143.400,00	318.143.400,00	-13.438.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	11.125.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.125.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	276.050.000,00	0,00	260.741.000,00	260.741.000,00	-15.309.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	593.671.200,00	0,00	486.602.720,00	486.602.720,00	-107.068.480,00
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.913.000,00	0,00	20.778.000,00	20.778.000,00	-135.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kesehatan	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kesenian	366.933.300,00	0,00	318.287.700,00	318.287.700,00	-48.645.600,00
5 . 1 . 2 . 10 . 10	Belanja Alat Uji Coba	15.600.000,00	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	-2.550.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa alat prasmanan, perlengkapan kantor dan rumah tangga lainnya	224.928.600,00	0,00	224.973.960,00	224.973.960,00	45.360,00
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.060.039.511,54	0,00	20.623.848.987,00	20.623.848.987,00	-3.436.190.524,54
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.095.217.900,00	0,00	6.737.518.528,00	6.737.518.528,00	-357.699.372,00
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.147.850.055,54	0,00	7.857.909.950,00	7.857.909.950,00	-2.289.940.105,54
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.762.833.300,00	0,00	2.444.835.059,00	2.444.835.059,00	-317.998.241,00

5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	1.239.192.500,00	0,00	1.212.976.250,00	1.212.976.250,00	-26.216.250,00
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman kesehatan (a.l. makanan dan minuman anak sekolah, Posyandu,dll)	1.688.586.100,00	0,00	1.310.819.700,00	1.310.819.700,00	-377.766.400,00
5 . 1 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman kegiatan/lembur	1.126.359.656,00	0,00	1.059.789.500,00	1.059.789.500,00	-66.570.156,00
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	471.306.500,00	0,00	416.429.900,00	416.429.900,00	-54.876.600,00
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	22.500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-17.500.000,00
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	92.500.000,00	0,00	81.765.000,00	81.765.000,00	-10.735.000,00
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	327.080.000,00	0,00	304.438.400,00	304.438.400,00	-22.641.600,00
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-4.000.000,00
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Belanja sepatu	18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	18.526.500,00	0,00
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	741.239.200,00	0,00	431.300.630,00	431.300.630,00	-309.938.570,00
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	741.239.200,00	0,00	431.300.630,00	431.300.630,00	-309.938.570,00
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.003.571.500,00	0,00	1.892.936.570,00	1.892.936.570,00	-110.634.930,00
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah	113.629.100,00	0,00	92.036.350,00	92.036.350,00	-21.592.750,00
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	509.588.400,00	0,00	500.982.720,00	500.982.720,00	-8.605.680,00
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	536.540.000,00	0,00	526.583.200,00	526.583.200,00	-9.956.800,00
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian khusus (Pramuka, baju muslim, praktek, dll)	843.814.000,00	0,00	773.334.300,00	773.334.300,00	-70.479.700,00
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.694.727.572,34	0,00	41.144.637.007,00	41.144.637.007,00	-8.550.090.565,34
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.845.838.405,00	0,00	2.783.936.000,00	2.783.936.000,00	-1.061.902.405,00
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.238.938.467,34	0,00	19.889.471.007,00	19.889.471.007,00	-1.349.467.460,34
5 . 1 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15 . 04	Belanja Transport Lokal PNS	11.725.685.700,00	0,00	9.402.185.000,00	9.402.185.000,00	-2.323.500.700,00
5 . 1 . 2 . 15 . 05	Belanja Transport Lokal Non PNS	12.884.265.000,00	0,00	9.069.045.000,00	9.069.045.000,00	-3.815.220.000,00
5 . 1 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 16 . 02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	7.967.882.179,84	0,00	7.418.490.467,00	7.418.490.467,00	-549.391.712,84
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.251.375.152,56	0,00	2.046.483.691,00	2.046.483.691,00	-204.891.461,56
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.112.058.127,28	0,00	4.795.289.376,00	4.795.289.376,00	-316.768.751,28
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	538.243.500,00	0,00	510.747.900,00	510.747.900,00	-27.495.600,00
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	66.205.400,00	0,00	65.969.500,00	65.969.500,00	-235.900,00
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	5.126.832.200,30	0,00	4.857.791.500,00	4.857.791.500,00	-269.040.700,30
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.929.948.050,00	0,00	1.821.570.000,00	1.821.570.000,00	-108.378.050,00
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.623.733.350,00	0,00	2.475.153.500,00	2.475.153.500,00	-148.579.850,00
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.345.400,30	0,00	39.574.000,00	39.574.000,00	-771.400,30
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	509.300.000,00	0,00	506.620.000,00	506.620.000,00	-2.680.000,00
5 . 1 . 2 . 19 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Pengujian/Pemeriksaan	23.505.400,00	0,00	14.874.000,00	14.874.000,00	-8.631.400,00
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Hibah barang)	0,00	0,00	7.744.394.850,00	7.744.394.850,00	7.744.394.850,00
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	7.744.394.850,00	7.744.394.850,00	7.744.394.850,00
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.026.940.000,00	0,00	1.926.499.200,00	1.926.499.200,00	-100.440.800,00
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	933.550.000,00	0,00	846.509.200,00	846.509.200,00	-87.040.800,00
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis / workshop	804.050.000,00	0,00	876.490.000,00	876.490.000,00	72.440.000,00
5 . 1 . 2 . 23 . 04	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	60.500.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-500.000,00
5 . 1 . 2 . 23 . 05	Belanja Sewa Tempat/Penginapan/Makan Minum Peserta Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat-LRA	93.840.000,00	0,00	86.040.000,00	86.040.000,00	-7.800.000,00

5 . 1 . 2 . 23 . 06	Belanja Sewa Tempat/Penginapan/Makan Minum Peserta Sosialisasi-LRA	13.500.000,00	0,00	13.460.000,00	13.460.000,00	-40.000,00
5 . 1 . 2 . 23 . 07	Belanja Sewa Tempat/Penginapan/Makan Minum Peserta Bimbingan Teknis-LRA	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 23 . 09	Belanja kontribusi outbond / capacity building / gathering- ...	106.500.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-77.500.000,00
5 . 1 . 2 . 24	Belanja Honorarium Non Pegawai (masyarakat, dll.)	1.148.600.000,00	0,00	741.410.000,00	741.410.000,00	-407.190.000,00
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.145.000.000,00	0,00	737.810.000,00	737.810.000,00	-407.190.000,00
5 . 1 . 2 . 24 . 02	Belanja Moderator	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 24 . 03	Belanja MC/Pembawa Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 25	Honorarium PNS	14.287.486.600,75	0,00	13.407.581.000,00	13.407.581.000,00	-879.905.600,75
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.212.720.000,00	0,00	6.942.711.000,00	6.942.711.000,00	-270.009.000,00
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA ULP)	1.409.230.000,00	0,00	1.404.030.000,00	1.404.030.000,00	-5.200.000,00
5 . 1 . 2 . 25 . 03	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	891.372.000,75	0,00	573.300.000,00	573.300.000,00	-318.072.000,75
5 . 1 . 2 . 25 . 04	Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan	4.194.739.600,00	0,00	3.938.515.000,00	3.938.515.000,00	-256.224.600,00
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Honorarium Sekretariat Kegiatan	579.425.000,00	0,00	549.025.000,00	549.025.000,00	-30.400.000,00
5 . 1 . 2 . 26	Honorarium Non PNS	10.928.973.860,00	0,00	10.637.820.860,00	10.637.820.860,00	-291.153.000,00
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	3.104.620.600,00	0,00	2.976.488.000,00	2.976.488.000,00	-128.132.600,00
5 . 1 . 2 . 26 . 03	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Non PNS	7.808.603.260,00	0,00	7.647.832.860,00	7.647.832.860,00	-160.770.400,00
5 . 1 . 2 . 26 . 04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Non Swadana	15.750.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-2.250.000,00
5 . 1 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 28	Honorarium Pengelola Dana BOS	7.378.862.574,00	0,00	3.340.263.400,00	3.340.263.400,00	-4.038.599.174,00
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	7.378.862.574,00	0,00	3.340.263.400,00	3.340.263.400,00	-4.038.599.174,00
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Barang Dana BOS	49.088.598.623,40	0,00	57.670.325.558,00	57.670.325.558,00	8.581.726.934,60
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	49.088.598.623,40	0,00	57.670.325.558,00	57.670.325.558,00	8.581.726.934,60
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	951.167.680,00	0,00	926.320.630,00	926.320.630,00	-24.847.050,00
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll)	951.167.680,00	0,00	926.320.630,00	926.320.630,00	-24.847.050,00
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.288.385.290,98	0,00	42.643.210.109,16	42.643.210.109,16	-2.645.175.181,82
5 . 1 . 2 . 32 . 01	Belanja Non Personil/Jasa Konsultasi	1.776.000.000,00	0,00	861.919.000,00	861.919.000,00	-914.081.000,00
5 . 1 . 2 . 32 . 02	Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik	59.335.600,00	0,00	58.545.000,00	58.545.000,00	-790.600,00
5 . 1 . 2 . 32 . 03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.714.975.329,00	0,00	1.046.224.060,00	1.046.224.060,00	-668.751.269,00
5 . 1 . 2 . 32 . 06	Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, dll)	37.101.674.886,00	0,00	36.354.531.609,16	36.354.531.609,16	-747.143.276,84
5 . 1 . 2 . 32 . 07	Belanja Penyelenggaraan Pagelaran Budaya Daerah/Seni Tradisional/Hiburan	990.136.925,00	0,00	966.972.000,00	966.972.000,00	-23.164.925,00
5 . 1 . 2 . 32 . 08	Belanja Jasa Konsultasi/Pendampingan Pengembangan	95.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-66.000.000,00
5 . 1 . 2 . 32 . 09	Upah Tenaga Kerja Konstruksi	2.283.412.850,00	0,00	2.144.090.000,00	2.144.090.000,00	-139.322.850,00
5 . 1 . 2 . 32 . 11	Belanja jasa pemusnahan obat kadaluwarsa dan sejenisnya	274.741.750,98	0,00	193.296.990,00	193.296.990,00	-81.444.760,98
5 . 1 . 2 . 32 . 16	Belanja Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	993.107.950,00	0,00	988.631.450,00	988.631.450,00	-4.476.500,00
5 . 1 . 2 . 33	Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 33 . 03	Belanja sewa alat kerja konstruksi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 34	Belanja Pemberian Hadiah dan Penghargaan	991.731.600,00	0,00	865.173.700,00	865.173.700,00	-126.557.900,00
5 . 1 . 2 . 34 . 01	Belanja penghargaan kepada siswa berprestasi / teladan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 34 . 03	Belanja pengadaan hadiah/trophy/piagam/sertifikat, cinderamata, dan sejenisnya	991.731.600,00	0,00	865.173.700,00	865.173.700,00	-126.557.900,00

5 . 1 . 2 . 35	Belanja barang dan jasa BLUD	114.989.455.423,59	0,00	109.862.871.118,00	109.862.871.118,00	-5.126.584.305,59
5 . 1 . 2 . 35 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.987.262.223,59	0,00	109.862.871.118,00	109.862.871.118,00	-5.124.391.105,59
5 . 1 . 2 . 35 . 03	Belanja Operasi dan Pemeliharaan FKTP	2.193.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.193.200,00
5 . 1 . 2 . 37	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan	2.823.574.000,00	0,00	2.678.589.102,00	2.678.589.102,00	-144.984.898,00
5 . 1 . 2 . 37 . 01	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan	2.823.574.000,00	0,00	2.678.589.102,00	2.678.589.102,00	-144.984.898,00
5 . 1 . 2 . 38	Belanja barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bantuan Sosial	1.966.500.000,00	0,00	1.966.500.000,00	1.966.500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 38 . 01	Belanja barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bantuan Sosial	1.966.500.000,00	0,00	1.966.500.000,00	1.966.500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 39	Belanja barang dan jasa BLUD	6.327.425.000,00	0,00	9.312.292.369,00	9.312.292.369,00	2.984.867.369,00
5 . 1 . 2 . 39 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.327.425.000,00	0,00	9.312.292.369,00	9.312.292.369,00	2.984.867.369,00
5 . 1 . 2 . 40	Belanja barang modal non aset	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 40 . 01	Belanja barang modal non aset (buku, alat-alat laboratorium, dll)	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 41	Belanja Jasa Keselamatan Kerja	374.350.080,00	0,00	369.650.000,00	369.650.000,00	-4.700.080,00
5 . 1 . 2 . 41 . 01	Jasa keselamatan kerja Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	374.350.080,00	0,00	369.650.000,00	369.650.000,00	-4.700.080,00
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	2.370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	-2.000.000.000,00
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman	2.370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	-2.000.000.000,00
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	2.370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	-2.000.000.000,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	107.122.298.999,96	0,00	96.257.560.900,00	96.257.560.900,00	-10.864.738.099,96
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	61.793.586.600,00	0,00	61.793.586.600,00	61.793.586.600,00	0,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	61.793.586.600,00	0,00	61.793.586.600,00	61.793.586.600,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	30.258.600.000,00	0,00	28.126.710.000,00	28.126.710.000,00	-2.131.890.000,00
5 . 1 . 5 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Lembaga PAUD	13.041.000.000,00	0,00	12.300.600.000,00	12.300.600.000,00	-740.400.000,00
5 . 1 . 5 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada BPPDGS dan Guru Ngaji	16.467.600.000,00	0,00	15.115.260.000,00	15.115.260.000,00	-1.352.340.000,00
5 . 1 . 5 . 05 . 04	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	750.000.000,00	0,00	710.850.000,00	710.850.000,00	-39.150.000,00
5 . 1 . 5 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	13.953.882.099,96	0,00	5.221.034.000,00	5.221.034.000,00	-8.732.848.099,96
5 . 1 . 5 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	13.953.882.099,96	0,00	5.221.034.000,00	5.221.034.000,00	-8.732.848.099,96
5 . 1 . 5 . 08	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	1.116.230.300,00	0,00	1.116.230.300,00	1.116.230.300,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 01	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	109.344.500,00	0,00	109.344.500,00	109.344.500,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 02	Belanja Hibah Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	126.425.100,00	0,00	126.425.100,00	126.425.100,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 03	Belanja Hibah Kepada Partai DEMOKRAT	128.400.800,00	0,00	128.400.800,00	128.400.800,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 04	Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	190.939.600,00	0,00	190.939.600,00	190.939.600,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 05	Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	65.160.900,00	0,00	65.160.900,00	65.160.900,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 06	Belanja Hibah Kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	12.488.700,00	0,00	12.488.700,00	12.488.700,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 07	Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.004.600,00	0,00	20.004.600,00	20.004.600,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 08	Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	85.046.000,00	0,00	85.046.000,00	85.046.000,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 09	Belanja Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	125.458.500,00	0,00	125.458.500,00	125.458.500,00	0,00
5 . 1 . 5 . 08 . 10	Belanja Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	252.961.600,00	0,00	252.961.600,00	252.961.600,00	0,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	30.188.551.000,00	0,00	29.403.888.830,76	29.403.888.830,76	-784.662.169,24
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	14.715.650.000,00	0,00	14.080.788.830,76	14.080.788.830,76	-634.861.169,24
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	6.031.500.000,00	0,00	6.031.500.000,00	6.031.500.000,00	0,00

5 . 1 . 6 . 01 . 02	Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	8.684.150.000,00	0,00	8.049.288.830,76	8.049.288.830,76	-634.861.169,24
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	15.472.901.000,00	0,00	15.323.100.000,00	15.323.100.000,00	-149.801.000,00
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	15.472.901.000,00	0,00	15.323.100.000,00	15.323.100.000,00	-149.801.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	451.226.270.770,57	0,00	277.825.993.167,00	277.825.993.167,00	-173.400.277.603,57
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 11 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.829.311.765,77	0,00	60.409.060.147,00	60.409.060.147,00	-7.420.251.618,77
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.399.700.600,00	0,00	864.318.554,00	864.318.554,00	-2.535.382.046,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	3.285.265.400,00	0,00	758.141.500,00	758.141.500,00	-2.527.123.900,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	94.132.400,00	0,00	86.177.054,00	86.177.054,00	-7.955.346,00
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	20.302.800,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-302.800,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.935.375.322,00	0,00	3.859.895.500,00	3.859.895.500,00	-2.075.479.822,00
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.854.827.000,00	0,00	1.305.100.000,00	1.305.100.000,00	-549.727.000,00
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	53.700.000,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	-900.000,00
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.201.975.322,00	0,00	713.865.500,00	713.865.500,00	-1.488.109.822,00
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.824.873.000,00	0,00	1.788.130.000,00	1.788.130.000,00	-36.743.000,00
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	256.586.400,00	0,00	251.142.500,00	251.142.500,00	-5.443.900,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	256.586.400,00	0,00	251.142.500,00	251.142.500,00	-5.443.900,00
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 09 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	713.900,00	0,00	713.900,00	713.900,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	713.900,00	0,00	713.900,00	713.900,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	204.450.000,00	0,00	204.297.500,00	204.297.500,00	-152.500,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	6.000.000,00	0,00	5.925.000,00	5.925.000,00	-75.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	198.450.000,00	0,00	198.372.500,00	198.372.500,00	-77.500,00
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	268.381.600,00	0,00	263.790.000,00	263.790.000,00	-4.591.600,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	265.264.500,00	0,00	261.005.000,00	261.005.000,00	-4.259.500,00
5 . 2 . 2 . 13 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	3.117.100,00	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00	-332.100,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	674.727.900,00	0,00	605.645.350,00	605.645.350,00	-69.082.550,00
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	2.500.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	-50.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	786.400,00	0,00	786.400,00	786.400,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	31.669.000,00	0,00	25.665.450,00	25.665.450,00	-6.003.550,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	639.772.500,00	0,00	576.743.500,00	576.743.500,00	-63.029.000,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.437.558.105,27	0,00	4.255.628.574,00	4.255.628.574,00	-181.929.531,27
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.510.062.582,50	0,00	2.421.796.599,00	2.421.796.599,00	-88.265.983,50
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	96.523.000,00	0,00	93.437.400,00	93.437.400,00	-3.085.600,00
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	829.592.904,00	0,00	765.695.280,00	765.695.280,00	-63.897.624,00
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	31.936.500,00	0,00	31.836.500,00	31.836.500,00	-100.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	962.535.118,77	0,00	935.954.795,00	935.954.795,00	-26.580.323,77
5 . 2 . 2 . 15 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	6.908.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.720.570.774,50	0,00	8.464.892.625,00	8.464.892.625,00	-255.678.149,50
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	12.798.300,00	0,00	12.623.750,00	12.623.750,00	-174.550,00
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.918.743.862,60	0,00	5.738.632.971,00	5.738.632.971,00	-180.110.891,60
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	467.366.500,00	0,00	455.762.306,00	455.762.306,00	-11.604.194,00
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	122.638.100,00	0,00	119.560.500,00	119.560.500,00	-3.077.600,00
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.068.346.388,70	0,00	1.033.361.648,00	1.033.361.648,00	-34.984.740,70
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	94.768.500,00	0,00	92.586.450,00	92.586.450,00	-2.182.050,00
5 . 2 . 2 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi	1.035.909.123,20	0,00	1.012.365.000,00	1.012.365.000,00	-23.544.123,20
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	316.511.000,00	0,00	310.711.000,00	310.711.000,00	-5.800.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	43.360.100,00	0,00	42.652.000,00	42.652.000,00	-708.100,00
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	11.000.000,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	-150.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	22.247.400,00	0,00	21.999.000,00	21.999.000,00	-248.400,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	55.119.000,00	0,00	54.700.000,00	54.700.000,00	-419.000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20.224.100,00	0,00	20.210.000,00	20.210.000,00	-14.100,00
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.860.400,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-60.400,00
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	155.700.000,00	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00	-4.200.000,00
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	692.601.715,04	0,00	658.666.965,00	658.666.965,00	-33.934.750,04
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	488.201.000,04	0,00	468.712.000,00	468.712.000,00	-19.489.000,04
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	84.989.000,00	0,00	75.964.000,00	75.964.000,00	-9.025.000,00
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	8.819.220,00	0,00	8.819.220,00	8.819.220,00	0,00
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	14.592.495,00	0,00	14.592.495,00	14.592.495,00	0,00
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	96.000.000,00	0,00	90.579.250,00	90.579.250,00	-5.420.750,00
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	205.528.000,00	0,00	169.006.998,00	169.006.998,00	-36.521.002,00
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	122.801.600,00	0,00	105.231.300,00	105.231.300,00	-17.570.300,00
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	33.000.000,00	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	-2.150.000,00
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	12.500.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-500.000,00
5 . 2 . 2 . 19 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	22.226.400,00	0,00	20.925.698,00	20.925.698,00	-1.300.702,00
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	12.166.646.326,96	0,00	10.912.608.263,00	10.912.608.263,00	-1.254.038.063,96
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	724.622.914,96	0,00	662.191.987,00	662.191.987,00	-62.430.927,96
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	23.802.700,00	0,00	20.365.700,00	20.365.700,00	-3.437.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	780.000.000,00	0,00	390.390.000,00	390.390.000,00	-389.610.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	4.964.840.787,00	0,00	4.839.588.362,00	4.839.588.362,00	-125.252.425,00
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	550.000.000,00	0,00	522.000.000,00	522.000.000,00	-28.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	2.320.754.925,00	0,00	2.309.750.000,00	2.309.750.000,00	-11.004.925,00
5 . 2 . 2 . 21 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	915.000.000,00	0,00	881.000.000,00	881.000.000,00	-34.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	23.175.000,00	0,00	19.701.000,00	19.701.000,00	-3.474.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Intensive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Paru	1.760.600.000,00	0,00	1.263.771.214,00	1.263.771.214,00	-496.828.786,00

5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	10.001.638.795,00	0,00	8.991.900.558,00	8.991.900.558,00	-1.009.738.237,00
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	10.001.638.795,00	0,00	8.991.900.558,00	8.991.900.558,00	-1.009.738.237,00
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	171.673.000,00	0,00	161.180.000,00	161.180.000,00	-10.493.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	45.000.000,00	0,00	44.660.000,00	44.660.000,00	-340.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	3.673.000,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	-3.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	120.000.000,00	0,00	109.850.000,00	109.850.000,00	-10.150.000,00
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10.000.000,00	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	-25.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System	10.000.000,00	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	-25.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	8.500.000,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-3.350.000,00
5 . 2 . 2 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	8.500.000,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-3.350.000,00
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.380.261.406,00	0,00	1.375.460.000,00	1.375.460.000,00	-4.801.406,00
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	1.372.832.600,00	0,00	1.368.227.500,00	1.368.227.500,00	-4.605.100,00
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	7.428.806,00	0,00	7.232.500,00	7.232.500,00	-196.306,00
5 . 2 . 2 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	4.255.602.200,00	0,00	3.805.033.751,00	3.805.033.751,00	-450.568.449,00
5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	4.255.602.200,00	0,00	3.805.033.751,00	3.805.033.751,00	-450.568.449,00
5 . 2 . 2 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana BOS	14.716.689.721,00	0,00	15.233.448.109,00	15.233.448.109,00	516.758.388,00
5 . 2 . 2 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana BOS	14.716.689.721,00	0,00	15.233.448.109,00	15.233.448.109,00	516.758.388,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.140.632.625,30	0,00	43.996.447.937,00	43.996.447.937,00	-4.144.184.688,30
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.498.805.744,04	0,00	29.283.664.631,00	29.283.664.631,00	-3.215.141.113,04
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.683.784.760,50	0,00	2.557.649.916,00	2.557.649.916,00	-126.134.844,50
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	133.495.050,00	0,00	133.051.000,00	133.051.000,00	-444.050,00
5 . 2 . 3 . 01 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	4.923.580,50	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-303.580,50

5 . 2 . 3 . 01 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	2.035.179.556,00	0,00	1.624.676.800,00	1.624.676.800,00	-410.502.756,00
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.954.268.209,00	0,00	8.731.445.115,00	8.731.445.115,00	-2.222.823.094,00
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	0,00	149.286.000,00	149.286.000,00	-714.000,00
5 . 2 . 3 . 01 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	110.000.000,00	0,00	109.152.000,00	109.152.000,00	-848.000,00
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.652.397.600,00	0,00	10.517.986.500,00	10.517.986.500,00	-134.411.100,00
5 . 2 . 3 . 01 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	819.379.000,00	0,00	816.769.000,00	816.769.000,00	-2.610.000,00
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	424.091.000,00	0,00	414.746.400,00	414.746.400,00	-9.344.600,00
5 . 2 . 3 . 01 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	493.478.000,00	0,00	492.179.700,00	492.179.700,00	-1.298.300,00
5 . 2 . 3 . 01 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	360.916.188,04	0,00	358.606.000,00	358.606.000,00	-2.310.188,04
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	3.624.452.800,00	0,00	3.321.242.800,00	3.321.242.800,00	-303.210.000,00
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.440.000,00	0,00	52.253.400,00	52.253.400,00	-186.600,00
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	161.000.000,00	0,00	160.557.200,00	160.557.200,00	-442.800,00
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	111.000.000,00	0,00	110.645.000,00	110.645.000,00	-355.000,00
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	50.000.000,00	0,00	49.912.200,00	49.912.200,00	-87.800,00
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	139.500.000,00	0,00	138.740.000,00	138.740.000,00	-760.000,00
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	139.500.000,00	0,00	138.740.000,00	138.740.000,00	-760.000,00
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	63.549.600,00	0,00	63.299.500,00	63.299.500,00	-250.100,00
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	63.549.600,00	0,00	63.299.500,00	63.299.500,00	-250.100,00
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	15.184.777.281,26	0,00	14.259.256.606,00	14.259.256.606,00	-925.520.675,26
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	15.184.777.281,26	0,00	14.259.256.606,00	14.259.256.606,00	-925.520.675,26
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lain - Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	93.000.000,00	0,00	90.930.000,00	90.930.000,00	-2.070.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lain - Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	93.000.000,00	0,00	90.930.000,00	90.930.000,00	-2.070.000,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	331.397.818.329,50	0,00	169.629.442.775,00	169.629.442.775,00	-161.768.375.554,50
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	277.096.756.677,50	0,00	118.283.538.060,00	118.283.538.060,00	-158.813.218.617,50
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	209.539.079.160,00	0,00	53.567.975.860,00	53.567.975.860,00	-155.971.103.300,00
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.400.606.700,00	0,00	64.561.360.200,00	64.561.360.200,00	-2.839.246.500,00
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	157.070.817,50	0,00	154.202.000,00	154.202.000,00	-2.868.817,50

5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	9.338.225.500,00	0,00	9.277.961.200,00	9.277.961.200,00	-60.264.300,00
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	9.338.225.500,00	0,00	9.277.961.200,00	9.277.961.200,00	-60.264.300,00
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	11.000.829.000,00	0,00	8.784.315.315,00	8.784.315.315,00	-2.216.513.685,00
5 . 2 . 4 . 03 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	11.000.829.000,00	0,00	8.784.315.315,00	8.784.315.315,00	-2.216.513.685,00
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	29.547.041.200,00	0,00	29.225.338.700,00	29.225.338.700,00	-321.702.500,00
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	29.547.041.200,00	0,00	29.225.338.700,00	29.225.338.700,00	-321.702.500,00
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	21.475.000,00	0,00	20.403.000,00	20.403.000,00	-1.072.000,00
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	21.475.000,00	0,00	20.403.000,00	20.403.000,00	-1.072.000,00
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.953.197.000,00	0,00	1.709.290.400,00	1.709.290.400,00	-243.906.600,00
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	12.000.000,00	0,00	11.095.000,00	11.095.000,00	-905.000,00
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.941.197.000,00	0,00	1.698.195.400,00	1.698.195.400,00	-243.001.600,00
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.907.806.300,00	0,00	1.808.651.000,00	1.808.651.000,00	-99.155.300,00
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.907.806.300,00	0,00	1.808.651.000,00	1.808.651.000,00	-99.155.300,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	23.900.000,00	0,00	12.555.000,00	12.555.000,00	-11.345.000,00
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	17.000.000,00	0,00	5.655.000,00	5.655.000,00	-11.345.000,00
5 . 2 . 4 . 24	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	508.587.652,00	0,00	507.390.100,00	507.390.100,00	-1.197.552,00
5 . 2 . 4 . 24 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	508.587.652,00	0,00	507.390.100,00	507.390.100,00	-1.197.552,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.858.508.050,00	0,00	3.791.042.308,00	3.791.042.308,00	-67.465.742,00
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	19.810.000,00	-190.000,00
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	19.810.000,00	-190.000,00
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	2.906.348.600,00	0,00	2.904.551.278,00	2.904.551.278,00	-1.797.322,00
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	2.791.388.600,00	0,00	2.790.097.150,00	2.790.097.150,00	-1.291.450,00
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	50.000.000,00	0,00	49.994.128,00	49.994.128,00	-5.872,00

5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	64.960.000,00	0,00	64.460.000,00	64.460.000,00	-500.000,00
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	220.000.000,00	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	-600.000,00
5 . 2 . 5 . 04 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	220.000.000,00	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	-600.000,00
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD	23.400.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-12.200.000,00
5 . 2 . 5 . 09 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD	23.400.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-12.200.000,00
5 . 2 . 5 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	688.759.450,00	0,00	636.081.030,00	636.081.030,00	-52.678.420,00
5 . 2 . 5 . 10 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	688.759.450,00	0,00	636.081.030,00	636.081.030,00	-52.678.420,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	39.068.453.099,86	0,00	30.421.703.090,59	30.421.703.090,59	-8.646.750.009,27
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	39.068.453.099,86	0,00	30.421.703.090,59	30.421.703.090,59	-8.646.750.009,27
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga	39.068.453.099,86	0,00	30.421.703.090,59	30.421.703.090,59	-8.646.750.009,27
5 . 3 . 1 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga	39.068.453.099,86	0,00	30.421.703.090,59	30.421.703.090,59	-8.646.750.009,27
6	TRANSFER	426.266.399.030,00	0,00	422.591.512.838,00	422.591.512.838,00	-3.674.886.192,00
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	8.860.539.470,00	0,00	8.519.503.278,00	8.519.503.278,00	-341.036.192,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.593.573.695,00	0,00	7.712.886.034,00	7.712.886.034,00	119.312.339,00
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	7.593.573.695,00	0,00	7.712.886.034,00	7.712.886.034,00	119.312.339,00
6 . 1 . 1 . 01 . 03	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	7.593.573.695,00	0,00	7.712.886.034,00	7.712.886.034,00	119.312.339,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.266.965.775,00	0,00	806.617.244,00	806.617.244,00	-460.348.531,00
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.266.965.775,00	0,00	806.617.244,00	806.617.244,00	-460.348.531,00
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.266.965.775,00	0,00	806.617.244,00	806.617.244,00	-460.348.531,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	417.405.859.560,00	0,00	414.072.009.560,00	414.072.009.560,00	-3.333.850.000,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	417.405.859.560,00	0,00	414.072.009.560,00	414.072.009.560,00	-3.333.850.000,00
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	417.405.859.560,00	0,00	414.072.009.560,00	414.072.009.560,00	-3.333.850.000,00
6 . 2 . 2 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	417.405.859.560,00	0,00	414.072.009.560,00	414.072.009.560,00	-3.333.850.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	-239.947.632.073,46	0,00	23.246.761.681,26	23.246.761.681,26	263.194.393.754,72
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	243.147.632.073,46	0,00	86.947.910.073,46	86.947.910.073,46	-156.199.722.000,00
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	42.847.632.073,46	0,00	42.847.632.073,46	42.847.632.073,46	0,00
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	42.847.632.073,46	0,00	42.847.632.073,46	42.847.632.073,46	0,00
7 . 1 . 1 . 01 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	42.847.632.073,46	0,00	42.847.632.073,46	42.847.632.073,46	0,00
7 . 1 . 4	Pinjaman Dalam Negeri	200.000.000.000,00	0,00	44.099.198.000,00	44.099.198.000,00	-155.900.802.000,00
7 . 1 . 4 . 04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	200.000.000.000,00	0,00	44.099.198.000,00	44.099.198.000,00	-155.900.802.000,00
7 . 1 . 4 . 04 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	200.000.000.000,00	0,00	44.099.198.000,00	44.099.198.000,00	-155.900.802.000,00
7 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Piutang	300.000.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-298.920.000,00

7 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	300.000.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-298.920.000,00
7 . 1 . 5 . 05 . 01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	300.000.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-298.920.000,00
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
7 . 2 . 2 . 02	Penyertaan Modal pada BUMD	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
7 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BUMD	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	239.947.632.073,46	0,00	83.747.910.073,46	83.747.910.073,46	-156.199.722.000,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-0,00	0,00	106.994.671.754,72	106.994.671.754,72	106.994.671.754,72



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.176.145.749.169,00	0,00	2.327.251.510.061,31	2.327.251.510.061,31	151.105.760.892,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	274.040.857.868,00	0,00	376.702.757.475,31	376.702.757.475,31	102.661.899.607,31
4.1.1	Pajak Daerah	85.525.000.000,00	0,00	96.386.623.239,00	96.386.623.239,00	10.861.623.239,00
4.1.1.06	Pajak Hotel	825.000.000,00	0,00	982.089.364,00	982.089.364,00	157.089.364,00
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	775.000.000,00	0,00	903.133.214,00	903.133.214,00	128.133.214,00
4.1.1.06.03	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	78.956.150,00	78.956.150,00	28.956.150,00
4.1.1.07	Pajak Restoran	3.075.000.000,00	0,00	5.781.197.521,00	5.781.197.521,00	2.706.197.521,00
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	900.000.000,00	0,00	1.215.185.282,00	1.215.185.282,00	315.185.282,00
4.1.1.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	35.000.000,00	0,00	53.303.000,00	53.303.000,00	18.303.000,00
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.140.000.000,00	0,00	4.512.709.239,00	4.512.709.239,00	2.372.709.239,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan	185.000.000,00	0,00	244.019.785,00	244.019.785,00	59.019.785,00
4.1.1.08.01	Pajak Tontonan Film	100.000.000,00	0,00	140.687.705,00	140.687.705,00	40.687.705,00
4.1.1.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	85.000.000,00	0,00	103.332.080,00	103.332.080,00	18.332.080,00
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	Pajak Reklame	1.334.000.000,00	0,00	1.253.946.562,00	1.253.946.562,00	-80.053.438,00
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.084.000.000,00	0,00	1.078.145.783,00	1.078.145.783,00	-5.854.217,00
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00	0,00	175.800.779,00	175.800.779,00	-74.199.221,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	25.216.000.000,00	0,00	27.388.120.100,00	27.388.120.100,00	2.172.120.100,00
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.216.000.000,00	0,00	27.388.120.100,00	27.388.120.100,00	2.172.120.100,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	160.000.000,00	0,00	210.244.200,00	210.244.200,00	50.244.200,00
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	160.000.000,00	0,00	210.244.200,00	210.244.200,00	50.244.200,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	165.000.000,00	0,00	192.744.401,00	192.744.401,00	27.744.401,00
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	165.000.000,00	0,00	192.744.401,00	192.744.401,00	27.744.401,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	515.000.000,00	0,00	518.229.990,00	518.229.990,00	3.229.990,00
4.1.1.14.04	Pajak Batu Kapur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14.12	Pajak Granit/Andesit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	515.000.000,00	0,00	518.229.990,00	518.229.990,00	3.229.990,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.550.000.000,00	0,00	38.523.942.392,00	38.523.942.392,00	973.942.392,00
4.1.1.15.01	PBBP2	37.550.000.000,00	0,00	38.523.942.392,00	38.523.942.392,00	973.942.392,00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.500.000.000,00	0,00	21.292.088.924,00	21.292.088.924,00	4.792.088.924,00
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	16.500.000.000,00	0,00	21.292.088.924,00	21.292.088.924,00	4.792.088.924,00
4.1.2	Retribusi Daerah	12.026.668.933,00	0,00	11.395.502.881,00	11.395.502.881,00	-631.166.052,00

4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.730.498.300,00	0,00	5.962.590.490,00	5.962.590.490,00	232.092.190,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.831.000,00	0,00	114.318.000,00	114.318.000,00	11.487.000,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	277.672.000,00	0,00	282.044.500,00	282.044.500,00	4.372.500,00
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	7.267.500,00	7.267.500,00	7.267.500,00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	0,00	641.281.000,00	641.281.000,00	-108.719.000,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.332.602.300,00	0,00	2.450.138.150,00	2.450.138.150,00	117.535.850,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.400.000.000,00	0,00	1.824.813.600,00	1.824.813.600,00	424.813.600,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	138.000.000,00	0,00	46.109.000,00	46.109.000,00	-91.891.000,00
4.1.2.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	13.585.000,00	0,00	14.357.500,00	14.357.500,00	772.500,00
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.808.000,00	0,00	88.711.000,00	88.711.000,00	52.903.000,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	675.000.000,00	0,00	488.550.240,00	488.550.240,00	-186.449.760,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.716.026.333,00	0,00	4.841.535.469,00	4.841.535.469,00	-874.490.864,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.572.627.000,00	0,00	3.581.174.269,00	3.581.174.269,00	8.547.269,00
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.500.000,00	0,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.275.000,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	23.794.000,00	0,00	26.141.000,00	26.141.000,00	2.347.000,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	173.382.000,00	0,00	162.116.500,00	162.116.500,00	-11.265.500,00
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.824.700.500,00	0,00	953.279.000,00	953.279.000,00	-871.421.500,00
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	118.022.833,00	0,00	114.049.700,00	114.049.700,00	-3.973.133,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	580.144.300,00	0,00	591.376.922,00	591.376.922,00	11.232.622,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	572.268.300,00	0,00	581.461.922,00	581.461.922,00	9.193.622,00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.876.000,00	0,00	9.915.000,00	9.915.000,00	2.039.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.150.690.865,00	0,00	1.152.503.864,60	1.152.503.864,60	1.812.999,60
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.150.690.865,00	0,00	1.152.503.864,60	1.152.503.864,60	1.812.999,60
4.1.3.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.150.690.865,00	0,00	1.152.503.864,60	1.152.503.864,60	1.812.999,60
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	175.338.498.070,00	0,00	267.768.127.490,71	267.768.127.490,71	92.429.629.420,71
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	392.000.008,00	0,00	204.340.000,00	204.340.000,00	-187.660.008,00
4.1.4.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	384.100.008,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	-188.100.008,00
4.1.4.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	7.900.000,00	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	440.000,00
4.1.4.05	Jasa Giro	1.800.000.000,00	0,00	1.824.041.945,06	1.824.041.945,06	24.041.945,06
4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.800.000.000,00	0,00	1.824.041.945,06	1.824.041.945,06	24.041.945,06
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	700.000.000,00	0,00	1.205.677.893,48	1.205.677.893,48	505.677.893,48
4.1.4.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	700.000.000,00	0,00	1.205.677.893,48	1.205.677.893,48	505.677.893,48
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	114.757.051,00	114.757.051,00	114.757.051,00
4.1.4.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	114.757.051,00	114.757.051,00	114.757.051,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	165.451.082.094,00	0,00	257.553.062.877,82	257.553.062.877,82	92.101.980.783,82
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	165.451.082.094,00	0,00	257.553.062.877,82	257.553.062.877,82	92.101.980.783,82

4.1.4.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	0,00	328.273.181,93	328.273.181,93	-671.726.818,07
4.1.4.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1.000.000.000,00	0,00	328.273.181,93	328.273.181,93	-671.726.818,07
4.1.4.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.995.415.968,00	0,00	6.537.974.541,42	6.537.974.541,42	542.558.573,42
4.1.4.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.995.415.968,00	0,00	6.537.974.541,42	6.537.974.541,42	542.558.573,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.831.599.291.301,00	0,00	1.873.404.989.586,00	1.873.404.989.586,00	41.805.698.285,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.696.036.565.801,00	0,00	1.701.951.788.647,00	1.701.951.788.647,00	5.915.222.846,00
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.421.457.494.801,00	0,00	1.427.372.717.647,00	1.427.372.717.647,00	5.915.222.846,00
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	92.239.035.801,00	0,00	125.582.078.548,00	125.582.078.548,00	33.343.042.747,00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	979.474.402.000,00	0,00	979.474.402.000,00	979.474.402.000,00	0,00
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.995.955.000,00	0,00	80.264.427.746,00	80.264.427.746,00	-15.731.527.254,00
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	253.748.102.000,00	0,00	242.051.809.353,00	242.051.809.353,00	-11.696.292.647,00
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.357.185.000,00	0,00	19.357.185.000,00	19.357.185.000,00	0,00
4.2.1.02.01	DID	19.357.185.000,00	0,00	19.357.185.000,00	19.357.185.000,00	0,00
4.2.1.05	Dana Desa	255.221.886.000,00	0,00	255.221.886.000,00	255.221.886.000,00	0,00
4.2.1.05.01	Dana Desa	255.221.886.000,00	0,00	255.221.886.000,00	255.221.886.000,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.562.725.500,00	0,00	171.453.200.939,00	171.453.200.939,00	35.890.475.439,00
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	129.650.000.000,00	0,00	161.528.475.439,00	161.528.475.439,00	31.878.475.439,00
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.650.000.000,00	0,00	161.528.475.439,00	161.528.475.439,00	31.878.475.439,00
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	5.912.725.500,00	0,00	9.924.725.500,00	9.924.725.500,00	4.012.000.000,00
4.2.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.912.725.500,00	0,00	9.924.725.500,00	9.924.725.500,00	4.012.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.505.600.000,00	0,00	77.143.763.000,00	77.143.763.000,00	6.638.163.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	0,00	2.802.000.000,00	2.802.000.000,00	-198.000.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	0,00	2.802.000.000,00	2.802.000.000,00	-198.000.000,00
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	0,00	2.802.000.000,00	2.802.000.000,00	-198.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.505.600.000,00	0,00	74.341.763.000,00	74.341.763.000,00	6.836.163.000,00
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	67.505.600.000,00	0,00	74.341.763.000,00	74.341.763.000,00	6.836.163.000,00
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	67.505.600.000,00	0,00	74.341.763.000,00	74.341.763.000,00	6.836.163.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.435.440.420.923,72	0,00	2.112.615.763.918,81	2.112.615.763.918,81	-322.824.657.004,91
5.1	BELANJA OPERASI	1.557.103.975.048,28	0,00	1.449.176.731.817,20	1.449.176.731.817,20	-107.927.243.231,08
5.1.1	Belanja Pegawai	978.049.926.290,77	0,00	944.978.499.361,70	944.978.499.361,70	-33.071.426.929,07
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	599.820.361.661,77	0,00	596.073.210.596,00	596.073.210.596,00	-3.747.151.065,77
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	463.115.979.129,00	0,00	460.423.468.984,00	460.423.468.984,00	-2.692.510.145,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.555.487.998,00	0,00	41.253.756.528,00	41.253.756.528,00	-301.731.470,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.174.591.998,00	0,00	7.064.720.770,00	7.064.720.770,00	-109.871.228,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.911.290.990,00	0,00	30.831.804.000,00	30.831.804.000,00	-79.486.990,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.959.255.988,00	0,00	6.840.325.268,00	6.840.325.268,00	-118.930.720,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.024.150.988,00	0,00	23.881.198.263,00	23.881.198.263,00	-142.952.725,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.069.319.988,00	0,00	1.028.480.994,00	1.028.480.994,00	-40.838.994,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.513.506,00	0,00	6.326.704,00	6.326.704,00	-186.802,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.023.939.856,77	0,00	21.847.593.948,00	21.847.593.948,00	-176.345.908,77

5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	724.312.805,00	0,00	707.421.887,00	707.421.887,00	-16.890.918,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.188.518.415,00	0,00	2.122.270.250,00	2.122.270.250,00	-66.248.165,00
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	67.000.000,00	0,00	65.843.000,00	65.843.000,00	-1.157.000,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	62.941.861.776,00	0,00	59.449.409.170,00	59.449.409.170,00	-3.492.452.606,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	62.941.861.776,00	0,00	59.449.409.170,00	59.449.409.170,00	-3.492.452.606,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	214.070.763.761,00	0,00	201.847.376.743,00	201.847.376.743,00	-12.223.387.018,00
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.661.761.000,00	0,00	7.497.462.808,00	7.497.462.808,00	-164.298.192,00
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	651.896.767,00	0,00	505.498.478,00	505.498.478,00	-146.398.289,00
5.1.1.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	200.277.489.000,00	0,00	188.801.551.240,00	188.801.551.240,00	-11.475.937.760,00
5.1.1.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	972.000.000,00	0,00	827.250.000,00	827.250.000,00	-144.750.000,00
5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.776.994,00	0,00	46.771.317,00	46.771.317,00	-5.677,00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	4.385.840.000,00	0,00	4.118.904.000,00	4.118.904.000,00	-266.936.000,00
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	75.000.000,00	0,00	49.938.900,00	49.938.900,00	-25.061.100,00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.658.043.000,00	0,00	23.578.500.188,00	23.578.500.188,00	-79.542.812,00
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.012.975.000,00	0,00	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	-8.965.000,00
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	108.981.000,00	0,00	108.015.600,00	108.015.600,00	-965.400,00
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	145.257.000,00	0,00	143.970.960,00	143.970.960,00	-1.286.040,00
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	101.298.000,00	0,00	100.401.000,00	100.401.000,00	-897.000,00
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.468.813.000,00	0,00	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	-12.998.500,00
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	10.154.000,00	0,00	10.048.500,00	10.048.500,00	-105.500,00
5.1.1.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	59.443.000,00	0,00	58.829.400,00	58.829.400,00	-613.600,00
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	0,00	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.955.100.000,00	0,00	1.940.400.000,00	1.940.400.000,00	-14.700.000,00
5.1.1.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.012.000,00	0,00	3.970.502,00	3.970.502,00	-41.498,00
5.1.1.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.076.228.000,00	0,00	6.042.639.726,00	6.042.639.726,00	-33.588.274,00
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.772.400.000,00	0,00	4.772.400.000,00	4.772.400.000,00	0,00
5.1.1.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.358.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.358.000,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	715.311.538,00	0,00	683.415.001,00	683.415.001,00	-31.896.537,00
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.088.000,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	-488.000,00
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.569.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-69.000,00
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.158.000,00	0,00	98.280.000,00	98.280.000,00	-878.000,00
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.894.000,00	0,00	7.821.360,00	7.821.360,00	-72.640,00
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	746.000,00	0,00	738.858,00	738.858,00	-7.142,00
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	0,00	1.160,00	1.160,00	-840,00
5.1.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.186.000,00	0,00	4.127.760,00	4.127.760,00	-58.240,00
5.1.1.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	86.000,00	0,00	84.240,00	84.240,00	-1.760,00
5.1.1.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	257.000,00	0,00	252.720,00	252.720,00	-4.280,00
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	509.680.000,00	0,00	491.880.495,00	491.880.495,00	-17.799.505,00
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	30.645.538,00	0,00	18.128.408,00	18.128.408,00	-12.517.130,00
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	0,00	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	0,00	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00

5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	75.850.464.554,00	0,00	62.353.467.663,70	62.353.467.663,70	-13.496.996.890,30
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	75.850.464.554,00	0,00	62.353.467.663,70	62.353.467.663,70	-13.496.996.890,30
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	511.331.196.439,51	0,00	441.067.748.046,20	441.067.748.046,20	-70.263.448.393,31
5.1.2.01	Belanja Barang	85.827.973.411,00	0,00	68.261.709.172,50	68.261.709.172,50	-17.566.264.238,50
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.716.773.411,00	0,00	68.151.426.172,50	68.151.426.172,50	-17.565.347.238,50
5.1.2.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	111.200.000,00	0,00	110.283.000,00	110.283.000,00	-917.000,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	171.194.966.937,00	0,00	141.872.827.703,70	141.872.827.703,70	-29.322.139.233,30
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	129.994.420.305,00	0,00	103.871.928.406,70	103.871.928.406,70	-26.122.491.898,30
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.841.898.592,00	0,00	21.394.899.625,00	21.394.899.625,00	-446.998.967,00
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.816.279.040,00	0,00	4.641.679.780,00	4.641.679.780,00	-1.174.599.260,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.175.210.000,00	0,00	2.498.805.000,00	2.498.805.000,00	-676.405.000,00
5.1.2.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.600.000,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	103.050.000,00	0,00	66.527.500,00	66.527.500,00	-36.522.500,00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.353.662.125,00	0,00	2.087.086.825,00	2.087.086.825,00	-266.575.300,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.650.465.000,00	0,00	1.477.336.642,00	1.477.336.642,00	-173.128.358,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.245.381.875,00	0,00	5.831.563.925,00	5.831.563.925,00	-413.817.950,00
5.1.2.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	13.052.661.170,00	0,00	12.079.233.813,00	12.079.233.813,00	-973.427.357,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.464.130.898,00	0,00	4.895.573.401,00	4.895.573.401,00	-568.557.497,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.657.159.463,00	0,00	6.444.401.312,00	6.444.401.312,00	-212.758.151,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	814.979.809,00	0,00	623.569.100,00	623.569.100,00	-191.410.709,00
5.1.2.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	116.391.000,00	0,00	115.690.000,00	115.690.000,00	-701.000,00
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	55.533.841.850,00	0,00	44.086.418.936,00	44.086.418.936,00	-11.447.422.914,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.533.841.850,00	0,00	44.086.418.936,00	44.086.418.936,00	-11.447.422.914,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.005.922.230,00	0,00	18.369.852.179,00	18.369.852.179,00	-636.070.051,00
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.130.908.800,00	0,00	10.018.875.500,00	10.018.875.500,00	-112.033.300,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.875.013.430,00	0,00	8.350.976.679,00	8.350.976.679,00	-524.036.751,00
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.824.969.359,40	0,00	65.229.417.782,00	65.229.417.782,00	3.404.448.422,60
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.824.969.359,40	0,00	65.229.417.782,00	65.229.417.782,00	3.404.448.422,60
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	104.890.861.482,11	0,00	91.168.288.460,00	91.168.288.460,00	-13.722.573.022,11
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	104.890.861.482,11	0,00	91.168.288.460,00	91.168.288.460,00	-13.722.573.022,11
5.1.3	Belanja Bunga	3.101.083.335,00	0,00	522.575.496,30	522.575.496,30	-2.578.507.838,70
5.1.3.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.101.083.335,00	0,00	522.575.496,30	522.575.496,30	-2.578.507.838,70
5.1.3.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	3.101.083.335,00	0,00	522.575.496,30	522.575.496,30	-2.578.507.838,70
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5	Belanja Hibah	51.212.868.983,00	0,00	49.515.748.913,00	49.515.748.913,00	-1.697.120.070,00
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.950.000.000,00	0,00	3.799.835.000,00	3.799.835.000,00	-150.165.000,00
5.1.5.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
5.1.5.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	0,00	1.049.835.000,00	1.049.835.000,00	-150.165.000,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.610.336.983,00	0,00	44.063.381.913,00	44.063.381.913,00	-1.546.955.070,00
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.573.640.000,00	0,00	2.548.458.113,00	2.548.458.113,00	-25.181.887,00
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	33.618.229.500,00	0,00	32.142.540.800,00	32.142.540.800,00	-1.475.688.700,00
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.418.467.483,00	0,00	9.372.383.000,00	9.372.383.000,00	-46.084.483,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.652.532.000,00	0,00	1.652.532.000,00	1.652.532.000,00	0,00
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.652.532.000,00	0,00	1.652.532.000,00	1.652.532.000,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.408.900.000,00	0,00	13.092.160.000,00	13.092.160.000,00	-316.740.000,00
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	13.408.900.000,00	0,00	13.092.160.000,00	13.092.160.000,00	-316.740.000,00
5.1.6.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	13.408.900.000,00	0,00	13.092.160.000,00	13.092.160.000,00	-316.740.000,00
5.2	BELANJA MODAL	424.063.928.529,44	0,00	225.031.272.650,61	225.031.272.650,61	-199.032.655.878,83
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.797.685.171,44	0,00	65.546.859.802,00	65.546.859.802,00	-18.250.825.369,44
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	6.812.616.000,00	0,00	3.322.371.147,00	3.322.371.147,00	-3.490.244.853,00
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	665.245.000,00	0,00	391.516.647,00	391.516.647,00	-273.728.353,00
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.147.371.000,00	0,00	2.930.854.500,00	2.930.854.500,00	-3.216.516.500,00
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.653.659.500,00	0,00	3.214.511.500,00	3.214.511.500,00	-439.148.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.560.659.500,00	0,00	3.122.361.500,00	3.122.361.500,00	-438.298.000,00
5.2.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	93.000.000,00	0,00	92.150.000,00	92.150.000,00	-850.000,00
5.2.2.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.612.100,00	0,00	38.153.900,00	38.153.900,00	-1.458.200,00
5.2.2.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.435.600,00	0,00	2.740.900,00	2.740.900,00	-694.700,00
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	36.176.500,00	0,00	35.413.000,00	35.413.000,00	-763.500,00
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	446.289.440,00	0,00	434.545.100,00	434.545.100,00	-11.744.340,00
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	446.289.440,00	0,00	434.545.100,00	434.545.100,00	-11.744.340,00

5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.541.269.958,00	0,00	5.763.219.600,00	5.763.219.600,00	-778.050.358,00
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	939.546.148,00	0,00	895.593.100,00	895.593.100,00	-43.953.048,00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.423.764.280,00	0,00	4.692.864.900,00	4.692.864.900,00	-730.899.380,00
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	177.959.530,00	0,00	174.761.600,00	174.761.600,00	-3.197.930,00
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.001.575.590,00	0,00	931.312.370,00	931.312.370,00	-1.070.263.220,00
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.799.410.720,00	0,00	740.447.200,00	740.447.200,00	-1.058.963.520,00
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	202.164.870,00	0,00	190.865.170,00	190.865.170,00	-11.299.700,00
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.823.126.297,00	0,00	22.934.358.126,00	22.934.358.126,00	-4.888.768.171,00
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	23.561.342.425,00	0,00	19.455.549.734,00	19.455.549.734,00	-4.105.792.691,00
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.261.783.872,00	0,00	3.478.808.392,00	3.478.808.392,00	-782.975.480,00
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.492.661.780,00	0,00	1.183.581.200,00	1.183.581.200,00	-309.080.580,00
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.465.901.900,00	0,00	1.156.822.000,00	1.156.822.000,00	-309.079.900,00
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	983.200,00	0,00	983.000,00	983.000,00	-200,00
5.2.2.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.298.480,00	0,00	4.298.000,00	4.298.000,00	-480,00
5.2.2.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	21.478.200,00	0,00	21.478.200,00	21.478.200,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	12.401.778.383,00	0,00	11.855.414.423,00	11.855.414.423,00	-546.363.960,00
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.492.970.560,00	0,00	10.231.513.253,00	10.231.513.253,00	-261.457.307,00
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.908.807.823,00	0,00	1.623.901.170,00	1.623.901.170,00	-284.906.653,00
5.2.2.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	27.603.200,00	0,00	27.601.600,00	27.601.600,00	-1.600,00
5.2.2.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	27.603.200,00	0,00	27.601.600,00	27.601.600,00	-1.600,00
5.2.2.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	30.600.000,00	0,00	30.502.500,00	30.502.500,00	-97.500,00
5.2.2.13.01	Belanja Modal Sumur	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.2.2.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	9.600.000,00	0,00	9.502.500,00	9.502.500,00	-97.500,00
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	69.039.000,00	0,00	69.039.000,00	69.039.000,00	0,00
5.2.2.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	68.175.000,00	0,00	68.175.000,00	68.175.000,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.03	Belanja Modal Alat SAR	864.000,00	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	77.900.000,00	0,00	77.484.000,00	77.484.000,00	-416.000,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	77.900.000,00	0,00	77.484.000,00	77.484.000,00	-416.000,00
5.2.2.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.804.333.022,00	0,00	10.056.378.919,00	10.056.378.919,00	3.252.045.897,00
5.2.2.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.804.333.022,00	0,00	10.056.378.919,00	10.056.378.919,00	3.252.045.897,00
5.2.2.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.575.620.901,44	0,00	5.608.386.417,00	5.608.386.417,00	-9.967.234.484,44
5.2.2.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.575.620.901,44	0,00	5.608.386.417,00	5.608.386.417,00	-9.967.234.484,44
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.521.298.405,00	0,00	36.000.922.323,80	36.000.922.323,80	-9.520.376.081,20
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.379.691.405,00	0,00	34.589.298.591,00	34.589.298.591,00	-6.790.392.814,00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.379.691.405,00	0,00	34.589.298.591,00	34.589.298.591,00	-6.790.392.814,00
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.075.000,00	0,00	14.043.000,00	14.043.000,00	-32.000,00
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	14.075.000,00	0,00	14.043.000,00	14.043.000,00	-32.000,00

5.2.3.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.127.532.000,00	0,00	1.397.580.732,80	1.397.580.732,80	-2.729.951.267,20
5.2.3.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.127.532.000,00	0,00	1.397.580.732,80	1.397.580.732,80	-2.729.951.267,20
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	292.339.091.663,00	0,00	121.553.150.754,81	121.553.150.754,81	-170.785.940.908,19
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	243.834.984.560,00	0,00	82.184.823.655,38	82.184.823.655,38	-161.650.160.904,62
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	234.361.484.860,00	0,00	75.365.101.262,38	75.365.101.262,38	-158.996.383.597,62
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.473.499.700,00	0,00	6.819.722.393,00	6.819.722.393,00	-2.653.777.307,00
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.846.086.323,00	0,00	23.260.810.422,00	23.260.810.422,00	-4.585.275.901,00
5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.778.492.114,00	0,00	3.824.424.000,00	3.824.424.000,00	-954.068.114,00
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	23.067.594.209,00	0,00	19.436.386.422,00	19.436.386.422,00	-3.631.207.787,00
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	17.987.806.200,00	0,00	14.672.720.777,43	14.672.720.777,43	-3.315.085.422,57
5.2.4.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	12.567.806.200,00	0,00	9.973.180.200,00	9.973.180.200,00	-2.594.626.000,00
5.2.4.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	235.000.000,00	0,00	223.799.800,00	223.799.800,00	-11.200.200,00
5.2.4.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	4.785.000.000,00	0,00	4.079.470.777,43	4.079.470.777,43	-705.529.222,57
5.2.4.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	400.000.000,00	0,00	396.270.000,00	396.270.000,00	-3.730.000,00
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	1.424.173.600,00	0,00	1.414.720.900,00	1.414.720.900,00	-9.452.700,00
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.424.173.600,00	0,00	1.414.720.900,00	1.414.720.900,00	-9.452.700,00
5.2.4.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.246.040.980,00	0,00	20.075.000,00	20.075.000,00	-1.225.965.980,00
5.2.4.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.246.040.980,00	0,00	20.075.000,00	20.075.000,00	-1.225.965.980,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.310.853.290,00	0,00	1.930.339.770,00	1.930.339.770,00	-380.513.520,00
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	768.075.000,00	0,00	632.344.870,00	632.344.870,00	-135.730.130,00
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	210.000.000,00	0,00	208.393.470,00	208.393.470,00	-1.606.530,00
5.2.5.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	558.075.000,00	0,00	423.951.400,00	423.951.400,00	-134.123.600,00
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	212.750.000,00	0,00	212.330.000,00	212.330.000,00	-420.000,00
5.2.5.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	150.000.000,00	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	-200.000,00
5.2.5.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	62.750.000,00	0,00	62.530.000,00	62.530.000,00	-220.000,00
5.2.5.05	Belanja Modal Tanaman	315.000.000,00	0,00	313.075.000,00	313.075.000,00	-1.925.000,00
5.2.5.05.01	Belanja Modal Tanaman	315.000.000,00	0,00	313.075.000,00	313.075.000,00	-1.925.000,00
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.500.000,00	0,00	65.200.000,00	65.200.000,00	-125.300.000,00
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.500.000,00	0,00	65.200.000,00	65.200.000,00	-125.300.000,00
5.2.5.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	741.849.890,00	0,00	650.669.500,00	650.669.500,00	-91.180.390,00
5.2.5.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	741.849.890,00	0,00	650.669.500,00	650.669.500,00	-91.180.390,00
5.2.5.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	82.678.400,00	0,00	56.720.400,00	56.720.400,00	-25.958.000,00
5.2.5.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	82.678.400,00	0,00	56.720.400,00	56.720.400,00	-25.958.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
5.2.6.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
5.2.6.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	0,00	2.984.686.795,00	2.984.686.795,00	-4.515.313.205,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	0,00	2.984.686.795,00	2.984.686.795,00	-4.515.313.205,00
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	0,00	2.984.686.795,00	2.984.686.795,00	-4.515.313.205,00
5.3.1.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	0,00	2.984.686.795,00	2.984.686.795,00	-4.515.313.205,00
5.4	BELANJA TRANSFER	446.772.517.346,00	0,00	435.423.072.656,00	435.423.072.656,00	-11.349.444.690,00

5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.989.068.146,00	0,00	13.213.704.857,00	13.213.704.857,00	-775.363.289,00
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.971.804.271,00	0,00	11.499.536.012,00	11.499.536.012,00	-472.268.259,00
5.4.1.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	11.971.804.271,00	0,00	11.499.536.012,00	11.499.536.012,00	-472.268.259,00
5.4.1.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.017.263.875,00	0,00	1.714.168.845,00	1.714.168.845,00	-303.095.030,00
5.4.1.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.017.263.875,00	0,00	1.714.168.845,00	1.714.168.845,00	-303.095.030,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	432.783.449.200,00	0,00	422.209.367.799,00	422.209.367.799,00	-10.574.081.401,00
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	432.783.449.200,00	0,00	422.209.367.799,00	422.209.367.799,00	-10.574.081.401,00
5.4.2.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	399.223.449.200,00	0,00	396.328.467.799,00	396.328.467.799,00	-2.894.981.401,00
5.4.2.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	33.560.000.000,00	0,00	25.880.900.000,00	25.880.900.000,00	-7.679.100.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	-259.294.671.754,72	0,00	214.635.746.142,50	214.635.746.142,50	473.930.417.897,22
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.294.671.754,72	0,00	106.962.869.446,72	106.962.869.446,72	-155.331.802.308,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	106.994.671.754,72	0,00	106.962.869.446,72	106.962.869.446,72	-31.802.308,00
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	12.184.708.852,23	0,00	12.184.708.852,23	12.184.708.852,23	0,00
6.1.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	11.780.417.672,61	0,00	11.780.417.672,61	11.780.417.672,61	0,00
6.1.1.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	1.497.347.152,50	0,00	1.497.347.152,50	1.497.347.152,50	0,00
6.1.1.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	95.296.727,20	0,00	95.296.727,20	95.296.727,20	0,00
6.1.1.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	-1.188.352.700,08	0,00	-1.188.352.700,08	-1.188.352.700,08	0,00
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-6.306.039.012,00	0,00	-11.634.473.758,00	-11.634.473.758,00	-5.328.434.746,00
6.1.1.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	-6.306.039.012,00	0,00	-1.058.510.069,00	-1.058.510.069,00	5.247.528.943,00
6.1.1.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00	0,00	-10.575.963.689,00	-10.575.963.689,00	-10.575.963.689,00
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-10.392.933.689,00	0,00	7.022.760.000,00	7.022.760.000,00	17.415.693.689,00
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah	-10.392.933.689,00	0,00	7.022.760.000,00	7.022.760.000,00	17.415.693.689,00
6.1.1.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-156.199.722.000,00	0,00	-156.199.722.000,00	-156.199.722.000,00	0,00
6.1.1.04.03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah	-155.900.802.000,00	0,00	-155.900.802.000,00	-155.900.802.000,00	0,00
6.1.1.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-298.920.000,00	0,00	-298.920.000,00	-298.920.000,00	0,00
6.1.1.05	Penghematan Belanja	243.681.539.658,97	0,00	219.172.757.222,94	219.172.757.222,94	-24.508.782.436,03
6.1.1.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	57.318.306.358,13	0,00	35.861.845.698,41	35.861.845.698,41	-21.456.460.659,72
6.1.1.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	174.041.597.099,57	0,00	170.989.275.323,26	170.989.275.323,26	-3.052.321.776,31
6.1.1.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	8.646.750.009,27	0,00	8.646.750.009,27	8.646.750.009,27	0,00
6.1.1.05.04	Sisa Belanja Transfer	3.674.886.192,00	0,00	3.674.886.192,00	3.674.886.192,00	0,00
6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	24.027.117.944,52	0,00	36.448.641.437,55	36.448.641.437,55	12.421.523.493,03
6.1.1.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	24.027.117.944,52	0,00	36.448.641.437,55	36.448.641.437,55	12.421.523.493,03
6.1.1.99	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	-31.802.308,00	-31.802.308,00	-31.802.308,00
6.1.1.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	-31.802.308,00	-31.802.308,00	-31.802.308,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	155.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000.000.000,00

6.1.4.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	155.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000.000.000,00
6.1.4.04.01	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek	155.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
6.1.5.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
6.1.5.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	259.294.671.754,72	0,00	103.962.869.446,72	103.962.869.446,72	-155.331.802.308,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	318.598.615.589,22	318.598.615.589,22	318.598.615.589,22



PEMERINTAHAN KAB. PONOROGO



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	= (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.309.844.899.124,00	2.277.811.558.806,58	98,61	2.327.251.510.061,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.359.655.300,00	321.603.082.547,58	105,32	376.702.757.475,31
4.1.01	Pajak Daerah	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	118,34	96.386.623.239,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.160.000.000,00	1.585.991.643,00	136,72	982.089.364,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.444.387.916,00	131,31	903.133.214,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	60.000.000,00	141.603.727,00	236,01	78.956.150,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.290.000.000,00	8.578.293.831,00	162,16	5.781.197.521,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	950.000.000,00	2.444.445.861,00	257,31	1.215.185.282,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000,00	67.247.500,00	168,12	53.303.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	6.066.600.470,00	141,08	4.512.709.239,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	700.000.000,00	1.050.819.082,00	150,12	244.019.785,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	580.000.000,00	866.467.973,00	149,39	140.687.705,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	120.000.000,00	184.351.109,00	153,63	103.332.080,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.175.000.000,00	1.234.998.498,00	105,11	1.253.946.562,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.060.193.276,00	106,02	1.078.145.783,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	175.000.000,00	174.805.222,00	99,89	175.800.779,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	27.600.000.000,00	32.549.110.675,00	117,93	27.388.120.100,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	27.600.000.000,00	32.549.110.675,00	117,93	27.388.120.100,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	300.000.000,00	451.368.649,00	150,46	210.244.200,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	300.000.000,00	451.368.649,00	150,46	210.244.200,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	185.000.000,00	235.044.892,00	127,05	192.744.401,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	185.000.000,00	235.044.892,00	127,05	192.744.401,00

4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	280.000.000,00	323.331.535,00	115,48	518.229.990,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	280.000.000,00	323.331.535,00	115,48	-
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	518.229.990,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	41.140.000.000,00	42.839.956.596,00	104,13	38.523.942.392,00
4.1.01.15.01	PBBP2	41.140.000.000,00	42.839.956.596,00	104,13	38.523.942.392,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.700.000.000,00	26.566.073.560,00	134,85	21.292.088.924,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	19.700.000.000,00	26.566.073.560,00	134,85	21.292.088.924,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	98,50	11.303.741.881,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.590.340.000,00	6.197.947.718,00	94,05	5.870.829.490,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	170.000.000,00	199.149.000,00	117,15	114.318.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	410.000.000,00	410.084.750,00	100,02	190.283.500,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	5.130.000,00	102,60	7.267.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	781.743.000,00	65,15	641.281.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.240.000.000,00	2.216.005.000,00	98,93	2.450.138.150,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.750.000.000,00	1.713.943.700,00	97,94	1.824.813.600,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	8.856.500,00	88,57	5.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	42.140.000,00	34.570.000,00	82,04	46.109.000,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	43.200.000,00	15.582.500,00	36,07	14.357.500,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	80.000.000,00	110.474.500,00	138,09	88.711.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	640.000.000,00	702.408.768,00	109,75	488.550.240,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.874.700.000,00	8.285.890.065,00	105,22	4.841.535.469,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.155.700.000,00	4.327.995.265,00	104,15	3.581.174.269,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33	4.775.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	24.960.000,00	26.125.000,00	104,67	26.141.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	129.850.000,00	132.431.500,00	101,99	162.116.500,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.442.190.000,00	3.678.183.000,00	106,86	953.279.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	114.500.000,00	115.655.300,00	101,01	114.049.700,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	590.500.000,00	345.742.418,00	58,55	591.376.922,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	580.000.000,00	338.364.418,00	58,34	581.461.922,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.500.000,00	7.378.000,00	70,27	9.915.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.152.503.800,00	1.229.530.107,56	106,68	1.152.503.864,60

4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.152.503.800,00	1.229.530.107,56	106,68	1.152.503.864,60
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.152.503.800,00	1.229.530.107,56	106,68	1.152.503.864,60
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	191.621.611.500,00	190.128.983.278,02	99,22	267.859.888.490,71
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	383.125.000,00	5.820.000,00	1,52	204.340.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	383.125.000,00	5.820.000,00	1,52	196.000.000,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	8.340.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.900.036.500,00	1.901.419.174,79	100,07	1.824.041.945,06
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.900.036.500,00	1.901.419.174,79	100,07	1.824.041.945,06
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.100.000.000,00	5.321.095.896,13	104,34	1.205.677.893,48
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.100.000.000,00	5.321.095.896,13	104,34	1.205.677.893,48
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	224.980.768,00	-	114.757.051,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	277.200,00	-	-
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	7.965.523,00	-	-
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	15.304.787,00	-	-
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	201.433.258,00	-	114.757.051,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	91.761.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-	91.761.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	181.768.400.000,00	178.174.169.267,62	98,02	257.553.062.877,82
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	181.768.400.000,00	178.174.169.267,62	98,02	257.553.062.877,82
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	2.170.000.000,00	2.800.389.815,84	129,05	328.273.181,93
4.1.04.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	2.170.000.000,00	2.800.389.815,84	129,05	328.273.181,93
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.050.000,00	1.701.108.355,64	566,94	6.537.974.541,42
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.050.000,00	1.701.108.355,64	566,94	6.537.974.541,42
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	305.359.655.300,00	321.603.082.547,58	105,32	376.702.757.475,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.001.485.243.824,00	1.953.208.476.259,00	97,59	1.873.404.989.586,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.814.002.127.529,00	1.745.848.348.408,00	96,24	1.701.951.788.647,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.527.428.402.529,00	1.459.274.623.408,00	95,54	1.427.372.717.647,00

4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.659.272.019,00	140.317.348.959,00	102,68	125.582.078.548,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	967.281.233.280,00	966.667.449.280,00	99,94	979.474.402.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	108.663.769.000,00	66.277.380.904,00	60,99	80.264.427.746,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	314.824.128.230,00	286.012.444.265,00	90,85	242.051.809.353,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.527.428.402.529,00	1.459.274.623.408,00	95,54	1.427.372.717.647,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	27.869.139.000,00	27.869.139.000,00	100,00	19.357.185.000,00
4.2.01.02.01	DID	27.869.139.000,00	27.869.139.000,00	100,00	19.357.185.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	258.704.586.000,00	258.704.586.000,00	100,00	255.221.886.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	258.704.586.000,00	258.704.586.000,00	100,00	255.221.886.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.483.116.295,00	207.360.127.851,00	110,60	171.453.200.939,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	139.863.477.295,00	159.522.088.851,00	114,06	161.528.475.439,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	139.863.477.295,00	159.522.088.851,00	114,06	161.528.475.439,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	47.619.639.000,00	47.838.039.000,00	100,46	9.924.725.500,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	47.619.639.000,00	47.838.039.000,00	100,46	9.924.725.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	187.483.116.295,00	207.360.127.851,00	110,60	171.453.200.939,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.001.485.243.824,00	1.953.208.476.259,00	97,59	1.873.404.989.586,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	77.143.763.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.802.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.802.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.802.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	74.341.763.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	74.341.763.000,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	74.341.763.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	77.143.763.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.309.844.899.124,00	2.277.811.558.806,58	98,61	2.327.251.510.061,31
5	BELANJA DAERAH	2.714.831.019.713,00	2.485.618.093.967,13	91,56	2.112.574.928.918,81
5.1	BELANJA OPERASI	1.671.168.985.340,00	1.564.981.524.392,85	93,65	1.449.135.896.817,20
5.1.01	Belanja Pegawai	1.021.362.594.132,00	964.740.284.897,79	94,46	944.978.499.361,70

5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	644.334.062.098,00	611.165.265.910,00	94,85	596.073.210.596,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	486.838.573.785,00	466.163.050.726,00	95,75	460.423.468.984,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	44.935.552.489,00	41.994.088.050,00	93,45	41.253.756.528,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.965.585.462,00	7.754.884.200,00	97,35	7.064.720.770,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.974.749.992,00	28.714.556.000,00	92,70	30.831.804.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.864.802.235,00	8.545.805.500,00	96,40	6.840.325.268,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.313.647.467,00	24.964.875.790,00	94,87	23.881.198.263,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.080.869.319,00	958.624.166,00	88,69	1.028.480.994,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.282.099,00	6.623.641,00	28,45	6.326.704,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.153.544.838,00	28.188.351.809,00	90,48	21.847.593.948,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.024.761.539,00	987.600.873,00	96,37	707.421.887,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.068.058.859,00	2.886.790.298,00	94,09	2.122.270.250,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.090.634.014,00	14.857,00	-	65.843.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	75.592.419.198,00	70.443.916.536,00	93,19	59.449.409.170,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	69.158.731.987,00	64.761.030.284,00	93,64	59.449.409.170,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.803.504.517,00	5.163.959.016,00	88,98	-
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	630.182.694,00	518.927.236,00	82,35	-
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	199.661.677.566,00	186.184.175.065,00	93,25	201.847.376.743,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.112.000.000,00	7.756.817.961,00	95,62	7.497.462.808,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	566.799.734,00	419.899.189,00	74,08	505.498.478,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	182.560.146.000,00	171.163.963.193,00	93,76	188.801.551.240,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.620.000.000,00	3.226.500.000,00	69,84	827.250.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	26.101.834,00	23.245.222,00	89,06	46.771.317,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.776.629.998,00	3.593.749.500,00	95,16	4.118.904.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	49.938.900,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.146.925.801,00	23.855.349.113,00	98,79	23.578.500.188,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.012.974.375,00	1.002.435.000,00	98,96	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	108.724.612,00	107.545.200,00	98,92	108.015.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.245.562,00	122.679.480,00	98,74	143.970.960,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.954.437,00	85.900.500,00	98,79	100.401.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.468.812.843,00	1.453.530.750,00	98,96	1.455.814.500,00

5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	64.692.928,00	63.874.100,00	98,73	10.048.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000,00	4.902.450,00	98,05	58.829.400,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.296.062.500,00	6.226.500.000,00	98,90	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.396.500.000,00	98,52	1.940.400.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.011.077,00	3.965.935,00	98,87	3.970.502,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	28.573,00	-	-	-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.233.171.914,00	8.133.815.698,00	98,79	6.042.639.726,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.319.237.500,00	5.253.700.000,00	98,77	4.772.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.509.480,00	-	-	-
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	857.604.115,00	777.053.895,00	90,61	683.415.001,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.400.000,00	7.531.680,00	89,66	7.821.360,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	798.000,00	747.319,00	93,65	738.858,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	1.000,00	10,00	1.160,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.580.000,00	5.503.680,00	83,64	4.127.760,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	154.000,00	112.320,00	72,94	84.240,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	434.000,00	336.960,00	77,64	252.720,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	643.081.832,00	572.569.528,00	89,04	491.880.495,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	37.622.283,00	29.727.408,00	79,02	18.128.408,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.989.000,00	100,00	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.989.000,00	100,00	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	75.917.905.354,00	71.462.535.378,79	94,13	62.353.467.663,70
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	75.917.905.354,00	71.462.535.378,79	94,13	62.353.467.663,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.732.766.358,00	514.950.717.633,06	90,23	441.026.913.046,20
5.1.02.01	Belanja Barang	101.588.488.086,00	95.544.420.969,00	94,05	68.234.874.172,50
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	101.430.102.586,00	95.386.643.969,00	94,04	68.124.591.172,50

5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	158.385.500,00	157.777.000,00	99,62	110.283.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	165.723.837.315,00	152.792.582.248,00	92,20	141.858.827.703,70
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.384.821.030,00	91.012.811.380,00	90,66	103.857.928.406,70
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.846.552.106,00	24.106.339.915,00	97,02	21.394.899.625,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	53.350.000,00	16.150.000,00	30,27	3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.942.056.808,00	8.423.827.873,00	84,73	4.641.679.780,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.645.405.000,00	5.311.806.100,00	94,09	2.498.805.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	236.200.400,00	190.900.000,00	80,82	66.527.500,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.008.796.971,00	4.927.724.850,00	98,38	2.087.086.825,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.128.905.000,00	3.906.976.130,00	94,62	1.477.336.642,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.477.750.000,00	14.896.046.000,00	96,24	5.831.563.925,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.498.048.134,00	17.747.304.894,06	95,94	12.079.233.813,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	89.000.000,00	16.597.000,00	18,65	-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.577.399.422,00	4.293.490.828,00	93,80	4.895.573.401,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.915.602.397,00	10.557.350.509,06	96,72	6.444.401.312,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.810.796.315,00	2.774.779.857,00	98,72	623.569.100,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	105.250.000,00	105.086.700,00	99,84	115.690.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.594.792.059,00	59.199.595.347,00	93,09	44.086.418.936,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.278.892.059,00	58.884.595.347,00	93,06	44.086.418.936,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	315.900.000,00	315.000.000,00	99,72	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.235.793.128,00	31.995.612.708,00	90,80	18.369.852.179,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.945.122.600,00	15.266.510.750,00	85,07	10.018.875.500,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.290.670.528,00	16.729.101.958,00	96,75	8.350.976.679,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.298.241.749,00	62.752.413.285,00	83,34	65.229.417.782,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.298.241.749,00	62.752.413.285,00	83,34	65.229.417.782,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.793.565.887,00	94.918.788.182,00	85,67	91.168.288.460,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.793.565.887,00	94.918.788.182,00	85,67	91.168.288.460,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.842.666.850,00	2.715.616.627,00	56,08	522.575.496,30
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.842.666.850,00	2.715.616.627,00	56,08	522.575.496,30
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	4.842.666.850,00	2.715.616.627,00	56,08	522.575.496,30

5.1.05	Belanja Hibah	59.811.808.000,00	68.199.755.235,00	114,02	49.515.748.913,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.660.000.000,00	5.348.779.500,00	94,50	3.799.835.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.170.000.000,00	1.970.000.000,00	90,78	2.750.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.490.000.000,00	3.378.779.500,00	96,81	1.049.835.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.499.276.000,00	61.198.443.735,00	116,57	44.063.381.913,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.141.000.000,00	3.041.000.000,00	96,82	2.548.458.113,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.339.776.000,00	43.753.587.535,00	127,41	32.142.540.800,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.018.500.000,00	14.403.856.200,00	95,91	9.372.383.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.652.532.000,00	1.652.532.000,00	100,00	1.652.532.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.652.532.000,00	1.652.532.000,00	100,00	1.652.532.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.419.150.000,00	14.375.150.000,00	99,69	13.092.160.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	728.000.000,00	684.000.000,00	93,96	-
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	728.000.000,00	684.000.000,00	93,96	-
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	13.691.150.000,00	13.691.150.000,00	100,00	13.092.160.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	13.691.150.000,00	13.691.150.000,00	100,00	13.092.160.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.671.168.985.340,00	1.564.981.524.392,85	93,65	1.449.135.896.817,20
5.2	BELANJA MODAL	516.039.855.603,00	409.783.965.468,69	79,41	225.031.272.650,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.044.777.046,00	110.262.352.305,00	90,35	65.546.859.802,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	8.537.563.200,00	8.507.444.492,00	99,65	3.322.371.147,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.509.000.000,00	1.505.992.900,00	99,80	391.516.647,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.028.563.200,00	7.001.451.592,00	99,61	2.930.854.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.457.283.272,00	5.260.530.800,00	81,47	3.214.511.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.457.283.272,00	5.260.530.800,00	81,47	3.122.361.500,00

5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	92.150.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	374.261.500,00	363.874.563,00	97,22	38.153.900,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	138.310.600,00	133.523.908,00	96,54	2.740.900,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	21.345.900,00	20.727.895,00	97,10	35.413.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	214.605.000,00	209.622.760,00	97,68	-
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	106.531.200,00	104.870.290,00	98,44	434.545.100,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	106.531.200,00	104.870.290,00	98,44	434.545.100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.974.394.965,00	4.639.458.562,00	93,27	5.763.219.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	744.089.410,00	686.930.766,00	92,32	895.593.100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.926.773.030,00	3.654.643.696,00	93,07	4.692.864.900,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	303.532.525,00	297.884.100,00	98,14	174.761.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	831.970.042,00	813.094.350,00	97,73	931.312.370,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	636.454.592,00	620.998.600,00	97,57	740.447.200,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	195.515.450,00	192.095.750,00	98,25	190.865.170,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.724.045.051,00	12.481.687.322,00	90,95	22.934.358.126,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.636.854.151,00	8.591.362.060,00	89,15	19.455.549.734,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.087.190.900,00	3.890.325.262,00	95,18	3.478.808.392,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.709.024.941,00	2.240.053.724,00	82,69	1.183.581.200,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.665.951.241,00	2.199.025.224,00	82,49	1.156.822.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	15.045.200,00	13.000.000,00	86,41	983.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	-	4.298.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	28.028.500,00	28.028.500,00	100,00	21.478.200,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.440.777.271,00	25.161.220.760,00	98,90	11.855.414.423,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.080.533.818,00	23.849.373.840,00	99,04	10.231.513.253,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.360.243.453,00	1.311.846.920,00	96,44	1.623.901.170,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.320.200,00	10.300.000,00	99,80	27.601.600,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.320.200,00	10.300.000,00	99,80	27.601.600,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	720.000,00	715.000,00	99,31	-
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	720.000,00	715.000,00	99,31	-
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	30.502.500,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	9.502.500,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	2.820.000,00	2.800.000,00	99,29	-
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	2.820.000,00	2.800.000,00	99,29	-

5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	174.029.800,00	97.923.315,00	56,27	69.039.000,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	-	-	-	68.175.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	92.039.800,00	31.435.000,00	34,15	-
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	81.990.000,00	66.488.315,00	81,09	864.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	258.400.000,00	254.654.500,00	98,55	77.484.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	258.400.000,00	254.654.500,00	98,55	77.484.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	124.726.900,00	108.970.000,00	87,37	-
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	124.726.900,00	108.970.000,00	87,37	-
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.112.482.029,00	7.440.526.855,00	81,65	10.056.378.919,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.112.482.029,00	7.440.526.855,00	81,65	10.056.378.919,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	49.199.426.675,00	42.768.227.772,00	86,93	5.608.386.417,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	49.199.426.675,00	42.768.227.772,00	86,93	5.608.386.417,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.822.628.512,00	60.246.393.744,26	62,22	36.000.922.323,80
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	85.817.123.807,00	53.467.280.888,26	62,30	34.589.298.591,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.817.123.807,00	53.467.280.888,26	62,30	34.589.298.591,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.789.705,00	25.782.200,00	99,97	14.043.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	25.789.705,00	25.782.200,00	99,97	14.043.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.979.715.000,00	6.753.330.656,00	61,51	1.397.580.732,80
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.979.715.000,00	6.753.330.656,00	61,51	1.397.580.732,80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	293.659.091.075,00	236.803.893.152,43	80,64	121.553.150.754,81
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	236.035.756.649,00	183.225.066.712,43	77,63	82.184.823.655,38
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	234.931.256.649,00	182.330.094.012,43	77,61	75.365.101.262,38
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.104.500.000,00	894.972.700,00	81,03	6.819.722.393,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	47.467.543.226,00	45.426.950.987,00	95,70	23.260.810.422,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.345.738.000,00	4.434.691.400,00	82,96	3.824.424.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	42.121.805.226,00	40.992.259.587,00	97,32	19.436.386.422,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.543.396.000,00	5.033.686.146,00	76,93	14.672.720.777,43
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.039.996.000,00	4.880.451.646,00	80,80	9.973.180.200,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	18.400.000,00	18.234.500,00	99,10	-
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	485.000.000,00	135.000.000,00	27,84	223.799.800,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	-	4.079.470.777,43
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	-	396.270.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.900.250.000,00	1.895.995.000,00	99,78	1.414.720.900,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.900.250.000,00	1.895.995.000,00	99,78	1.414.720.900,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.712.145.200,00	1.222.194.307,00	71,38	20.075.000,00

5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.712.145.200,00	1.222.194.307,00	71,38	20.075.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.392.130.345,00	2.471.326.267,00	72,85	1.930.339.770,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	276.785.053,00	272.392.300,00	98,41	632.344.870,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	15.000.000,00	14.760.300,00	98,40	208.393.470,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	261.785.053,00	257.632.000,00	98,41	423.951.400,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	391.000.000,00	353.840.000,00	90,50	212.330.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	333.000.000,00	311.840.000,00	93,65	149.800.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	58.000.000,00	42.000.000,00	72,41	62.530.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	404.000.000,00	398.478.900,00	98,63	313.075.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	404.000.000,00	398.478.900,00	98,63	313.075.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	626.000.000,00	612.245.200,00	97,80	65.200.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	626.000.000,00	612.245.200,00	97,80	65.200.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.224.345.292,00	585.293.637,00	47,80	650.669.500,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.224.345.292,00	585.293.637,00	47,80	650.669.500,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	470.000.000,00	249.076.230,00	52,99	56.720.400,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	470.000.000,00	249.076.230,00	52,99	56.720.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	121.228.625,00	-	-	-
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	121.228.625,00	-	-	-
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	121.228.625,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	516.039.855.603,00	409.783.965.468,69	79,41	225.031.272.650,61
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.163.817.245,00	468.900.997,59	4,20	2.984.686.795,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.163.817.245,00	468.900.997,59	4,20	2.984.686.795,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.163.817.245,00	468.900.997,59	4,20	2.984.686.795,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.163.817.245,00	468.900.997,59	4,20	2.984.686.795,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	11.163.817.245,00	468.900.997,59	4,20	2.984.686.795,00
5.4	BELANJA TRANSFER	516.458.361.525,00	510.383.703.108,00	98,82	435.423.072.656,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.095.956.325,00	10.819.595.408,00	97,51	13.213.704.857,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.357.580.173,00	9.357.076.675,00	99,99	11.499.536.012,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.357.580.173,00	9.357.076.675,00	99,99	11.499.536.012,00

5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.738.376.152,00	1.462.518.733,00	84,13	1.714.168.845,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.738.376.152,00	1.462.518.733,00	84,13	1.714.168.845,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	505.362.405.200,00	499.564.107.700,00	98,85	422.209.367.799,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	505.362.405.200,00	499.564.107.700,00	98,85	422.209.367.799,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	453.152.155.200,00	449.110.857.700,00	99,11	396.328.467.799,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.210.250.000,00	50.453.250.000,00	96,63	25.880.900.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	516.458.361.525,00	510.383.703.108,00	98,82	435.423.072.656,00
	JUMLAH BELANJA	2.714.831.019.713,00	2.485.618.093.967,13	91,56	2.112.574.928.918,81
	SURPLUS/DEFISIT	(404.986.120.589,00)	(207.806.535.160,55)	51,31	214.676.581.142,50
6	PEMBIAYAAN DAERAH	404.986.120.589,00	454.180.623.589,22	112,15	103.962.869.446,72
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	473.898.615.589,00	457.180.623.589,22	96,47	106.962.869.446,72
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	318.598.615.589,00	318.598.615.589,22	100,00	106.962.869.446,72
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	10.559.918.823,00	10.559.918.823,49	100,00	12.184.708.852,23
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	10.861.623.239,00	10.861.623.239,00	100,00	11.780.417.672,61
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	(631.166.052,00)	(631.166.052,00)	100,00	1.497.347.152,50
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.812.999,00	1.812.999,60	100,00	95.296.727,20
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	327.648.636,00	327.648.636,89	100,00	(1.188.352.700,08)
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	52.896.669.184,00	38.387.698.285,00	72,57	(11.634.473.758,00)
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	21.016.993.745,00	6.508.022.846,00	30,97	(1.058.510.069,00)
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	31.879.675.439,00	31.879.675.439,00	100,00	(10.575.963.689,00)
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(9.988.000,00)	(198.000.000,00)	1.982,38	144.120.000,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	(198.000.000,00)	(198.000.000,00)	100,00	144.120.000,00

6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.012.000,00	-	-	-
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	(155.331.802.308,28)	-	(156.199.722.000,00)
6.1.01.04.03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	-	(155.331.802.308,28)	-	(155.900.802.000,00)
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	(298.920.000,00)
6.1.01.05	Penghematan Belanja	121.533.887.158,00	291.544.291.301,14	239,89	224.178.228.202,54
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	71.328.518.608,00	87.538.922.751,39	122,73	40.403.236.710,01
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	32.840.610.654,00	188.140.610.654,75	572,89	171.453.355.291,26
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.515.313.205,00	4.515.313.205,00	100,00	8.646.750.009,27
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	12.849.444.690,00	11.349.444.690,00	88,33	3.674.886.192,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	(31.802.308,00)
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	(31.802.308,00)
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	133.618.128.423,00	133.636.509.487,87	100,01	38.321.810.457,95
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	133.347.279.352,00	133.365.660.417,87	100,01	36.448.641.437,55
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	270.849.070,00	270.849.070,00	100,00	1.873.169.020,40
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	155.000.000.000,00	138.582.008.000,00	89,41	-
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	155.000.000.000,00	138.582.008.000,00	89,41	-
6.1.04.01.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	155.000.000.000,00	138.582.008.000,00	89,41	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	-	-	-
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	-	-	-
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	300.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	473.898.615.589,00	457.180.623.589,22	96,47	106.962.869.446,72
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	68.912.495.000,00	3.000.000.000,00	4,35	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.912.495.000,00	-	-	-

6.2.05.01	Pinjaman melalui BLUD	65.912.495.000,00	-	-	-
6.2.05.01.01	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	65.912.495.000,00	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	68.912.495.000,00	3.000.000.000,00	4,35	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	404.986.120.589,00	454.180.623.589,22	112,15	103.962.869.446,72
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	246.374.088.428,67	-	318.639.450.589,22

Kab. Ponorogo, 08 Januari 2025
 IDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.
 NIP. 196212011990031010

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. PONOROGO



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.295.031.237.938,00	2.321.854.032.082,36	101,17	2.277.811.558.806,58
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333.122.055.648,00	363.451.938.328,36	109,10	321.603.082.547,58
4.1.01	Pajak Daerah	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	111,72	115.414.988.961,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	2.006.782.688,00	124,64	1.585.991.643,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.510.000.000,00	1.819.062.690,00	120,47	1.444.387.916,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	100.000.000,00	187.719.998,00	187,72	141.603.727,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.660.000.000,00	9.342.850.311,00	140,28	8.578.293.831,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.949.983.421,00	118,00	2.444.445.861,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	60.000.000,00	80.569.410,00	134,28	67.247.500,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.100.000.000,00	6.312.297.480,00	153,96	6.066.600.470,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	910.000.000,00	1.165.571.128,00	128,08	1.050.819.082,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	710.000.000,00	894.705.602,00	126,01	866.467.973,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000,00	270.865.526,00	135,43	184.351.109,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.130.000.000,00	1.304.638.548,00	115,45	1.234.998.498,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.116.680.675,00	111,67	1.060.193.276,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	130.000.000,00	187.957.873,00	144,58	174.805.222,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	33.525.583.995,00	35.298.792.083,00	105,29	32.549.110.675,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	33.525.583.995,00	35.298.792.083,00	105,29	32.549.110.675,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	450.000.000,00	583.815.505,00	129,74	451.368.649,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	450.000.000,00	583.815.505,00	129,74	451.368.649,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	315.000.000,00	411.410.500,00	130,61	235.044.892,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	315.000.000,00	411.410.500,00	130,61	235.044.892,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	320.982.195,00	106,99	323.331.535,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	300.000.000,00	320.982.195,00	106,99	323.331.535,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.140.000.000,00	46.465.565.296,00	102,94	42.839.956.596,00

4.1.01.15.01	PBBP2	45.140.000.000,00	46.465.565.296,00	102,94	42.839.956.596,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.350.000.000,00	30.891.829.762,00	126,87	26.566.073.560,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	24.350.000.000,00	30.891.829.762,00	126,87	26.566.073.560,00
4.1.02	Retribusi Daerah	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	100,44	14.829.580.201,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.302.994.500,00	8.039.814.884,00	96,83	6.197.947.718,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	215.104.500,00	107,55	199.149.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	570.240.000,00	521.387.500,00	91,43	410.084.750,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.000.000,00	5.130.000,00	73,29	5.130.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.650.000.000,00	1.296.452.000,00	78,57	781.743.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.005.000.000,00	3.040.461.417,00	101,18	2.216.005.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.750.000.000,00	1.707.636.500,00	97,58	1.713.943.700,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	11.213.000,00	112,13	8.856.500,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.782.000,00	61.380.000,00	166,88	34.570.000,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	43.972.500,00	17.192.500,00	39,10	15.582.500,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	80.000.000,00	105.228.500,00	131,54	110.474.500,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	950.000.000,00	1.058.628.967,00	111,43	702.408.768,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.886.515.500,00	10.750.958.660,00	108,74	8.285.890.065,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.974.055.500,00	5.039.412.260,00	101,31	4.327.995.265,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.500.000,00	6.750.000,00	90,00	5.500.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	24.960.000,00	41.701.000,00	167,07	26.125.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	219.500.000,00	234.934.000,00	107,03	132.431.500,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.500.000.000,00	5.310.877.000,00	118,02	3.678.183.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.500.000,00	117.284.400,00	73,07	115.655.300,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.010.500.000,00	492.804.298,00	48,77	345.742.418,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	483.592.298,00	48,36	338.364.418,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.500.000,00	9.212.000,00	87,73	7.378.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.513.121.791,00	3.513.121.790,64	100,00	1.229.530.107,56
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.513.121.791,00	3.513.121.790,64	100,00	1.229.530.107,56
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.513.121.791,00	3.513.121.790,64	100,00	1.229.530.107,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	196.018.339.862,00	212.863.000.679,72	108,59	190.128.983.278,02
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.390.320.273,00	2.549.238.773,00	75,19	5.820.000,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	3.382.320.273,00	-	-	-
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	363.918.500,00	4.548,98	5.820.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	2.182.320.273,00	-	-

4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	3.000.000,00	-	-
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.009.319.033,88	100,93	1.901.419.174,79
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.009.319.033,88	100,93	1.901.419.174,79
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.198.310.885,00	5.803.357.234,99	138,23	5.321.095.896,13
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.198.310.885,00	5.803.357.234,99	138,23	5.321.095.896,13
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	224.980.768,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	277.200,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	-	-	7.965.523,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	-	15.304.787,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	-	201.433.258,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	186.552.211.962,00	202.073.545.711,39	108,32	178.174.169.267,62
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	186.552.211.962,00	202.073.545.711,39	108,32	178.174.169.267,62
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	368.610.555,00	732.890.407,27	198,83	2.800.389.815,84
4.1.04.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	368.610.555,00	732.890.407,27	198,83	2.800.389.815,84
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	508.886.187,00	694.649.519,19	136,50	1.701.108.355,64
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	508.886.187,00	694.649.519,19	136,50	1.701.108.355,64
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	333.122.055.648,00	363.451.938.328,36	109,10	321.603.082.547,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.958.909.182.290,00	1.955.498.093.754,00	99,83	1.953.208.476.259,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.759.536.178.107,00	1.734.617.066.322,00	98,58	1.745.848.348.408,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.496.093.790.107,00	1.471.174.678.322,00	98,33	1.459.274.623.408,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	110.426.738.107,00	103.984.617.794,00	94,17	140.317.348.959,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.013.756.006.000,00	1.017.205.907.209,00	100,34	966.667.449.280,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.438.372.000,00	47.966.673.563,00	97,02	66.277.380.904,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	322.472.674.000,00	302.017.479.756,00	93,66	286.012.444.265,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.496.093.790.107,00	1.471.174.678.322,00	98,33	1.459.274.623.408,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	27.869.139.000,00
4.2.01.02.01	DID	-	-	-	27.869.139.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	263.442.388.000,00	263.442.388.000,00	100,00	258.704.586.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	263.442.388.000,00	263.442.388.000,00	100,00	258.704.586.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	263.442.388.000,00	263.442.388.000,00	100,00	286.573.725.000,00

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	199.373.004.183,00	220.881.027.432,00	110,79	207.360.127.851,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	169.649.835.462,00	191.157.858.711,00	112,68	159.522.088.851,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169.649.835.462,00	191.157.858.711,00	112,68	159.522.088.851,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.723.168.721,00	29.723.168.721,00	100,00	47.838.039.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	29.723.168.721,00	29.723.168.721,00	100,00	47.838.039.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	199.373.004.183,00	220.881.027.432,00	110,79	207.360.127.851,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.958.909.182.290,00	1.955.498.093.754,00	99,83	1.953.208.476.259,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.295.031.237.938,00	2.321.854.032.082,36	101,17	2.277.811.558.806,58
5	BELANJA DAERAH	2.557.282.310.196,00	2.485.516.805.191,79	97,19	2.485.618.093.967,13
5.1	BELANJA OPERASI	1.702.496.862.378,00	1.649.887.894.554,79	96,91	1.564.981.524.392,85
5.1.01	Belanja Pegawai	1.022.094.971.012,00	989.030.309.678,40	96,77	964.740.284.897,79
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	639.856.043.855,00	613.268.745.605,00	95,84	611.165.265.910,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	486.461.673.351,00	470.367.878.374,00	96,69	466.163.050.726,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	45.459.979.462,00	42.844.071.002,00	94,25	41.994.088.050,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.344.211.992,00	7.258.162.444,00	98,83	7.754.884.200,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.076.220.000,00	26.928.933.000,00	99,46	28.714.556.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.204.198.982,00	10.340.866.650,00	92,29	8.545.805.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.685.510.820,00	25.855.627.011,00	93,39	24.964.875.790,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	851.705.349,00	841.696.096,00	98,82	958.624.166,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.466.577,00	6.971.927,00	32,48	6.623.641,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.345.863.965,00	24.954.397.817,00	85,04	28.188.351.809,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.058.233.276,00	967.518.497,00	91,43	987.600.873,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.137.932.081,00	2.902.622.787,00	92,50	2.886.790.298,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	209.048.000,00	-	-	14.857,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.863.795.341,00	77.322.566.942,00	98,05	70.443.916.536,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	68.619.231.704,00	67.292.984.361,00	98,07	64.761.030.284,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.211.169.668,00	9.026.038.179,00	97,99	5.163.959.016,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.033.393.969,00	1.003.544.402,00	97,11	518.927.236,00

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	192.921.794.096,00	190.262.806.339,00	98,62	186.184.175.065,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.431.734.514,00	4.430.955.035,00	99,98	7.756.817.961,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	641.333.586,00	579.062.380,00	90,29	419.899.189,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	178.028.156.000,00	175.662.108.900,00	98,67	171.163.963.193,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.255.000.000,00	5.188.750.000,00	98,74	3.226.500.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	23.245.222,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.565.569.996,00	4.401.930.024,00	96,42	3.593.749.500,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.253.632.401,00	26.197.140.567,00	99,78	23.855.349.113,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.005.000.000,00	1.004.010.000,00	99,90	1.002.435.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	108.300.000,00	106.736.700,00	98,56	107.545.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	123.600.000,00	122.172.540,00	98,85	122.679.480,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.400.000,00	86.058.000,00	99,60	85.900.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.453.530.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.000.000,00	68.877.900,00	95,66	63.874.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	-	-	-	4.902.450,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	6.226.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.940.400.000,00	97,78	1.396.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.257.249,00	3.970.503,00	93,26	3.965.935,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	29.000,00	-	-	-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.110.143.272,00	7.107.487.044,00	99,96	8.133.815.698,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.353.588.380,00	6.352.588.380,00	99,98	5.253.700.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.000.000,00	11.025.000,00	91,88	-
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.045.852.280,00	910.038.113,00	87,01	777.053.895,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	100,00	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.400.000,00	7.531.680,00	89,66	7.531.680,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	798.000,00	747.319,00	93,65	747.319,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.580.000,00	5.503.680,00	83,64	5.503.680,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	154.000,00	112.320,00	72,94	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	434.000,00	336.960,00	77,64	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	711.802.764,00	704.771.642,00	99,01	572.569.528,00

5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	157.149.516,00	30.509.512,00	19,41	29.727.408,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.111.457,00	100,00	851.989.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.991.457,00	100,00	599.989.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	82.160.733.039,00	80.075.900.655,40	97,46	71.462.535.378,79
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	82.160.733.039,00	80.075.900.655,40	97,46	71.462.535.378,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.157.405.267,00	545.315.167.082,39	94,81	514.950.717.633,06
5.1.02.01	Belanja Barang	110.336.076.739,00	106.275.284.025,00	96,32	95.544.420.969,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.294.602.239,00	106.233.928.525,00	96,32	95.386.643.969,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	41.474.500,00	41.355.500,00	99,71	157.777.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	169.060.825.032,00	160.622.849.532,00	95,01	152.792.582.248,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.508.334.763,00	97.809.087.465,00	94,49	91.012.811.380,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	28.470.008.056,00	27.023.169.986,00	94,92	24.106.339.915,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	16.150.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.861.169.189,00	10.207.384.765,00	93,98	8.423.827.873,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.688.586.800,00	3.509.854.800,00	95,15	5.311.806.100,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	301.052.500,00	276.500.000,00	91,84	190.900.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.978.008.394,00	2.923.365.687,00	98,17	4.927.724.850,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.312.378.330,00	3.278.842.329,00	98,99	3.906.976.130,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.833.287.000,00	15.486.644.500,00	97,81	14.896.046.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.819.977.166,00	15.426.803.498,99	97,51	17.747.304.894,06
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	16.597.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.603.224.663,00	4.407.908.039,00	95,76	4.293.490.828,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.183.139.707,00	9.004.453.021,99	98,05	10.557.350.509,06
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.978.612.796,00	1.959.542.438,00	99,04	2.774.779.857,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	55.000.000,00	54.900.000,00	99,82	105.086.700,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.677.522.998,00	64.494.461.347,00	95,30	59.199.595.347,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.677.522.998,00	64.494.461.347,00	95,30	58.884.595.347,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	315.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.746.893.105,00	36.272.535.959,00	98,71	31.995.612.708,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.882.904.776,00	24.842.708.500,00	99,84	15.266.510.750,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.863.988.329,00	11.429.827.459,00	96,34	16.729.101.958,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	73.292.023.800,00	66.063.442.346,40	90,14	62.752.413.285,00

5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	73.292.023.800,00	66.063.442.346,40	90,14	62.752.413.285,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	102.224.086.427,00	96.159.790.374,00	94,07	94.918.788.182,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	102.224.086.427,00	96.159.790.374,00	94,07	94.918.788.182,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.263.054.000,00	8.248.550.213,00	99,82	2.715.616.627,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.263.054.000,00	8.248.550.213,00	99,82	2.715.616.627,00
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	8.263.054.000,00	8.248.550.213,00	99,82	2.715.616.627,00
5.1.05	Belanja Hibah	86.131.132.099,00	96.443.567.581,00	111,97	68.199.755.235,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.481.660.000,00	27.823.163.000,00	97,69	5.348.779.500,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.331.660.000,00	27.673.460.000,00	97,68	1.970.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	149.703.000,00	99,80	3.378.779.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.996.940.099,00	66.967.872.581,00	119,59	61.198.443.735,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.690.123.900,00	5.548.475.000,00	97,51	3.041.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	37.240.400.838,00	48.506.375.589,00	130,25	43.753.587.535,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.751.415.361,00	12.598.021.992,00	98,80	14.403.856.200,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	-
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.652.532.000,00	1.652.532.000,00	100,00	1.652.532.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.652.532.000,00	1.652.532.000,00	100,00	1.652.532.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.850.300.000,00	10.850.300.000,00	100,00	14.375.150.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	684.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	684.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.250.300.000,00	10.250.300.000,00	100,00	13.691.150.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.250.300.000,00	10.250.300.000,00	100,00	13.691.150.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.702.496.862.378,00	1.649.887.894.554,79	96,91	1.564.981.524.392,85

5.2	BELANJA MODAL	348.580.275.064,00	331.663.316.815,00	95,15	409.783.965.468,69
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.544.968.210,00	90.974.856.204,00	89,59	110.262.352.305,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.107.240.440,00	2.051.421.750,00	97,35	8.507.444.492,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.000.000.000,00	972.400.000,00	97,24	1.505.992.900,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.107.240.440,00	1.079.021.750,00	97,45	7.001.451.592,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.125.654.722,00	6.824.170.000,00	95,77	5.260.530.800,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.919.014.722,00	6.627.170.000,00	95,78	5.260.530.800,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	206.640.000,00	197.000.000,00	95,33	-
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	92.890.500,00	85.899.000,00	92,47	363.874.563,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	67.371.100,00	61.037.000,00	90,60	133.523.908,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.953.600,00	5.912.000,00	99,30	20.727.895,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	19.565.800,00	18.950.000,00	96,85	209.622.760,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	93.929.300,00	87.275.800,00	92,92	104.870.290,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	93.929.300,00	87.275.800,00	92,92	104.870.290,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.038.318.487,00	4.660.219.495,00	92,50	4.639.458.562,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	866.229.400,00	851.382.850,00	98,29	686.930.766,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.098.431.187,00	3.736.986.645,00	91,18	3.654.643.696,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.657.900,00	71.850.000,00	97,55	297.884.100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.715.881.601,00	1.691.007.200,00	98,55	813.094.350,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.432.082.601,00	1.419.900.700,00	99,15	620.998.600,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	283.799.000,00	271.106.500,00	95,53	192.095.750,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.408.759.561,00	14.717.221.108,00	84,54	12.481.687.322,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.304.434.461,00	13.622.523.108,00	83,55	8.591.362.060,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.104.325.100,00	1.094.698.000,00	99,13	3.890.325.262,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.593.788.928,00	5.218.543.778,00	93,29	2.240.053.724,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.748.828.523,00	4.472.055.023,00	94,17	2.199.025.224,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.574.000,00	1.928.000,00	74,90	13.000.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	842.386.405,00	744.560.755,00	88,39	-
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-	-	28.028.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.075.897.796,00	14.205.360.050,00	88,36	25.161.220.760,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.196.470.796,00	13.377.735.800,00	88,03	23.849.373.840,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	879.427.000,00	827.624.250,00	94,11	1.311.846.920,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	42.424.552,00	42.421.400,00	99,99	10.300.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	42.424.552,00	42.421.400,00	99,99	10.300.000,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	715.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	-	-	-	715.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	21.000.000,00	-	-	6.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	21.000.000,00	-	-	6.000.000,00

5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	2.800.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	2.800.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	342.373.000,00	337.821.500,00	98,67	97.923.315,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	300.473.000,00	296.121.500,00	98,55	-
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	22.700.000,00	22.600.000,00	99,56	31.435.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	19.200.000,00	19.100.000,00	99,48	66.488.315,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	178.000.000,00	176.050.000,00	98,90	254.654.500,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	178.000.000,00	176.050.000,00	98,90	254.654.500,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	108.970.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	108.970.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.258.454.898,00	5.592.979.058,00	60,41	7.440.526.855,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.258.454.898,00	5.592.979.058,00	60,41	7.440.526.855,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	36.444.854.425,00	35.278.966.065,00	96,80	42.768.227.772,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	36.444.854.425,00	35.278.966.065,00	96,80	42.768.227.772,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.835.096.010,00	127.080.659.144,00	98,64	60.246.393.744,26
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.331.604.639,00	105.089.242.160,00	98,83	53.467.280.888,26
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.331.604.639,00	105.089.242.160,00	98,83	53.467.280.888,26
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	25.782.200,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	25.782.200,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.503.491.371,00	21.991.416.984,00	97,72	6.753.330.656,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.503.491.371,00	21.991.416.984,00	97,72	6.753.330.656,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.316.049.718,00	109.544.048.568,00	96,67	236.803.893.152,43
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.463.905.821,00	71.048.840.973,00	96,71	183.225.066.712,43
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.230.527.846,00	67.855.066.287,00	96,62	182.330.094.012,43
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.233.377.975,00	3.193.774.686,00	98,78	894.972.700,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	35.893.967.451,00	35.718.059.945,00	99,51	45.426.950.987,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.612.157.400,00	2.546.177.850,00	97,47	4.434.691.400,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	33.281.810.051,00	33.171.882.095,00	99,67	40.992.259.587,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	876.600.000,00	574.991.600,00	65,59	5.033.686.146,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	75.000.000,00	74.991.600,00	99,99	4.880.451.646,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	801.600.000,00	500.000.000,00	62,38	18.234.500,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	135.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.197.500.000,00	1.146.929.000,00	95,78	1.895.995.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.197.500.000,00	1.146.929.000,00	95,78	1.895.995.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.884.076.446,00	1.055.227.050,00	56,01	1.222.194.307,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.884.076.446,00	1.055.227.050,00	56,01	1.222.194.307,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.826.461.126,00	4.063.752.899,00	84,20	2.471.326.267,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	290.880.484,00	289.519.500,00	99,53	272.392.300,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	191.875.000,00	190.984.000,00	99,54	14.760.300,00

5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	99.005.484,00	98.535.500,00	99,53	257.632.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.272.830.000,00	1.272.010.000,00	99,94	353.840.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	54.010.000,00	54.010.000,00	100,00	311.840.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	1.218.820.000,00	1.218.000.000,00	99,93	42.000.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	259.400.000,00	257.495.000,00	99,27	398.478.900,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	259.400.000,00	257.495.000,00	99,27	398.478.900,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	684.789.340,00	680.422.500,00	99,36	612.245.200,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	684.789.340,00	680.422.500,00	99,36	612.245.200,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.097.061.302,00	1.347.145.899,00	64,24	585.293.637,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.097.061.302,00	1.347.145.899,00	64,24	585.293.637,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	221.500.000,00	217.160.000,00	98,04	249.076.230,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	221.500.000,00	217.160.000,00	98,04	249.076.230,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	57.700.000,00	-	-	-
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	57.700.000,00	-	-	-
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	57.700.000,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	348.580.275.064,00	331.663.316.815,00	95,15	409.783.965.468,69
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.855.987.229,00	11.244.018.883,00	94,84	468.900.997,59
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.855.987.229,00	11.244.018.883,00	94,84	468.900.997,59
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.855.987.229,00	11.244.018.883,00	94,84	468.900.997,59
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.855.987.229,00	11.244.018.883,00	94,84	468.900.997,59
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	11.855.987.229,00	11.244.018.883,00	94,84	468.900.997,59
5.4	BELANJA TRANSFER	494.349.185.525,00	492.721.574.939,00	99,67	510.383.703.108,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.395.956.325,00	4.238.493.005,00	96,42	10.819.595.408,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.927.106.982,00	3.778.073.662,00	96,21	9.357.076.675,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.927.106.982,00	3.778.073.662,00	96,21	9.357.076.675,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	468.849.343,00	460.419.343,00	98,20	1.462.518.733,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	468.849.343,00	460.419.343,00	98,20	1.462.518.733,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	489.953.229.200,00	488.483.081.934,00	99,70	499.564.107.700,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	489.953.229.200,00	488.483.081.934,00	99,70	499.564.107.700,00

5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	443.784.229.200,00	442.719.081.934,00	99,76	449.110.857.700,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	46.169.000.000,00	45.764.000.000,00	99,12	50.453.250.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	494.349.185.525,00	492.721.574.939,00	99,67	510.383.703.108,00
	JUMLAH BELANJA	2.557.282.310.196,00	2.485.516.805.191,79	97,19	2.485.618.093.967,13
	SURPLUS/DEFISIT	(262.251.072.258,00)	(163.662.773.109,43)	62,41	(207.806.535.160,55)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	262.251.072.257,00	241.893.488.558,67	92,24	454.180.623.589,22
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	271.674.088.427,00	247.877.088.428,67	91,24	457.180.623.589,22
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	246.374.088.427,00	246.374.088.428,67	100,00	318.598.615.589,22
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	19.837.657.972,00	19.837.657.979,96	100,00	10.559.918.823,49
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	17.884.988.954,00	17.884.988.961,00	100,00	10.861.623.239,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	(225.959.799,00)	(225.959.799,00)	100,00	(631.166.052,00)
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	77.026.307,00	77.026.307,56	100,00	1.812.999,60
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	2.101.602.510,00	2.101.602.510,40	100,00	327.648.636,89
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(33.457.934.850,00)	(33.457.934.850,00)	100,00	38.387.698.285,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	(53.334.946.406,00)	(53.334.946.406,00)	100,00	6.508.022.846,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	19.877.011.556,00	19.877.011.556,00	100,00	31.879.675.439,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	(198.000.000,00)
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	-	-	-	(198.000.000,00)
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(16.717.992.000,00)	(16.717.992.000,00)	100,00	(155.331.802.308,28)
6.1.01.04.03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	(16.417.992.000,00)	(16.417.992.000,00)	100,00	(155.331.802.308,28)
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)	100,00	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	182.536.256.237,00	182.536.256.232,61	100,00	291.544.291.301,14
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	73.311.484.802,00	73.311.484.797,89	100,00	87.538.922.751,39
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	92.455.196.770,00	92.455.196.770,31	100,00	188.140.610.654,75
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.694.916.247,00	10.694.916.247,41	100,00	4.515.313.205,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	6.074.658.417,00	6.074.658.417,00	100,00	11.349.444.690,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	94.176.101.067,00	94.176.101.066,10	100,00	133.636.509.487,87

6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	94.138.098.488,00	94.138.098.487,70	100,00	133.365.660.417,87
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	38.002.578,00	38.002.578,40	100,00	270.849.070,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	-	-	-
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	-	-	-
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	138.582.008.000,00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	138.582.008.000,00
6.1.04.01.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	-	-	-	138.582.008.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	1.503.000.000,00	501,00	-
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	-	198.000.000,00	-	-
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	-	198.000.000,00	-	-
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	1.305.000.000,00	435,00	-
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	-	-	-
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	1.305.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	271.674.088.427,00	247.877.088.428,67	91,24	457.180.623.589,22
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.423.016.170,00	5.983.599.870,00	63,50	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	96,80	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.423.016.170,00	3.079.599.870,00	47,95	-
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.423.016.170,00	3.079.599.870,00	47,95	-
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	6.423.016.170,00	3.079.599.870,00	47,95	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.423.016.170,00	5.983.599.870,00	63,50	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	262.251.072.257,00	241.893.488.558,67	92,24	454.180.623.589,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	78.230.715.449,24	-	246.374.088.428,67

Kab. Ponorogo, 09 Januari 2025
 ENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DA

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.
 NIP. 196212011990031010



PEMERINTAHAN KAB. PONOROGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

DIRINCI BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN DAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.468.440.450.918,76	2.459.752.144.115,27	99,65	2.321.854.032.082,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384.411.812.918,76	379.425.932.137,27	98,70	363.451.938.328,36
4.1.01	Pajak Daerah	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	108,27	127.792.238.016,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.725.000.000,00	1.837.972.304,00	106,55	2.006.782.688,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.580.000.000,00	1.651.419.076,00	104,52	1.819.062.690,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	145.000.000,00	186.553.228,00	128,66	187.719.998,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.006.200.000,00	10.450.585.246,00	130,53	9.342.850.311,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.651.200.000,00	4.224.935.920,00	115,71	2.949.983.421,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	205.000.000,00	177.065.058,00	86,37	80.569.410,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.150.000.000,00	6.048.584.268,00	145,75	6.312.297.480,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.125.000.000,00	1.147.855.812,00	102,03	1.165.571.128,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	800.000.000,00	826.877.145,00	103,36	894.705.602,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	325.000.000,00	320.978.667,00	98,76	270.865.526,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.624.134.584,00	116,01	1.304.638.548,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.200.000.000,00	1.370.132.168,00	114,18	1.116.680.675,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	254.002.416,00	127,00	187.957.873,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	38.581.318.684,76	39.112.085.806,00	101,38	35.298.792.083,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	38.581.318.684,76	39.112.085.806,00	101,38	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	35.298.792.083,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	420.000.000,00	461.076.668,00	109,78	583.815.505,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	420.000.000,00	461.076.668,00	109,78	583.815.505,00

4.1.01.12	Pajak Air Tanah	546.000.000,00	719.775.157,00	131,83	411.410.500,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	546.000.000,00	719.775.157,00	131,83	411.410.500,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	65.000.000,00	96.693.495,00	148,76	320.982.195,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	65.000.000,00	96.693.495,00	148,76	320.982.195,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	47.500.000.000,00	51.023.531.443,00	107,42	46.465.565.296,00
4.1.01.15.01	PBBP2	47.500.000.000,00	51.023.531.443,00	107,42	46.465.565.296,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.120.000.000,00	26.150.320.822,00	113,11	30.891.829.762,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	23.120.000.000,00	26.150.320.822,00	113,11	30.891.829.762,00
4.1.02	Retribusi Daerah	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	93,59	19.283.577.842,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	234.558.063.255,00	219.703.685.363,48	93,67	8.039.814.884,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	225.922.020.255,00	212.584.770.151,48	94,10	215.104.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	821.818.000,00	851.317.650,00	103,59	521.387.500,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00	1.866.915.000,00	93,35	1.296.452.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.706.001.000,00	4.302.802.562,00	75,41	3.040.461.417,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.707.636.500,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	11.213.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.224.000,00	84.945.000,00	132,26	61.380.000,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	44.000.000,00	12.935.000,00	29,40	17.192.500,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	105.228.500,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.058.628.967,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.203.769.000,00	11.728.245.780,00	88,82	10.750.958.660,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.533.638.000,00	5.387.891.780,00	97,37	5.039.412.260,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	12.600.000,00	11.040.000,00	87,62	6.750.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	41.701.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.056.743.000,00	557.349.500,00	52,74	234.934.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.242.000.000,00	5.392.261.000,00	86,39	5.310.877.000,00

4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	131.288.000,00	141.493.500,00	107,77	117.284.400,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	227.500.000,00	238.210.000,00	104,71	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.800.000.000,00	2.130.323.349,00	118,35	492.804.298,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	483.592.298,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	9.212.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.800.000.000,00	2.130.323.349,00	118,35	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.883.367.866,00	1.283.367.866,44	68,14	3.513.121.790,64
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.883.367.866,00	1.283.367.866,44	68,14	3.513.121.790,64
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.883.367.866,00	1.283.367.866,44	68,14	3.513.121.790,64
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.478.094.113,00	11.956.278.441,35	114,11	212.863.000.679,72
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.300.000.000,00	2.145.378.647,00	93,28	2.549.238.773,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.300.000.000,00	2.145.378.647,00	93,28	363.918.500,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.182.320.273,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	700.000.000,00	541.043.254,74	77,29	1.009.319.033,88
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00	541.043.254,74	77,29	1.009.319.033,88
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.250.000.000,00	3.766.623.943,37	115,90	5.803.357.234,99
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.250.000.000,00	3.766.623.943,37	115,90	5.803.357.234,99
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	3.045.426.997,73	-	202.073.545.711,39
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	3.045.426.997,73	-	202.073.545.711,39
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.462.209.332,00	1.519.216.748,48	103,90	732.890.407,27
4.1.04.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1.462.209.332,00	1.519.216.748,48	103,90	732.890.407,27
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.305.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.305.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.460.884.781,00	938.588.850,03	64,25	694.649.519,19
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.460.884.781,00	938.588.850,03	64,25	694.649.519,19
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	384.411.812.918,76	379.425.932.137,27	98,70	363.451.938.328,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.084.028.638.000,00	2.080.326.211.978,00	99,82	1.955.498.093.754,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.894.603.723.000,00	1.877.197.801.330,00	99,08	1.734.617.066.322,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.594.905.645.000,00	1.577.515.723.330,00	98,91	1.471.174.678.322,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	98.092.119.000,00	101.324.266.000,00	103,30	103.984.617.794,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.112.856.691.000,00	1.100.289.009.340,00	98,87	1.017.205.907.209,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.011.608.000,00	60.940.988.900,00	98,27	47.966.673.563,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	321.945.227.000,00	314.961.459.090,00	97,83	302.017.479.756,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.594.905.645.000,00	1.577.515.723.330,00	98,91	1.471.174.678.322,00
4.2.01.05	Dana Desa	265.671.564.000,00	265.655.564.000,00	99,99	263.442.388.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	265.671.564.000,00	265.655.564.000,00	99,99	263.442.388.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	34.026.514.000,00	34.026.514.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	34.026.514.000,00	34.026.514.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	299.698.078.000,00	299.682.078.000,00	199,99	263.442.388.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	189.424.915.000,00	203.128.410.648,00	107,23	220.881.027.432,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	179.931.700.000,00	193.635.195.648,00	107,62	191.157.858.711,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	179.931.700.000,00	193.635.195.648,00	107,62	191.157.858.711,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.493.215.000,00	9.493.215.000,00	100,00	29.723.168.721,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.493.215.000,00	9.493.215.000,00	100,00	29.723.168.721,00

	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	189.424.915.000,00	203.128.410.648,00	107,23	220.881.027.432,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.084.028.638.000,00	2.080.326.211.978,00	99,82	1.955.498.093.754,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.468.440.450.918,76	2.459.752.144.115,27	99,65	2.321.854.032.082,36
5	BELANJA DAERAH	2.522.912.122.919,00	2.438.221.649.521,27	96,64	2.485.516.805.191,79
5.1	BELANJA OPERASI	1.807.696.003.064,00	1.749.655.782.422,27	96,79	1.649.887.894.554,79
5.1.01	Belanja Pegawai	1.124.344.816.142,00	1.085.848.064.396,00	96,58	989.030.309.678,40
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	692.966.310.181,00	666.818.013.870,00	96,23	613.268.745.605,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	529.798.420.457,00	515.950.296.341,00	97,39	470.367.878.374,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.042.921.784,00	47.639.384.853,00	95,20	42.844.071.002,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.839.456.503,00	7.366.939.520,00	93,97	7.258.162.444,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.014.446.000,00	26.564.239.360,00	94,82	26.928.933.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.989.198.337,00	11.218.871.277,00	80,20	10.340.866.650,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.393.089.174,00	27.114.836.980,00	89,21	25.855.627.011,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.136.113.582,00	1.115.868.523,00	98,22	841.696.096,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.566.034,00	7.164.062,00	74,89	6.971.927,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.133.166.480,00	25.595.537.989,00	94,33	24.954.397.817,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.198.137.000,00	1.060.785.722,00	88,54	967.518.497,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.411.794.830,00	3.184.089.243,00	93,33	2.902.622.787,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	74.555.893.483,00	72.983.696.642,00	97,89	77.322.566.942,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	66.931.446.003,00	65.479.917.462,00	97,83	67.292.984.361,00

5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.405.799.000,00	6.336.298.512,00	98,92	9.026.038.179,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.218.648.480,00	1.167.480.668,00	95,80	1.003.544.402,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.529.931.833,00	216.793.867.828,00	97,42	190.262.806.339,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.633.409.996,00	4.506.111.173,00	97,25	4.430.955.035,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.267.206.967,00	824.260.425,00	65,05	579.062.380,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	196.614.460.408,00	193.696.712.300,00	98,52	175.662.108.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.990.365.520,00	3.974.500.000,00	99,60	5.188.750.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.529.794.160,00	4.552.485.130,00	69,72	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.272.647.710,00	4.030.978.000,00	94,34	4.401.930.024,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	4.515.346.623,00	4.514.570.800,00	99,98	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	706.700.449,00	694.250.000,00	98,24	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.883.565.494,00	25.778.795.385,00	99,60	26.197.140.567,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	986.100.000,00	985.005.000,00	99,89	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.093.000,00	100.629.900,00	98,57	106.736.700,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	118.052.400,00	116.161.680,00	98,40	122.172.540,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	84.739.500,00	84.630.000,00	99,87	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.429.515.000,00	1.428.257.250,00	99,91	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	61.902.675,00	55.738.725,00	90,04	68.877.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.820.400.000,00	7.820.400.000,00	100,00	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	100,00	1.940.400.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.576.300,00	3.233.214,00	90,41	3.970.503,00
5.1.01.04.11	Belanja Pambulatan Gaji DPRD	37.198,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.977.461.161,00	6.946.853.794,00	99,56	7.107.487.044,00

5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.565.298.260,00	6.505.070.822,00	99,08	6.352.588.380,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	411.390.000,00	409.815.000,00	99,62	11.025.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.173.413.494,00	1.054.818.904,00	89,89	910.038.113,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.634.000,00	53.917.200,00	87,48	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.570.000,00	6.780.000,00	64,14	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.040.000,00	98.280.000,00	95,38	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.270.000,00	7.531.680,00	66,83	7.531.680,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.260.000,00	416.232,00	33,03	747.319,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	15.000,00	1.040,00	6,93	1.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.680.000,00	5.469.120,00	63,01	5.503.680,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	280.000,00	112.320,00	40,11	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	560.000,00	336.960,00	60,17	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	907.540.004,00	863.897.002,00	95,19	704.771.642,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	68.564.490,00	18.077.350,00	26,37	30.509.512,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	960.360.000,00	920.360.000,00	95,83	993.111.457,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	360.360.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	599.991.457,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	106.275.341.657,00	101.498.511.767,00	95,51	80.075.900.655,40
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	106.275.341.657,00	101.498.511.767,00	95,51	80.075.900.655,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.866.070.030,00	516.724.473.989,27	96,61	545.315.167.082,39
5.1.02.01	Belanja Barang	88.161.876.767,02	84.970.779.430,00	96,38	106.275.284.025,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.142.735.767,02	83.955.997.930,00	96,34	106.233.928.525,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.017.000,00	6.834.000,00	97,39	41.355.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.012.124.000,00	1.007.947.500,00	99,59	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	157.678.121.538,98	150.687.878.028,51	95,57	160.622.849.532,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.585.203.332,98	81.725.315.078,00	93,31	97.809.087.465,00

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.831.363.916,00	33.640.347.802,00	99,44	27.023.169.986,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	108.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.014.049.474,00	8.680.783.522,00	96,30	10.207.384.765,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.171.564.000,00	2.094.579.024,51	96,45	3.509.854.800,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	194.556.000,00	184.210.000,00	94,68	276.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.374.716.816,00	2.351.176.118,00	99,01	2.923.365.687,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.625.225.000,00	1.325.561.900,00	81,56	3.278.842.329,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.641.293.000,00	20.456.175.000,00	99,10	15.486.644.500,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	236.550.000,00	226.129.584,00	95,59	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.988.124.320,00	11.742.801.692,26	97,95	15.426.803.498,99
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.316.544.943,00	4.171.027.843,00	96,63	4.407.908.039,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.478.579.377,00	6.384.268.849,26	98,54	9.004.453.021,99
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.126.500.000,00	1.121.885.000,00	99,59	1.959.542.438,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	6.120.000,00	87,43	54.900.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	59.500.000,00	59.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.053.037.597,00	59.329.836.602,50	97,18	64.494.461.347,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.015.405.597,00	59.292.236.602,50	97,18	64.494.461.347,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	37.632.000,00	37.600.000,00	99,91	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.713.074.249,00	17.967.093.734,00	96,01	36.272.535.959,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.333.899.940,00	12.845.857.114,00	96,34	24.842.708.500,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.379.174.309,00	5.121.236.620,00	95,20	11.429.827.459,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.337.997.563,00	63.300.401.055,00	99,94	66.063.442.346,40
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.337.997.563,00	63.300.401.055,00	99,94	66.063.442.346,40
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.252.619.600,00	20.143.188.538,00	94,78	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.252.619.600,00	20.143.188.538,00	94,78	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.681.218.395,00	108.582.494.909,00	96,36	96.159.790.374,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.681.218.395,00	108.582.494.909,00	96,36	96.159.790.374,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.103.086.992,00	7.013.084.417,00	98,73	8.248.550.213,00

5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	6.823.086.992,00	7.013.084.417,00	102,78	8.248.550.213,00
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.823.086.992,00	7.013.084.417,00	102,78	8.248.550.213,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	79.850.000,00	79.850.000,00	100,00	0,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	79.850.000,00	79.850.000,00	100,00	0,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	79.850.000,00	79.850.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.474.919.900,00	131.315.302.420,00	99,12	96.443.567.581,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	46.578.006.000,00	46.577.818.000,00	100,00	27.823.163.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	46.378.006.000,00	46.378.006.000,00	100,00	27.673.460.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	199.812.000,00	99,91	149.703.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.928.467.900,00	71.771.356.100,00	98,41	66.967.872.581,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.238.000.000,00	8.238.000.000,00	100,00	5.548.475.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	36.180.521.900,00	35.658.490.000,00	98,56	48.506.375.589,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.119.946.000,00	27.684.866.100,00	98,45	12.598.021.992,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	390.000.000,00	190.000.000,00	48,72	115.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	11.290.270.000,00	11.287.952.320,00	99,98	0,00

5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.222.770.000,00	11.287.952.320,00	100,58	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.678.176.000,00	1.678.176.000,00	100,00	1.652.532.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.678.176.000,00	1.678.176.000,00	100,00	1.652.532.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.827.260.000,00	8.675.007.200,00	98,28	10.850.300.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.920.000.000,00	1.790.000.000,00	93,23	600.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.920.000.000,00	1.790.000.000,00	93,23	600.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.907.260.000,00	6.885.007.200,00	99,68	10.250.300.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.907.260.000,00	6.885.007.200,00	99,68	10.250.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.807.696.003.064,00	1.749.655.782.422,27	96,79	1.649.887.894.554,79
5.2	BELANJA MODAL	237.869.368.239,00	217.857.329.844,00	91,59	331.663.316.815,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.388.905.686,00	70.346.944.520,00	95,86	90.974.856.204,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	437.604.579,00	336.500.000,00	76,90	2.051.421.750,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	350.104.579,00	249.250.000,00	71,19	972.400.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	87.500.000,00	87.250.000,00	99,71	1.079.021.750,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.851.015.000,00	3.791.607.114,00	98,46	6.824.170.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.851.015.000,00	3.791.607.114,00	98,46	6.627.170.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	197.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	85.899.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	61.037.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	5.912.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	18.950.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	87.275.800,00

5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	87.275.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.877.709.043,00	2.795.422.630,00	97,14	4.660.219.495,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	976.827.758,00	952.025.000,00	97,46	851.382.850,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.875.484.385,00	1.819.657.630,00	97,02	3.736.986.645,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.396.900,00	23.740.000,00	93,48	71.850.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.559.883.034,00	2.553.528.200,00	99,75	1.691.007.200,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.510.853.034,00	2.504.568.200,00	99,75	1.419.900.700,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	49.030.000,00	48.960.000,00	99,86	271.106.500,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.243.777.034,00	6.575.632.569,00	90,78	14.717.221.108,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.735.079.726,00	4.074.852.569,00	86,06	13.622.523.108,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.508.697.308,00	2.500.780.000,00	99,68	1.094.698.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	818.836.000,00	814.099.420,00	99,42	5.218.543.778,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	818.836.000,00	814.099.420,00	99,42	4.472.055.023,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	1.928.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	744.560.755,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.224.026.368,00	3.912.323.598,00	92,62	14.205.360.050,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.723.704.288,00	3.460.250.198,00	92,92	13.377.735.800,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	500.322.080,00	452.073.400,00	90,36	827.624.250,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	13.801.600,00	13.800.000,00	99,99	42.421.400,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	13.801.600,00	13.800.000,00	99,99	42.421.400,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	1.600.000,00	1.536.000,00	96,00	0,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	1.600.000,00	1.536.000,00	96,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	29.640.000,00	29.591.000,00	99,83	337.821.500,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	296.121.500,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	20.340.000,00	20.291.000,00	99,76	19.100.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	586.699.800,00	585.429.800,00	99,78	176.050.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	586.699.800,00	585.429.800,00	99,78	176.050.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	143.000.000,00	142.558.000,00	99,69	5.500.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	143.000.000,00	142.558.000,00	99,69	5.500.000,00

5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.129.170.437,00	5.048.606.032,00	98,43	5.592.979.058,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.129.170.437,00	5.048.606.032,00	98,43	5.592.979.058,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	657.434.000,00	684.570.500,00	104,13	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	657.434.000,00	684.570.500,00	104,13	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	44.812.708.791,00	43.059.739.657,00	96,09	35.278.966.065,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	44.812.708.791,00	43.059.739.657,00	96,09	35.278.966.065,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.512.523.681,00	74.560.669.279,00	83,30	127.080.659.144,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.950.124.356,00	52.729.189.223,00	83,76	105.089.242.160,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.950.124.356,00	52.729.189.223,00	83,76	105.089.242.160,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	26.562.399.325,00	21.831.480.056,00	82,19	21.991.416.984,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	26.562.399.325,00	21.831.480.056,00	82,19	21.991.416.984,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.956.530.872,00	68.127.310.095,00	97,39	109.544.048.568,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	51.469.758.690,00	50.251.184.049,00	97,63	71.048.840.973,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	51.077.258.690,00	50.077.010.049,00	98,04	67.855.066.287,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	392.500.000,00	174.174.000,00	44,38	3.193.774.686,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.288.788.310,00	12.877.163.973,00	96,90	35.718.059.945,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.546.177.850,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	13.288.788.310,00	12.877.163.973,00	96,90	33.171.882.095,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.842.187.872,00	1.823.793.400,00	99,00	574.991.600,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	239.000.000,00	238.137.400,00	99,64	74.991.600,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.153.187.872,00	1.145.656.000,00	99,35	500.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	450.000.000,00	440.000.000,00	97,78	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.057.000.000,00	1.999.775.600,00	97,22	1.146.929.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.057.000.000,00	1.999.775.600,00	97,22	1.146.929.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.298.796.000,00	1.175.393.073,00	90,50	1.055.227.050,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.298.796.000,00	1.175.393.073,00	90,50	1.055.227.050,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.911.408.000,00	4.822.405.950,00	98,19	4.063.752.899,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	799.200.000,00	788.830.450,00	98,70	289.519.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	755.700.000,00	745.330.450,00	98,63	190.984.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00	98.535.500,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.263.000.000,00	2.242.420.000,00	99,09	1.272.010.000,00

5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00	54.010.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	2.150.000.000,00	2.129.420.000,00	99,04	1.218.000.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	257.495.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	257.495.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	680.422.500,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	680.422.500,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.265.284.000,00	1.505.140.500,00	118,96	1.347.145.899,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.265.284.000,00	1.505.140.500,00	118,96	1.347.145.899,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	167.944.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	167.944.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	415.980.000,00	286.015.000,00	68,76	217.160.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	415.980.000,00	286.015.000,00	68,76	217.160.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	237.869.368.239,00	217.857.329.844,00	91,59	331.663.316.815,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.395.999.070,00	3.398.746.694,00	62,99	11.244.018.883,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.395.999.070,00	3.398.746.694,00	62,99	11.244.018.883,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.395.999.070,00	3.398.746.694,00	62,99	11.244.018.883,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.395.999.070,00	3.398.746.694,00	62,99	11.244.018.883,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.395.999.070,00	3.398.746.694,00	62,99	11.244.018.883,00
5.4	BELANJA TRANSFER	471.950.752.546,00	467.309.790.561,00	99,02	492.721.574.939,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.829.710.696,00	3.829.710.696,00	100,00	4.238.493.005,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.829.710.696,00	3.829.710.696,00	100,00	3.778.073.662,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.829.710.696,00	3.829.710.696,00	100,00	3.778.073.662,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	460.419.343,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	460.419.343,00

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	468.121.041.850,00	463.480.079.865,00	99,01	488.483.081.934,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	468.121.041.850,00	463.480.079.865,00	99,01	488.483.081.934,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	442.719.081.934,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	468.121.041.850,00	463.480.079.865,00	99,01	45.764.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	471.950.752.546,00	467.309.790.561,00	99,02	492.721.574.939,00
	JUMLAH BELANJA	2.522.912.122.919,00	2.438.221.649.521,27	96,64	2.485.516.805.191,79
	SURPLUS/DEFISIT	(54.471.672.000,24)	21.530.494.594,00	(39,53)	(163.662.773.109,43)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	54.471.672.000,24	65.971.161.278,24	121,11	241.893.488.558,67
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.530.715.449,24	93.704.700.449,24	100,19	247.877.088.428,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78.230.715.449,24	78.230.715.449,24	100,00	246.374.088.428,67
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	473.985.000,00	158,00	1.503.000.000,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	473.985.000,00	158,00	1.305.000.000,00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	300.000.000,00	473.985.000,00	0,00	1.305.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.530.715.449,24	93.704.700.449,24	100,19	247.877.088.428,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.059.043.449,00	27.733.539.171,00	71,00	5.983.599.870,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00

6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	2.904.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.059.043.449,00	27.733.539.171,00	71,00	3.079.599.870,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	39.059.043.449,00	27.733.539.171,00	71,00	3.079.599.870,00
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	39.059.043.449,00	27.733.539.171,00	71,00	3.079.599.870,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.059.043.449,00	27.733.539.171,00	71,00	5.983.599.870,00
	PEMBIAYAAN NETTO	54.471.672.000,24	65.971.161.278,24	121,11	241.893.488.558,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	87.501.655.872,24	0,00	78.230.715.449,24

LAMPIRAN 3

**Perhitungan Efisiensi, Efektivitas, serta
Kontribusi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Terhadap PAD**

PERHITUNGAN EFISIENSI

1. EFISIENSI PAJAK DAERAH

Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	a	b	c = (a:b) x 100%	
2020	2.327.572.502,00	90.424.462.672,61	2,57%	Sangat Efisien
2021	7.497.462.808,00	96.386.623.239,00	7,78%	Efisien
2022	7.756.817.961,00	115.414.988.961,00	6,72%	Efisien
2023	4.430.955.035,00	127.792.238.016,00	3,47%	Sangat Efisien
2024	863.897.002,00	132.624.031.337,00	0,65%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			4,24%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

2. EFISIENSI RETRIBUSI DAERAH

Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	a	b	c = (a:b) x 100%	
2020	615.079.307,00	13.718.556.188,00	4,48%	Sangat Efisien
2021	505.498.478,00	11.395.502.881,00	4,44%	Sangat Efisien
2022	419.899.189,00	14.829.580.201,00	2,83%	Sangat Efisien
2023	579.062.380,00	19.283.577.842,00	3,00%	Sangat Efisien
2024	18.077.350,00	233.562.254.492,48	0,01%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			2,95%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

PERHITUNGAN EFEKTIVITAS

1. EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH

Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	a	B	$c = (b:a) \times 100\%$	
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	114,98%	Sangat Efektif
2021	85.525.000.000,00	96.386.623.239,00	112,70%	Sangat Efektif
2022	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	118,34%	Sangat Efektif
2023	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	111,72%	Sangat Efektif
2024	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	108,27%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			113,20%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

2. EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH

Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	a	B	$c = (b:a) \times 100\%$	
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	112,25%	Sangat Efektif
2021	12.026.668.933,00	11.395.502.881,00	94,75%	Efektif
2022	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	98,50%	Efektif
2023	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	100,44%	Sangat Efektif
2024	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	93,59%	Efektif
Rata-Rata Efektivitas			99,91%	Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

PERHITUNGAN KONTRIBUSI

1. KONTRIBUSI PAJAK DAERAH

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	a	b	c = (b:a) x 100%	
2020	303.331.015.448,27	90.424.462.672,61	29,81%	Sedang
2021	376.702.757.475,31	96.386.623.239,00	25,59%	Sedang
2022	321.603.082.547,58	115.414.988.961,00	35,89%	Cukup Baik
2023	363.451.938.328,36	127.792.238.016,00	35,16%	Cukup Baik
2024	379.425.932.137,27	132.624.031.337,00	34,95%	Cukup Baik
Rata-Rata Kontribusi			32,28%	Cukup Baik

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

2. KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH

Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

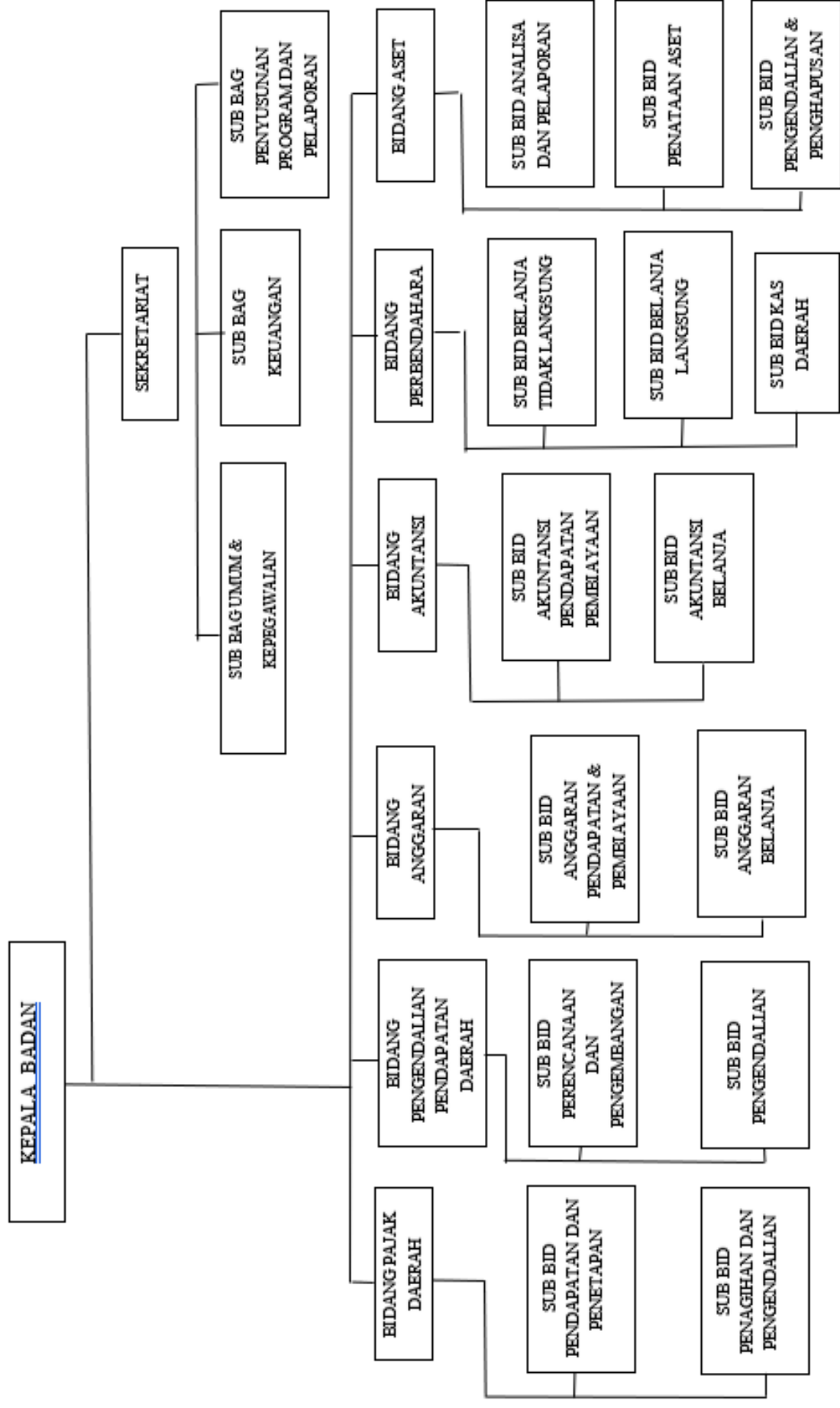
Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	a	b	c = (b:a) x 100%	
2020	303.331.015.448,27	13.718.556.188,00	4,52%	Sangat Kurang
2021	376.702.757.475,31	11.395.502.881,00	3,03%	Sangat Kurang
2022	321.603.082.547,58	14.829.580.201,00	4,61%	Sangat Kurang
2023	363.451.938.328,36	19.283.577.842,00	5,31%	Sangat Kurang
2024	379.425.932.137,27	233.562.254.492,48	61,56%	Sangat Baik
Rata-Rata Kontribusi			15,80%	Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

LAMPIRAN 4

Struktur Organisasi BPPKAD

Kabupaten Ponorogo



LAMPIRAN 4

Berita Acara Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **BAGAS MAHARDIKA PUTRA**
2. NIM : **21441846**
3. Prodi : **S1 AKUNTANSI**
4. Bidang : **AKUNTANSI**
5. Alamat : **JL. ULERKAMBANG NO.46**
6. Judul Skripsi : **ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. (STUDI KASUS PADA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020-2024)**
7. Masa Pembimbingan : **September 2024 s/d Agustus 2025**
8. Tanggal Mengajukan Skripsi : **15 April 2025**
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
27-4-2025	Revisi Proposal	f.
25-4-2025	Revisi Proposal	f. f.
28-4-2025	ACC. Proposal	f. f.
29-4-2025	revisi proposal	f. f.
2-5-2025	ACC proposal	f. f.
4-5-2025	Revisi Bab 1,2,3	f. f.
18-5-2025	Revisi Bab 1,2,3	f. f.
23-5-2025	ACC. Bab 1,2,3	f. f.
4-6-2025	Revisi Bab 4 & 5	f. f.
18-6-2025	Revisi Bab 4 & 5	f. f.
20-6-2025	ACC. Bab 4 & 5	f. f.
23-6-2025	revisi bab 1,2,3,4 (Revisi sy di kampus)	f. f.
7-7-2025	revisi bab 4,5	f. f.
9-7-2025	revisi bab 4,5	f. f.
13-7-2025	Cek Plagiasi 28%	f. f.

